

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 83 TAHUN VI ★ MARET-10 APRIL 2011

Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)

Intelijen dan Fenomena WikiLeaks



Berita Sensasi Koran Australia UJI KESABARAN PRESIDEN SBY

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY



Sampul desain: esero

Edisi No. 83/Th. VI/Maret - 10 April 2011

DARI REDAKSI 4
 VISI BERITA 5
 BERITA TERDEPAN 6
 SURAT PEMBACA 8
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

LEGA, MELIHAT KESABARAN PRESIDEN | 21

Dominasi politik intelijen dan kebijakan pencitraan pemerintah tampaknya menghadapi perlawanan sangat berarti baik dari dalam maupun luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Ketenangan dan kesabaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah diuji.



Berita Sensasi Koran Australia 15
 Sensasi Omong Kosong 18
 Intelijen dan Fenomena Wikileaks 22

BERITA NASIONAL

Saling Curiga Pasca Teror Bom Buku 25
 Pro Kontra Pembatasan BBM Bersubsidi 26

BERITA POLITIK

Jalan Terjal Capres Independen 28
 Ironi Angket Pajak dan Isu Reshuffle 30

BERITA KHAS

Pelabuhan Merak Makin Mandek 32

LENERA



AL-ZAYTUN - PARTAI DEMOKRAT SEHATI BANGUN BANGSA

Partai Demokrat menjalin silaturahmi dengan Mahad Al-Zaytun dalam rangka membangun bangsa dan negara ke depan. Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono berkeyakinan, Al-Zaytun dan Partai Demokrat mempunyai jalan pikiran yang sama untuk membangun bangsa dan negara. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang juga berpendapat, kedua kekuatan ini bila bersinergi, akan menjadi kekuatan bangsa.....34

BERITA TOKOH

George Toisutta 43
 Edhie Baskoro Yudhoyono 43
 Uliil Absar Abdalla 43
 Susno Duadji 43

BERITA HUKUM

Kasus Suap yang Janggal 44

BERITA DAERAH

Minta KPK Usut Kasus Bansos Batam 49
 Pakai Aturan atau Pribadi 50
 Purwakarta Menata Pola Birokrasi 43
 Pemkab Humbahas Respon Positif PWH 52

BERITA PUBLIK

Perkuat Modal Asuransi 53
 Menuju Pelayanan Berkualitas 53
 Melalui Inovasi Bisnis Menangkan Kompetisi 54

BERITA MANCANEGERA

Libya Bergolak 56



BERITA IPTEK

Banyak yang Latah demi Gengsi 58

BERITA KESEHATAN

Beri Insulin Sejak Awal 60

BERITA BUDAYA

Menghidupkan Lagi Opera Batak 62

BERITA OLAHRAGA

Akhir Drama Kemelut PSSI 64



BERITA BUKU

Bakat Bukan Penentu 66

BERITA EKONOMI

Koperasi Sudah Menjadi Sokoguru 46



PEMIMPIN UMUM:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:

Ch Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:

MYR Agung Sidayu

Imam Prawoto

Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):

Mangatur Lorieclide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

REDAKTUR:

Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI

Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:

Nawawi, Ikhwani Triatmo, Sarjiman, Doan Adikara

Pudan, Mulyanti Sahara

WARTAWAN FOTO:

Wilson Edward

KARIKATURIS:

FX. Ichida Sonny P

KONTRIBUTOR:

Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,

Retno Handayani

DESAIN GRAFIS:

ESERO Design, Arief Maulana

BIRO REDAKSI:

Banda Aceh: Christian Natamado, Medan: Bontor Simanullang, Tapanuli: Parasian Manalu, Batam: Ridwan Marbun, Palembang: Sri Windayani, Jawa Barat: Bernard Sihite, Kalimantan Timur: Sudirman Leonard Pohan, Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland), Rukyal Basri (Philadelphia)

PENERBIT:

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

KOMISARIS:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ch Robin Simanullang

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Samsuri

IKLAN DAN PROMOSI:

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu

KEUANGAN DAN UMUM:

Mangatur Lorieclide Paniroy

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

Jl. Bukit Duri Tanjung IX No. 8A Jakarta Selatan.

Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474

Fax. (021) 83787235

E-MAIL:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

WEBSITE:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PERCETAKAN:

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)



Redaktur Senior Berita Indonesia, Imam Prawoto sholat maghrib berjamaah dengan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta Syaykh Al-Zaytun.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb***Salam Sejahtera,**

Bocornya dokumen-dokumen rahasia diplomatik berbagai negara termasuk kawat diplomatik AS di Jakarta oleh Wikileaks menjadi sebuah fenomena dan sorotan perhatian dunia. Bagi Indonesia, kasus ini semakin fenomenal setelah dua media terkemuka Australia, The Age dan Sydney Morning Herald pada 11 Maret 2011 melansir bocoran Wikileaks itu yang menyebutkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya telah menyalahgunakan kekuasaan. Pemberitaan tersebut sempat menjadi polemik di berbagai kalangan.

Pada hal, di samping masalah tersebut, masih banyak masalah lain yang menerpa bangsa ini, seperti bom buku, kerusuhan bernuansa agama dan pernyataan tokoh lintas agama soal kebohongan pemerintah. Semua masalah ini seakan menguji kesabaran Presiden SBY. Untuk mengetahui lebih jauh, berita ini kami ulas dalam Rubrik Berita Utama.

Sementara itu dalam rubrik Lentera, kami mengangkat kunjungan silaturahmi Partai Demokrat ke Al-Zaytun (17/3/2011). Temu ramah mesra partai berlambang tiga berlian ini dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama Sekjen Edhie Baskoro. Dalam kunjungan yang singkat namun penuh makna ini, kedua lembaga ini sepakat sehati untuk membangun bangsa untuk lebih bermartabat dan sejahtera. Sebagai pelengkap dari rubrik ini dapat juga Anda baca wawancara dengan Anas Urbaningrum mengenai pandangannya terhadap Al-Zaytun.

Sedangkan dalam rubrik Wawancara, kami juga menurunkan wawancara kami dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Syarif Hasan.

Situasi Libya yang sedang bergejolak setelah rakyat turun ke jalan berdemonstrasi karena tidak puas dengan kepemimpinan Moamar Khadafi, kami masukkan ke dalam Rubrik Mancanegara.

Selain itu, kami menyoroti soal seringnya terjadi kemandekan di pelabuhan Merak sehingga pembangunan jalur kereta api bawah laut sebagaimana diwacanakan oleh Syaykh Al-Zaytun, perlu segera direalisasikan.

Di rubrik Nasional, kami mengangkat topik soal BBM dan bom buku. Di rubrik politik, kami menulis tentang calon independen dan usulan angket pajak yang tidak jadi di DPR serta akibat-akibatnya.

Selain itu masih banyak rubrik menarik yang dapat Anda baca, seperti rubrik Iptek yang mengulas tentang maraknya pemakaian BlackBerry di masyarakat. Ada juga ulasan tentang karbohidrat di rubrik Kesehatan. Juga berita-berita dari berbagai daerah, Berita Publik, Berita Olahraga, dan Budaya. Akhir kata selamat membaca, semoga berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Diplomasi Bermartabat

Wikileaks yang dikelola Julian Assange dan kawan-kawan telah membuat para intelijen dan diplomat berbagai negara terperangah dan bahkan terbodoh. Dominasi pengaruh (kekuasaan) intelijen dan para diplomat negara tampaknya menghadapi perlawanan sangat berarti dengan kehadiran Wikileaks. Bahkan para pemimpin negara adidaya AS dibuat terperangah, terkecoh, terbodoh dan marah. Kualitas kerahasiaan dokumen diplomatik AS pun kini diragukan. Tak terkecuali, para intelijen dan diplomat Indonesia pun terperangah dan tampak masih hipokrit dengan melecehkan Wikileaks.

Umumnya para diplomat dan intelijen menyalahkan Wikileaks karena membocorkan dokumen yang sesungguhnya bersifat rahasia, milik negara. Wikileaks benar-benar mengejutkan dengan menjadikan sesuatu yang bersifat rahasia menjadi berita terbuka. Sehingga, pada Mei 2010, New York Daily News menempatkan WikiLeaks pada peringkat pertama dalam "situs yang benar-benar bisa mengubah berita".

Amerika Serikat menjadi negara paling sibuk akibat kehadiran Wikileaks. Memang, pada mulanya kuat dugaan tujuan utama WikiLeaks adalah menghancurkan kredibilitas AS di mata dunia. Namun, perlu dicermati, AS yang telah diperdaya Wikileaks, bukan negara bodoh. Para diplomat dan intelijen negara adidaya yang sering memamerkan posisi sebagai polisi dunia, itu sudah terlatih memanfaatkan kelebihan dan kekurangan pihak lain (kawan atau lawan) demi kepentingannya.

Tak terkecuali kemungkinan AS memanfaatkan Wikileaks, yang sejauh ini secara terbuka melawan AS, justru telah dan akan dimanfaatkan demi kepentingan (diplomasi dan intelijen) AS sendiri. Termasuk, patut dicurigai, pembocoran dokumen-dokumen diplomatik Kedubes AS di Jakarta. Sebab menurut WikiLeaks, kini ada 3.059 kawat dari Kedubes AS di Jakarta di tangan mereka.

Kita patut mencermati, kebocoran atau pembocoran dokumen-dokumen diplomatik Kedubes AS di Jakarta ke/oleh Wikileaks yang sebagian telah diberikan secara khusus kepada dua koran Australia The Age dan Sydney Morning Herald, yang menuding Presiden SBY korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan, serta melibatkan beberapa nama tokoh nasional, tak terlepas dari kepentingan diplomasi AS dan mungkin juga Australia.

Sehingga para pemimpin, diplomat dan intelijen Indonesia tidak sepatutnya meremehkan, bersikap hipokrit, atas kehadiran (fenomena) Wikileaks. Sebab melihat kemampuannya menerobos dokumen-dokumen rahasia AS yang telah didukung SDM dan peralatan canggih, Wikileaks pastilah bukan organisasi (kontra intelijen non-negara atau anjing penggonggong intelijen) yang patut diremehkan.

Sebagai contoh kedahsyatan Wikileaks. Pada Juli 2010, situs Wikileaks membuat sensasi yang menghebohkan para diplomat AS karena pembocoran dokumen Perang Afghanistan. Kemudian, pada Oktober 2010, membocorkan hampir 400.000 dokumen Perang Irak. Lalu pada November 2010,

WikiLeaks mulai merilis pula kabel-kabel diplomatik Amerika Serikat yang bersifat rahasia.

Apalagi, secara kasat mata kita menyaksikan betapa kuatnya dukungan publik dunia kepada Wikileaks. Bahkan secara formal, dukungan itu dapat kita lihat dari beberapa penghargaan yang telah dianugerahkan pada Wikileaks. WikiLeaks telah menerima penghargaan *New Media Award* dari majalah Economist tahun 2008. Pada Juni 2009, WikiLeaks dan Julian Assange memenangkan *UK Media Award* dari *Amnesty International* (kategori New Media) untuk publikasi tahun 2008 berjudul *Kenya: The Cry of Blood – Extra Judicial Killings and Disappearances*, sebuah laporan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya tentang pembunuhan oleh polisi di Kenya. Lalu, pada Mei 2010, *New York Daily News* menempatkan WikiLeaks pada peringkat pertama dalam "situs yang benar-benar bisa mengubah berita".

Sungguh, dunia intelijen dan diplomasi antarnegara mengalami tantangan dan perkembangan baru dengan kehadiran situs Wikileaks. Tak tanggung-tanggung, para diplomat dan intelijen AS pun dibuat kalang-kabut. Wikileaks telah menjadi sebuah fenomena. Telah membuat dokumen intelijen dan diplomatik yang bersifat rahasia menjadi berita umum terbuka.

Namun perlu dicatat, selain berdimensi negatif atas terbukanya suatu rahasia milik negara (sesuatu yang pantas dirahasiakan), juga berdimensi positif untuk mendorong perkembangan dunia intelijen dan diplomasi lebih bermartabat, beretiket dan menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, kebenaran dan kemanusiaan.

Dimensi positif ini perlu dimaknai dengan lebih mendorong setiap negara, terutama negara-negara maju, khususnya negara adidaya AS, yang selama ini terkesan arogan dalam berbagai langkah diplomatiknya, untuk lebih saling menghargai, lebih bermartabat, beretiket dan menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, kebenaran dan kemanusiaan. Dalam dimensi ini, Wikileaks berdayaguna mendorong terciptanya diplomasi lebih bermartabat dan saling menghargai.

Maka, kita memandang, dalam mencermati fenomena Wikileaks ini, pemerintah RI perlu lebih meningkatkan kemampuan para diplomat dan pejabatnya dalam berdiplomasi, termasuk menyaring informasi yang diberikan kepada para diplomat asing. Kebiasaan buruk, mental pejabat mengumbar informasi kepada diplomat asing harus diakhiri. Kita melihat, kasus terbaru bocoran kabel diplomatik Kedubes AS, banyak bersumber dari kebiasaan buruk para pejabat (lingkaran Istana Presiden) mengumbar informasi kepada diplomat asing. Ingat pepatah: Mulutmu adalah harimaumu.

Begitu pula para intelijen negara, seharusnya mengambil makna pembelajaran dari fenomena Wikileaks ini. Lebih meningkatkan kualitas kemampuan, terutama terkait ketaatan dan loyalitasnya kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak terkecuali, para elit politik yang bersaing merebut kekuasaan, tidak melanjutkan kebiasaan meminjam tangan negara asing untuk melawan rival politiknya. *Redaksi*





Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

• email : redaksi@berindo.com
• surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan 12840
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
Fax. (021) 83787235

Rakyat Tunggu Janji Pemerintah

Kebutuhan perumahan di Indonesia khususnya rumah murah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Saat ini kebutuhan rumah di Indonesia mencapai mencapai 710.000 unit hingga 800.000 unit. Pemerintah sendiri berencana membangun 121.426 unit KPR sejahtera tapak senilai Rp 5,9 triliun dan 2.914 unit KPR sejahtera susun senilai Rp 299 miliar dengan dana kredit konvensional senilai Rp 6, 2 triliun. Sementara untuk KPR Syariah akan dibangun sebanyak 3.231 unit KPR sejahtera tapak dengan total nilai Rp. 181,6 miliar. Sementara itu untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini diperkirakan sebanyak Rp.6,4 triliun. FLPP bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan kredit rumah yang dibeli dari pengembang dengan cicilan yang lebih ringan dari yang berlaku saat ini. Bagi masyarakat yang sudah memiliki KPR konvensional pun, bisa mengkonversi dengan menjadi KPR FLPP dan segera menikmati bunga rendah. Untuk pengadaan rumah ini pemerintah masih mengkaji secara mendalam dan akan belajar soal teknologi rumah secara massal atau berskala besar ke China. Jika realisasi pembangunan rumah ini benar-benar terjadi, semua rakyat Indonesia akan berterimakasih akan pembangunan rumah tersebut. Setidaknya akan ada penghargaan khusus dari masyarakat jika benar-benar terwujud untuk rakyat menengah ke bawah.

Yudi Setiawan

*Jalan Bona Vista Raya No. 18
Jakarta 12440*

Jembatan Selat Sunda Solusi Kemacetan Merak

Berkaca dari pengalaman China, pembangunannya begitu pesat karena mengutamakan pembangunan infrastruktur. Salah satu bukti dengan membangun salah satu jembatan terpanjang di dunia. Begitu juga dengan rencana pemerintah membangun Jembatan Selat Sunda

(JSS) mulai akhir 2013 merupakan langkah yang bagus untuk perkembangan perekonomian di masa depan. Secara nasional membangun ekonomi lewat koridor-koridor yang telah diperhitungkan, baik di Indonesia bagian timur, Kalimantan dan Sumatera akan lebih mudah mengaksesnya. Dalam hal ini pembangunan JSS merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi antrean truk yang memasuki pelabuhan Merak, Banten, untuk menyeberang ke dan dari pelabuhan Bakauheni, Lampung. Namun demikian kelayakan pembangunan jembatan Selat Sunda, ini harus dilakukan secara mendetail dan komprehensif serta mendetail. Diharapkan dengan pembangunan JSS ini, akan menghemat energi dalam jarak tempuh sehingga menghemat pengeluaran. Mengakomodir kebutuhan perekonomian secara merata di setiap wilayah Indonesia. Selain memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera, pembangunan JSS ini juga berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi bersama kawasan Asia.

Teguh Priyanto

*Jalan Pegadegan Raya Gg. Nangka
No. 45 RT/RW 02/02 Jakarta Selatan*

Kekerasan Massa dan Peran Tokoh Agama

Kekerasan massa bekedok agama memperlihatkan betapa rapuhnya rasa kebangsaan, persaudaraan sesama anak bangsa. Seperti peristiwa penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Kemudian disusul pengrusakan rumah ibadah di temanggung, Jawa Tengah mengundang reaksi dari berbagai kalangan seperti pemuda, tokoh agama, politikus, hingga pejabat pemerintah. Kejadian telah membuat rasa ke-Bhinekaan-yang dimiliki Indonesia, terkoyak. Bagaimana mungkin di depan mata kita memperlihatkan gambar yang membuat miris melihatnya beberapa orang tewas dan hancurnya rumah-rumah ibadah. Bahkan aparat penegak hukum yang menjadi asa seluruh rakyat tidak dapat membendung massa yang sudah gelap mata. Kita meyakini, kejadian di Pandeglang dan Jawa Tengah, bukanlah ajaran dari semua agama yang diakui di republik, namun lebih daripada ulah segelintir orang yang mengatasnamakan agama. Namun demikian umat seperti ini tidak tersentuh oleh kasih sayang dan uluran tangan tokoh-tokoh agama. Padahal sentuhan tangan tokoh agama lebih dan lebih tulus daripada sentuhan tangan penguasa yang penuh dengan hitungan-hitungan politis. Oleh karenanya bimbinglah umat dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ajarkan

bagaimana caranya hidup rukun antar sesama tanpa memandang dia berkeyakinan apa. Jika itu yang terjadi maka tercipta harmoni yang indah dalam mengarungi hidup di bumi pertiwi ini.

Meminjam istilah Khalil Gibran, “bunyi gitar tercipta dari harmoni senar dengan kunci nada yang berbeda”. Jadi apa dasar kita berkonflik kalau sedari awal negeri yang kita cintai ini, menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan, pluralisme, dan multikulturalisme?

Ahmad Inamullah

*Jl. Ciledug Raya No. 18 B Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan*

Tingkatkan Produksi Pertanian

Sebagai negara agraris Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang bercocok tanam. Pemandangan lahan sawah terhampar luas di pelosok negeri ini. Namun dibalik kekayaan tersebut menyimpan pertanyaan, mengapa Indonesia harus terus menerus mengimpor kebutuhan bahan pokok. Memang pemerintah memastikan akan menghentikan impor beras dari Thailand pada Maret 2011, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah ditetapkan. Karena pada bulan Maret Indonesia sedang musim panen. Selain itu iklim bagaikan bagaikan bencana yang tidak dihindarkan juga berpengaruh untuk mewujudkan ketahanan pangan, terutama untuk komoditi beras. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai antisipasi diantaranya pembebasan bea masuk dan merencanakan pemberian ganti rugi kepada petani gagal panen berupa asuransi pertanian serta mensubsidi pupuk dan bibit tanaman serta padi. Setidaknya langkah-langkah tersebut dapat membantu kebutuhan pokok masyarakat dan menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang tak perlu mengimpor beras dari luar negeri.

Leni Ekawati

*Jl. Raya Buaran Raya Buntu BSD
No.14, Serpong Tangerang*

Hubungan Bilateral yang Terjal

Kedekatan hubungan bilateral Indonesia-Australia bagaikan cuaca yang keadaannya tidak bisa ditebak. Dalam sejarah, perjalanan hubungan kedua negara ini tidak lepas dari konflik dan terkesan selau menyudutkan Indonesia. Ketika terjadinya konflik antara Indonesia-Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia dimana Australia memberikan dukungan militernya kepada Malaysia saat konfrontasi dengan militer Indonesia Indonesia di Borneo (Kalimantan). Namun

pada masa Orde Baru hubungan kedua negara ini sempat membaik. Kembali lagi memanas saat terjadi pemisahan Timor Timur (Timor Leste) dari Indonesia pada tahun 1999. Indonesia menganggap, lepasnya Timor Timur akibat turut campur Australia. Selain itu sikap kongres Australia membiarkan masuknya pelarian dari gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke wilayah Australia. Dan terbaru, media Australia kembali memanas hubungan kedua negara ini. Setelah koran Australia The Age dan Sydney Morning Herald memberitakan mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Yudhoyono dengan menutip data dari bocoran kawat diplomatik AS melalui Wikileaks.

Dengan berbagai kejadian tersebut hendaknya kita menyikapi dengan akal cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Jangan sampai timbul sebuah persepsi yang akhirnya dapat merugikan negeri ini. Tuduhan yang disampaikan Wikileaks yang dipublikasikan kedua media tersebut belum tentu faktanya benar dan jika kita terprovokasi akhirnya kita sendiri yang rugi. Untuk itu mari ber-

sama-sama merapatkan barisan dan menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia bangsa yang cerdas yang tak termakan oleh hasutan dan fitnah. Apalagi pemberitaan tersebut bukan hanya menyerang SBY selaku presiden, tapi juga telah memojokkan para petinggi partai politik. Sangat jelas ada pihak asing yang menginginkan negeri ini hidup damai dan menjadi negara besar yang mampu bersaing dengan dunia internasional.

Hendri Siregar

*Jl Dasa Dharma Jembatan 6 No. 74
Bekasi Timur*

Prihatin LP Jadi Sarang Peredaran Narkoba

Tertangkapnya kepala lembaga Penjara bukanlah tempat steril dari tindak kejahatan peredaran narkoba. Namun dibalik pengamanan yang super ketat yang mengharuskan setiap orang yang berkunjung harus sepengetahuan kepala ini jaringan diduga telah lama terbentuk. Ini terbukti dengan tertangkapnya kepala Lembaga Masyarakat Nusakamba-

ngan, Cilacap dengan beberapa stafnya, karena diduga menampung uang hasil transaksi narkoba. Selain itu juga ditangkap seorang narapidana LP Narkotika Hartoni yang diduga menjadi bagian dari perdagangan narkotika tersebut. Kasus ini bukan hanya terjadi LP Nusakambangan, tetapi juga terjadi di lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia. Sangat ironis ternyata lembaga pemasyarakatan yang seharusnya untuk membina tidak membuat para terpidana menjadi jera atau takut melanggar perbuatannya. Pada kenyataannya terpidana juga sangat rentan terhadap tindak pidana, seperti peredaran narkotika, pemerasan, dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri, penjara telah menjadi ajang bisnis bagi setiap orang. Sarang korupsi, bisnis narkoba diatur dan dijalankan dari penjara. Agar LP tidak menjadi sarang peredaran narkoba dan tempat pengendali peredaran narkoba. Diperlukan pengawasan ketat oleh pihak terkait seperti kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga tidak berulang kasus ini.

Yudi Prasetyo

Jl. Ciliwung Margonda, Depok

Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Ramping No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hillir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **PANGKAL PINANG** : Achmad Effendi, Jl. Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Robot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wak'e'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf V/I Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejangjik No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009, **NEW ZEALAND** : Ikhwan Triatmo. **JAWA BARAT** : Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 – **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081



Yusuf Buka “Aib” PKS?

Sebuah isu kurang sedap, yakni dugaan penggelapan menerpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tidak tanggung-tanggung, pihak yang diduga terlibat adalah para pengurus teras partai.

Adalah Yusuf Supendi, salah seorang pendiri Partai Keadilan (sekarang PKS) yang juga mantan anggota Fraksi PKS DPR 2004-2009 yang membuka “aib” ini. Dimana pada Kamis (17/3/2011), ia melaporkan sejumlah anggota Fraksi PKS DPR RI, yang juga elite PKS, yakni Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, dan Sekretaris Jenderal Anis Matta ke Badan Kehormatan DPR (BK DPR) dengan tuduhan telah melanggar kode etik anggota Dewan.

Luthfi pun dituduh telah melanggar syariah dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mengirimkan pesan singkat bernada mengancam kepadanya.

“Saya dituduh mengganggu istri orang. Sebagai muslim, skandal itu harus ada empat saksi kan. Saya sebagai pribadi muslim tidak pernah menyalahgunakan daging kehormatan saya,” kata Yusuf. “Bahkan ada yang mengirimkan SMS mau menghirup darah Yusuf Supendi. Aktor intelektualnya adalah Luthfi,” tambah Yusuf.

Sedangkan Hilmi dan Anis, ia tuding telah menyalahgunakan anggaran. “Anis, menggelapkan dana Pilkada DKI Rp 10 miliar bersumber dari Adang Daradjatun.

Hilmi, putra pentolan Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, gesit mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri,” ujarnya. Tidak puas hanya ke BK DPR, Yusuf juga kemudian (21/3/2011) melaporkan Anis Matta ke KPK.

Menanggapi tuduhan itu, Hilmi Aminuddin menampik dan mengatakan itu fitnah yang dekat dengan hukum. “Saya tegaskan itu fitnah,” katanya (17/3/2011). Hilmi juga menduga, Yusuf mengeluarkan tuding tersebut lantaran sakit hati karena diberhentikan dari PKS setahun lalu. Sementara Luthfi Hasan mengatakan masih memelajari dan mengkaji isinya.

Sedangkan Anis Matta mengatakan, aksi Yusuf ini merupakan pelengkap “serangan” kepada PKS pasca-pengambilan keputusan usulan hak angket perpajakan. “Tentu ada (muatan politis). Kami sedang memelajari dulu detailnya seperti apa,” tutur Anis, (21/3/2011). Anis bahkan mengatakan, PKS sudah mengetahui pihak yang ada di belakang Yusuf. Namun, selama ini pihaknya tak bereaksi berlebihan karena tidak melihat adanya ancaman bagi PKS.

“Secara logika, memang ada kesan serangan balik kepada PKS. Tapi detailnya seperti apa, ini sedang kami pelajari. Cuma, peta itu kelihatan buat PKS. Saya

menduga masih akan ada lagi beberapa serangan di beberapa hari ke depan,” tambah Anis.

Karena laporan ini dilakukan tidak lama setelah terjadi perbedaan pendapat antara Fraksi PKS dengan Fraksi koalisi pendukung pemerintah lainnya di DPR soal hak Angket Pajak, langkah Yusuf ini pun sangat menarik perhatian pengamat politik, terutama politisi PKS.

Menkominfo yang juga mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring misalnya, sangat menyayangkan laporan Yusuf tersebut. Mantan Presiden PKS lainnya, yang juga mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan hal ini, namun ia menganggap masalah ini sebagai sebuah dinamika.

Pengamat politik Burhanuddin Muh-tadi berpendapat, meski tidak menutup kemungkinan ada kepentingan di luar PKS yang bermain, namun adanya persoalan di internal PKS juga tidak bisa dipungkiri. “Saya melihat memang ada persoalan di internal PKS akibat adanya perbedaan pandangan. Salah satunya adalah ada pihak yang masih belum bisa menerima jika PKS menjadi partai terbuka, lebih nasionalis dan mempribumisasi. Dan ini menjadi persaingan dua orientasi yang berbeda di tubuh PKS. Selain itu, bisa jadi ada juga kekecewaan secara personal yang melebar menjadi persoalan lembaga,” ujarnya.

Sedangkan Syamsul Balda, salah seorang pendiri Partai Keadilan (PK) yang juga mantan Wapres Partai Keadilan (PK) sebagaimana dilansir harian Indo Pos (26/3/2011) menyebut, langkah Yusuf ini bisa saja merupakan bentuk kekecewaan, tapi ia percaya apa yang disampaikan Yusuf itu memiliki dasar.

Mengenai dugaan adanya pertentangan di internal PKS, Syamsul juga mengaku melihatnya. Namun, itu menurutnya bukan terkait posisi faksi keadilan melawan faksi sejahtera, tapi lebih pada pertarungan pragmatisme dan idealisme.

Yusuf sendiri, menanggapi pernyataan yang menganggap langkahnya melapor ke BK DPR dan KPK karena sakit hati telah dipecah, pria yang mengaku sudah pernah melaporkan hal yang sama pada tahun 2010 ini dengan tegas membantahnya. “Saya menerima informasi pemecatan saya pada tanggal 28 November 2010, jam 20:20. Sementara, saya mengadu ke Badan Kehormatan DPR mengenai kasus ini pada 2 Agustus 2010. Berarti kan lima bulan sebelumnya,” ujarnya, (21/3/2011).

Tudingan yang menyebut bahwa ia mendapat dukungan pihak lain, juga dibantah Yusuf. “Sejak awal saya tidak mempermasalahkan lembaga PKS, saya hanya ingin mengadukan individu-individu PKS yang telah melanggar kode etik,” katanya. ■ MS

Uang Tommy di Inggris Gagal Dibekukan

08/03- Upaya pemerintah untuk membekukan uang Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Banque National De Paris (BNP) Paribas sebesar 36 juta euro, gagal dilakukan. Setelah melakukan koordinasi dengan jaksa pengacara negara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, Noor Rachmad, di Jakarta, Selasa (8/3) mengatakan masalah pembekuan itu sudah berakhir. Kendati demikian, ia belum bisa mengomentari lebih jauh langkah apa yang akan dilakukan jaksa pengacara negara atas kegagalan pembekuan uang tersebut. Pada 9 Januari Pengadilan Tingkat Banding Guernsey (Guernsey Court of Appeal) menyatakan FIS tidak berhak membekukan uang Tommy yang disimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas.

Malaysia Klaim Produk Beras Indonesia

09/03- Padi Adan, padi premium atau kualitas satu yang hanya bisa tumbuh di Kecamatan Krayan, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur diklaim Malaysia sebagai produk negara tersebut. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, padi Adan yang dapat tum-

buh di daerah pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut itu merupakan varietas lokal Kalimantan Timur diklaim Malaysia sebagai produksi Desa Bario salah satu wilayah negara tetangga tersebut. Harga beras yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram itu dijual seharga Rp15.000 di perbatasan. Beras Adan yang diakui sebagai beras Bario itu, biasanya dikonsumsi kalangan istana sehingga dijual kepada raja-raja dengan harga 50.000/kg. Sementara itu, peneliti dari Balai Besar Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Sugiono Moeljo-pariro menyatakan, pihaknya telah mengajukan kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar membantu Pemda Kaltim untuk bisa mengajukan perlindungan indikasi geografis.

CSIS Sodorkan Naskah Kebijakan Perdamaian ASEAN

09/03- Lembaga Penelitian Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Selasa (8/3) mengajukan naskah kebijakan pengembangan jejaring Badan Pelatihan dan Pendukung Penjaga Perdamaian (PKCs) dalam Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). SCIS mengajukan tiga naskah kebijakan terkait pengembangan jejaring tersebut. Pertama, pembentukan

jejaring PKCs di ASEAN pada 2011 hingga 2015 yang difokuskan di lima PKC yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Kamboja sebagai penggerak kegiatan penjagaan perdamaian ASEAN di dalam kawasan maupun di luar kawasan dan aktif dalam misi-misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, menambah jumlah PKC di satu hingga dua negara anggota ASEAN yang berpotensi, seperti Vietnam, Brunei Darussalam atau Singapura untuk periode 5 hingga 10 tahun mendatang. Ketiga, semua negara anggota ASEAN yang berhasil membentuk PKC dengan metode pembangunan kapasitas berantai seperti pada naskah kedua. Dalam waktu 10-15 tahun itu akan dikembangkan suatu Badan Pengendali Kawasan untuk Operasi dan Dukungan Penjagaan Perdamaian ASEAN yang menjadi asal terbentuknya Pasukan Penjaga Perdamaian ASEAN.

Wacana Reshuffle Berhembus

13/03- Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali menebar ancaman akan terjadinya reshuffle kabinet. Ia menyebut sejumlah menteri dari Golkar dan PKS akan dihapus dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Saya ingatkan evaluasi kabinet ini belum final, masih mungkin adanya reshuffle kabinet," ujar Ruhut kepada detikcom, Minggu (13/3/

Berita Foto



EARTH HOUR: Sejumlah kota besar di 134 negara termasuk kota-kota di Indonesia serempak memadamkan lampu selama satu jam, Sabtu (26/3/2011) pukul 20.30-21.30. Di Jakarta Earth Hour ditandai dengan pemadaman lampu bangunan di beberapa ikon Ibu Kota seperti Bundaran HI, Balaikota, Istana Negara, Patung Kereta Kencana Arjuna Wiwaha, dan Patung Pemuda.

2011). Ia mengingatkan agar dua partai yang melanggar kontrak koalisi, Golkar dan PKS. Sebelumnya dalam pidato Presiden SBY (1/3/2011) adanya satu dua partai yang melanggar kesepakatan koalisi. Namun SBY tidak menyebut akan merombak kabinet dan partai apa saja yang melanggar tersebut. Peluang reshuffle masih setengah-setengah. Namun bagi Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam penafsiran pidato SBY belum tentu untuk Golkar dan PKS karena presiden tidak menyebutkan dengan secara jelas dari partai mana yang akan di reshuffle. Justru Qodari menilai, pidato SBY itu diperuntukkan bagi politisi Demokrat.

136 Anak Meninggal Setiap Hari

22/03- Data Bank Dunia tahun 2008 menyebutkan, 50.000 anak Indonesia meninggal dunia karena masalah sanitasi air dalam setahun. Atau rata-rata 136 anak setiap hari. Sekjen Lingkaran Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS ADI), Saiful Munir saat unjuk rasa peringatan Hari Air Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2011) mengatakan, hal ini diakibatkan kebijakan yang keliru dari pihak pemerintah dalam menyediakan akses air bersih kepada masyarakat. Menurutnya, seharusnya pemerintah melaksanakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah harus



TSUNAMI JEPANG: Gempa berkekuatan 8,9 SR mengguncang Jepang pada 11 Maret 2011 disertai dengan gelombang tsunami 10 meter. Tsunami ini merupakan tsunami terbesar yang pernah melanda Jepang. Menurut Badan Kepolisian Nasional Jepang, hingga Senin (28/3/2011), jumlah korban yang dikonfirmasi tewas dan dinyatakan hilang mencapai lebih dari 28.000 orang. Sebanyak 10.901 orang dipastikan meninggal dan 17.649 dinyatakan hilang.

mengupayakan air bersih gratis bagi rakyat, bukan diprivatisasi sebagaimana terjadi saat ini. Sementara itu, menurut data Bappenas sebagaimana dirilis pada tahun 2010, hanya 47,71 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak. Selebihnya, rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi.

Modus Baru Teror Bom Buku

26/03- Teror bom kembali melanda Tanah Air dengan modus baru menyebarkan paket bom buku ke sejumlah tokoh pada 15 Maret 2011. Paket bom buku diantaranya ditujukan kepada

Karikatur Berita



pendiri Jaringan Islam Liberal yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Gories Mere, Ketua Pemuda Pancasila Yapto Soeryosumarno, dan pimpinan Republik Cinta Management Ahmad Dhani. Satu paket bom buku yang dialamatkan ke Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur meledak dan melukai tiga orang yakni Kepala Satuan Reserse Kriminal Jakarta Timur Komisaris Polisi Dodi Rahmawan. Sementara dua bom lain yakni di Kantor BNN di Cawang, Jaktim dan di kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah. Masing-masing buku yang diarahkan ke empat tokoh memiliki judul berbeda. Buku kepada Ulil berjudul "Mereka yang Harus Dibunuh" karangan Sulaiman Azhar Lc, buku kepada Gories Mere berjudul "Pesta Narkoba para Pejabat Negara" karangan Sulaiman Azhar Lc, buku untuk Yapto berjudul "Masih Adakah Pancasila" karangan Busro Jahul sedangkan buku kepada Dhani berjudul "Yahudi Militan" karangan Alamsyah Mukhtar.

PKS Digembosi

27/03- Dugaan adanya isu korupsi dan berpoligami oleh sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini terungkap setelah salah satu Pendiri PKS Yusuf Supendi melaporkan adanya dugaan korupsi ke KPK. Yusuf melaporkan Sekjen PKS Anis Matta menggelapkan dana Pemilukada di DKI Jakarta pada 2007. Menurut pengamat kejadian akan

membuat PKS sulit mendulang suara lebih besar atau menjadi partai tiga besar dalam pemilu 2014. Pengamat Politik LIPI, Syamsudin Haris seperti dilansir okezone, Sabtu (26/3/2011) mengatakan beberapa kasus hukum yang menimpa kader PKS, di antaranya kasus Misbakhun, dugaan korupsi Sekjen PKS, Anis Matta dan isu poligami elite PKS akan mengubah anggapan publik terhadap PKS yang bersih. Publik akan menganggap PKS tak ubahnya seperti partai lainnya. "Lama-lama PKS sama dengan partai lain, yang semula dianggap bersih tapi ternyata tidak," tambahnya. Sementara itu, Anis Matta menyebutkan tuduhan kader senior PKS tersebut sebagai operasi politik untuk mendowngrade partainya. Anis menyebutkan bahwa apa yang diungkapkan Yusuf merupakan persoalan lama yang sudah diselesaikan secara internal partai.

Pembobolan Bank Marak

03/04- Maraknya kejahatan perbankan dengan melibatkan orang dalam, membuktikan tidak selamanya menjamin keamanan uang nasabah. Salah satu kasus yang membuat publik terperangah adalah aksi pembobolan bank yang dilakukan Senior Relation Manager Citigold Citibank, Inong Melinda alias Melinda Dee. Ia mengasak dana tiga nasabah sebesar Rp20 miliar dan sudah ditahan pihak kepolisian, Kamis (24/3/2011). Tidak berhenti di situ Polda Metro Jaya juga mengungkap tujuh kasus pembobolan bank lainnya dengan total

tersangka 20 orang. Enam dari 20 tersangka merupakan orang bank dengan posisi customer service hingga komisaris bank. Polisi mengungkapkan modus yang digunakan para karyawan untuk membobol bank dengan membuat 'surat sakti' untuk membuka rekening nasabah tertentu dan memindahkannya ke rekening komplotannya. Dengan surat sakti ini, setelah ada rekomendasi dari pusat, uang bisa dicairkan. Menurut pengamat perbankan Krisna Wijaya, untuk mencegah kejadian ini terulang kembali, para nasabah harus memiliki peran aktif untuk mengecek uang yang disimpan di bank.

Tangki Minyak Terbakar

03/04- Dua dari tiga tangki minyak di kompleks kilang Pertamina Refinery Unit (RU) IV di Cilacap, Jawa Tengah, terbakar. Namun kebakaran tersebut berhasil dipadamkan. Pasca meledaknya tanki tersebut, PT Pertamina tetap menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), aman dan normal. "Volume stok premium, solar dan kerosen berjumlah 3,2 juta KL," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun di Jakarta, Minggu (3/4). BUMN juga telah menyiapkan rencana cadangan dengan menyiagakan kapal untuk menginjeksi terminal Lomanis 400.000 bar dan menjaga penyaluran ke Yogyakarta dan Bandung berjalan lancar. Sementara itu, mengenai penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan masih dalam investigasi pihak berwenang.



Legga, Melihat Kesa

Dominasi politik intelijen dan kebijakan pencitraan pemerintah tampaknya menghadapi perlawanan sangat berarti baik dari dalam maupun luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Ketenangan dan kesabaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah diuji.



Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono diuji kesabarannya

Pemimpin negara yang terlalu mengandalkan peran (politik) intelijen dalam berbagai kebijakannya (terutama kebijakan bernuansa pencitraan) tidak mustahil bisa menjadi bumerang. Apalagi setelah organisasi 'kontra intelijen' Wikileaks belakangan ini gencar memublikasikan bocoran dokumen-dokumen diplomasi (intelijen) berbagai negara, terutama Amerika Serikat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipersepsikan selalu berupaya meningkatkan citra dan sangat mengandalkan peran (data) intelijen telah menjadi salah satu pemimpin yang diuji

kesabarannya menghadapi kemungkinan terjadinya bumerang itu.

Setelah beberapa tokoh lintas agama mendeklarasikan tahun perlawanan atas kebohongan pemerintah yang sebelumnya selalu mengklaim berbagai keberhasilan, muncul peristiwa penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu 6 Februari 2011; Disusul kerusuhan pasca sidang penodaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung, 8 Februari 2011. Banyak pihak menduga kedua peristiwa naas ini tak terlepas dari peran intelijen dengan berbagai kemungkinannya yang telah meramaikan pembe-

ritaan media nasional, termasuk anggapan sebagai pengalihan perhatian publik.

Menyikapi peristiwa rusuh itu, Presiden sempat mewacanakan pembubaran ormas anarkis, bahkan mengeluarkan beberapa instruksi. Wacana itu mengundang reaksi (wacana) ormas tertentu dengan ancaman 'memesirkan' Presiden SBY. Tampaknya ormas itu punya nyali karena merasa dikhianati jika benar-benar dibubarkan.

Kemudian menyusul penolakan Hak Angket Mafia Pajak melalui voting di sidang paripurna DPR, Selasa 22 Februari 2010. Isu suap pun merebak dalam voting hak angket mafia pajak itu. Isu itu per-

mbaran Presiden

tama kali dihembuskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon (Detik.com Kamis, 24/02/2011). Jumlah yang ditawarkan pun cukup besar. Dalam voting hak angket mafia pajak, kubu yang menolak yakni FPD, FPAN, FPPP, FPKB dan Gerindra dengan 266 suara. Sedangkan fraksi pendukung hak angket terdiri dari Golkar, PKS, PDIP dan Hanura dengan 264 suara.

Penolakan hak angket mafia pajak yang dimaknai berbagai pihak sebagai kemenangan mafia pajak, itu berbuntut 'kegaduhan' politik Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan SBY-Boediono yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB. Pasalnya, Partai Golkar dan PKS yang mendukung hak angket dianggap sebagai pengkhianat. Sehingga beberapa menteri di kabinet diwacanakan harus diganti (*reshuffle*).

Sementara, Partai Gerindra digadagadag dan menyatakan bersedia masuk koalisi partai dan kabinet dengan syarat menduduki jabatan Menteri Pertanian dan BUMN. PDIP pun didekati dan sebagian kadernya 'ngiler' juga jadi menteri, tetapi Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, tetap pada pendirian keputusan kongres mengambil posisi sebagai partai penyeimbang, di luar kabinet. Kegaduhan *reshuffle* pun berakibat ke-

bimbangan sejumlah menteri.

Mencoba menenteramkan kegaduhan isu *reshuffle* kabinet dan koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu melakukan klarifikasi. Meski sebenarnya tak ingin merespon isu sehari-hari, tapi karena khawatir mengganggu kerja kabinet, Presiden harus menjelaskannya.

"Ini adalah penjelasan saya yang resmi kepada Kabinet Indonesia Bersatu II, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden dan semua jajaran yang berada dalam lingkup kabinet," kata Presiden SBY pada bagian pengantarnya saat membuka sidang kabinet terbatas bidang Polhukam dan Kesra, di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011) siang.

"Saya memandang perlu untuk menyampaikan penjelasan karena meskipun saya menahan diri untuk tidak merespon, apalagi bereaksi terhadap isu-isu politik sehari-hari, tetapi dalam perkembangannya sering menyentuh para menteri yang menurut pendapat saya kalau tidak saya jelaskan bisa mengganggu konsentrasi tugas kita, yang tiap hari terus dilakukan," jelas Presiden SBY.

Sebab, menurut Presiden SBY, menyangkut isu *reshuffle* yang telah berminggu-minggu, arahnya kurang logis. Sampai pada satu titik, seolah-olah Presiden dipaksa, diharuskan, didikte untuk segera melaksanakan *reshuffle*.

Kemudian, ada yang mengatakan bahwa Presiden lambat dalam melakukan *reshuffle*. "Ini sesungguhnya ganjil, karena *reshuffle* itu bukan tujuan, *reshuffle* itu boleh disebut sarana. *Reshuffle* dilakukan manakala ada alasan yang urgen," tegas SBY.

Namun pernyataan tegas Presiden ini belum mengakhiri isu *reshuffle*. Masih dianggap mengambang. Bahkan para intelektual muda Partai Demokrat, di antaranya Ulil Abshar Abdalla, pun secara terbuka masih mendorong perlu segera dilakukannya *reshuffle* kabinet. Kegaduhan politik pun berkelanjutan. Partai koalisi saling sikut. Partai Golkar dinilai tidak pantas menjabat Ketua Harian Setgab. Lalu, PKS merasa disudutkan dengan berbagai isu negatif yang mereka duga didesain pihak tertentu yang dikategorikan sebagai bagian sentuhan tangan intelijen (siluman). Yusuf Supendi, salah seorang pendiri Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan beberapa elit PKS menggelapkan uang puluhan milyar rupiah. Juga beredar berita keterlibatan kader PKS dalam skandal impor daging.

Di tengah kegaduhan itu, Wapres Boediono melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia. Di saat kunjungan Wapres itu, Jumat, 11 Maret 2011, dua koran kenamaan Australia The Age dan Sydney Morning Herald merilis bocoran Wikileaks atas dokumen-dokumen rahasia Kedubes AS di Jakarta. Presiden SBY dituding melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. The Age memberi judul berita utamanya "Yudhoyono 'Abused Power'". The Age juga menampilkan ulasan yang bersumber dari bocoran WikiLeaks pada rubrik Focus di halaman 17 dengan judul "Bambang thank-you ma'am". Sedangkan Sydney Morning Herald mengangkat judul "Corruption Allegations Against Yudhoyono."

Selain Presiden SBY, kedua koran itu juga menyebut sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi Indonesia ikut terlibat penyalahgunaan kekuasaan. Di antaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Berita di kedua Koran Australia yang bersumber dari WikiLeaks atas bocoran kawat-kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta yang dikirim antara 2004 - 2010, itu mengandung berbagai tuduhan mengejutkan, tapi belum diverifikasi. Dalam



Dubes AS Scot Marciel: Belum terbukti kebenarannya.



Presiden: Indonesia tidak perlu larut dalam kegaduhan.

hak jawab pemerintah Indonesia yang diterbitkan *The Age* Sabtu (12/3/2011) bertajuk *Rejects Corruption Claim*, ditegaskan bahwa pemberitaan tersebut sebagai ulasan palsu, penuh kebohongan. *The Age* dan *Sydney Morning Herald* telah melanggar 'kode etik jurnalisme universal' dengan menerbitkan rincian dari kabel diplomatik tanpa meminta klarifikasi terlebih dulu (*cover both sides*).

"Kadar (konten) berita itu penuh sensasi dan menghina, semuanya omong kosong," sanggah pemerintah dalam hak jawab di *The Age* dan *Sydney Morning Herald* itu. Dijelaskan pula bahwa Indonesia menuntut dan telah menerima ungkapan penyesalan dari Duta Besar AS di Jakarta (11/3/2011) seiring pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyanggah tuduhan dari kawat diplomatik AS bahwa dirinya dan keluarga terlibat dalam korupsi.

Pada konferensi pers, Dubes AS Scot Marciel di Jakarta (11/3/2011) mengatakan penyesalan terdalam kepada Presiden Yudhoyono dan pada warga Indonesia atas pemberitaan *The Age* dan *Sydney Morning Herald* itu. Scot Marciel menegaskan bahwa penerbitan dari kawat-kawat diplomatik sangat tidak bertanggung jawab. Secara umum, kata Marciel, kawat-kawat seperti itu mengandung informasi yang apa adanya dan sering kali masih mentah yang juga kerap tidak lengkap dan belum terbukti kebenarannya.

Sayangnya, setelah menyampaikan pernyataan itu, Marciel tiba-tiba tanpa sungkan (kurang sopan) pergi begitu saja meninggalkan Menlu RI Marty Natalegawa yang masih menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers itu. Tak terbayangkan bilamana Dubes RI di Washington melakukan hal sama kepada Menlu AS.

Lalu, di tengah munculnya berbagai tanggapan atas bocoran WikiLeaks itu, tiba-tiba muncul paket bom buku. Pertama kali paket bom buku itu ditujukan kepada salah satu aktivis Komunitas Utan Kayu dan Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Absar Abdalla, yang belakangan masuk pengurus pusat Partai Demokrat dan sangat kencang menyuarakan perlunya reshuffle kabinet. Bom buku itu meledak dan melukai tiga orang, Selasa 15 Maret 2011, akibat salah prosedur penjinakannya. Disusul paket bom lainnya di beberapa tempat. Polisi memperkirakan ada ratusan paket sehingga warga masyarakat dihimbau untuk waspada. Lagi-lagi, paket bom buku ini diduga sebagai pengalihan perhatian. Kemungkinan keterlibatan intelijen pun diperbincangkan.

Sehari sebelumnya, Senin (14/3/2011),

Presiden SBY saat membuka rapat kabinet terbatas, di Istana Bogor menyatakan, Indonesia tidak perlu larut dalam kegaduhan yang ditimbulkan akibat pemberitaan dua media di Australia, *The Age* dan *The Sydney Morning Herald*, tentang dirinya dan sejumlah tokoh nasional.

Presiden pun mengucapkan terima kasih atas beberapa komentar dari para menteri dan staf khususnya. "Tetapi saya pandang sudah cukup. Tidak perlu kita terus-menerus ikut dalam kegaduhan soal ini karena banyak yang lebih penting yang harus kita lakukan," kata Presiden.

Presiden juga menyatakan dia tidak ingin terlalu reaktif dan emosional. "Saudara tahu kebiasaan saya. Setelah semuanya bisa dinalar dengan baik dan jernih, tentu dengan tetap menjalankan tugas saya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, saya akan menggunakan hak saya untuk mendapatkan keadilan dengan cara-cara demokratis," katanya.

Presiden menyatakan akan menyelesaikan persoalan itu dengan baik, tetapi tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya dan mengutamakan situasi dalam negeri. "Percayalah, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Saya, insya Allah, akan tetap menjaga integritas karena itulah tugas saya sebagai pemimpin di negeri ini," ujarnya.

Menurut Presiden SBY, nanti publik akan tahu siapa sesungguhnya yang demokratis dan siapa yang tidak, yang main lapor, main tuduh, main hakim di dalam media massa, di dalam diplomasi yang sungguh merugikan nama baik seseorang, yang boleh disebut sebagai *character assassination*. Presiden memperlihatkan kebiasaan kesabarannya, yang melegakan.

■ **BI/Ch. Robin Simanullang**



PRESIDEN SBY: Koran *The Age* dan *Sydney Morning Herald* sensasi dan omong kosong.



Minister won Barangaroo case only because he changed rules: judge
The timing of the amendment, almost two weeks after the conclusion of the hearing, has not been explained. Justice Peter Beson...

Gillard in open conflict with Rudd
Foreign Minister pulled in line on Libya
USA, GILBERT has split with...

Corruption allegations against Yudhoyono
WikiLeaks exclusive
Philip Dorling
The US State Department...



Daniel Sparigga

serius atas penyalahgunaan wewenang oleh Presiden SBY dan Ibu Negara Kristiani Herawati.

Dipaparkan, ketika SBY secara mengemukakan memenangkan Pilpres 2004, Amerika Serikat menyambutnya dengan menyatakannya sebagai kemenangan yang mengagumkan dari seorang figur populer dan artikulatif atas rivalnya (incumbent) presiden Megawati yang memiliki kekuatan lebih besar dan dukungan dana melimpah serta jaringan luas. Tiga tahun kemudian, diplomat AS di Jakarta pun membanggakan pemerintahan SBY atas komitmennya untuk memberantas terorisme. Dilaporkan, SBY juga berhasil mendapatkan dukungan internasional atas upayanya untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan, melaksanakan reformasi ekonomi dan memberantas kelompok militan Islam yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah.

Berita Sensasi Koran Australia

Dua Koran ternama Australia The Age dan Sydney Morning Herald, menulis berita 'sensasi dan omong kosong' tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY. Berita itu bersumber dari WikiLeaks bocoran kabel diplomatik Kedubes AS di Jakarta.

The Age menemukannya sebagai berita utama dengan judul: 'Yudhoyono 'Abused Power''. Dilengkapi laporan pada Rubrik Focus di halaman 17 berjudul: 'Bambang thank-you ma'am. Sedangkan Sydney Morning Herald mengangkat judul Corruption Allegations Against Yudhoyono.

terbukti kebenarannya, apalagi tanpa konfirmasi, check and recheck, lebih dahulu (cover both side). Sehingga Pemerintah RI dalam hak jawabnya yang diterbitkan The Age (Sabtu, 12 Maret 2011) menyebut "kadar (konten) berita itu penuh sensasi dan menghina, semuanya omong kosong."

Berita itu diangkat bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Canberra, Jumat, 11 Maret 2011, untuk bertemu dengan Perdana Menteri Wayne Swan dan sejumlah pejabat lainnya membahas perubahan administratif untuk mereformasi birokrasi Indonesia yang korup.

Berita 'sensasi dan omong kosong' kedua koran tersebut memaparkan kabel diplomatik rahasia AS yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merusak reputasi internasionalnya sebagai sosok reformis dan politikus bersih.

Kedua koran tersebut menerbitkan berita 'miring' tersebut, bersumber bocoran WikiLeaks atas dokumen-dokumen rahasia Kedubes AS di Jakarta berupa informasi yang sering kali masih mentah yang juga kerap tidak lengkap dan belum

Dalam ulasannya, di Rubrik Focus (oleh Phillip Dorling), dengan judul Bambang thank-you ma'am, The Age memaparkan 'berita sensasi dan omong kosong' tentang penyuaipan, korupsi dan memperkaya diri sendiri. Disebut, kawat rahasia Amerika Serikat itu telah mengungkap tuduhan

foto-foto: repro



Taufik Kiemas tidak tahu apa-apa

besar-besaran selama pemerintahan isterinya.

Taufik dituduh, meskipun tidak pernah diadili, atas dugaan korupsi pada proyek infrastruktur besar yang dikerjakan tidak sesuai aturan. Taufik disebutkan diuntungkan dari kesepakatan-kesepakatan proyek JORR senilai US\$2,3 miliar, proyek rel ganda Merak-Banyuwangi senilai US\$2,4 miliar, proyek trans Kalimantan senilai US\$2,3 miliar, dan trans Papua senilai US\$1,7 miliar.

Pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta (ketika itu duta besarnya B Lynn Pascoe), melaporkan bahwa salah seorang informan politik pentingnya, TB Silalahi, penasihat senior Presiden SBY, telah menginformasikan bahwa Asisten Jaksa Agung (Jampidsus) Hendarman Supandji, telah mengumpulkan bukti-bukti korupsi yang cukup untuk menangkap Taufik Kiemas. Namun TB Silalahi, seorang penasihat terdekat SBY, membeberkan bahwa Presiden secara pribadi telah menginstruksikan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik Kiemas.

Sehingga tidak ada tindakan hukum yang dikenakan pada Taufik Kiemas, tokoh politik berpengaruh yang sekarang menjabat sebagai Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), lembaga negara yang anggotanya termasuk anggota DPR.

Sementara SBY melindungi Taufik dari kejaksaan, wakilnya (Wapres) Jusuf Kalla, dituduh mengeluarkan apa yg disebut Kedubes AS sebagai 'penyuapan besar-besaran' untuk memenangkan kursi Ketua Umum Partai Golkar, partai politik terbesar di Indonesia, pada kongres tahun 2004, dalam hal ini diplomat AS menyaksikannya langsung.

Laporan Kedubes AS menyebut, menurut beberapa sumber yang dekat dengan kandidat unggulan, tim sukses Kalla menawarkan pengurus cabang paling tidak Rp200 juta untuk memilihnya. Disebut, pimpinan wilayah provinsi, yang memiliki hak suara yang sama tapi juga bisa memengaruhi pengurus cabang di



Presiden SBY berjabat tangan dengan salah satu penasihat terdekatnya, TB Silalahi

bawahnya, menerima Rp500 juta atau lebih. Disebut, delegasi menerima uang muka lebih dahulu dan akan menerima pembayaran penuh setelah kandidat berhasil memenangkan pemungutan suara dan dibayarkan tunai dalam hitungan jam setelah voting.

Diplomat AS melaporkan bahwa dengan memerlukan 243 suara untuk menang secara mayoritas, calon Ketua Umum Golkar harus menyediakan dana sebesar lebih dari US\$6 juta. Bahkan dilaporkan, seorang sumber mengklaim bahwa Ketua DPR Agung Laksono pun mengalokasikan (jika tidak dikeluarkan) Rp50 miliar (lebih dari US\$5,5 juta) pada kongres tersebut.

Kawat Kedubes AS juga menuduh Sudi Silalahi, Seskab SBY, mengintimidasi hakim pada kasus sengketa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun 2006, partainya mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut sumber Kedubes AS, kepada hakim, Sudi mengatakan jika pengadilan membantu (Wahid), sama saja dengan membantu menyerang pemerintah.

Intervensi dari tangan kanan SBY itu, dianggap gagal, karena menurut sumber-sumber Kedubes AS yang dekat dengan PKB dan pengacara yang terlibat pada kasus tersebut, pendukung Gus Dur membayar jaksa sebesar Rp3 miliar (sekitar US\$322 ribu) untuk menyuap agar keputusan hakim memenangkan PKB Gus Dur. Namun, disebutkan, di luar kegagalan tersebut, secara strategis tujuan SBY telah tercapai, karena berhasil menjadi tekanan eksternal pada posisi Gus Dur sehingga mampu memaksa PKB untuk mendukung pemerintahannya.

Laporan Kedubes AS juga mengindikasikan bahwa SBY menggunakan BIN untuk memata-matai baik kawan maupun lawan politiknya. Bahkan disebut, SBY

secara pribadi berhubungan langsung dengan Ketua BIN Syamsir Siregar untuk menginstruksikan anak buahnya melakukan pengawasan terhadap salah satu menteri kabinet paling senior, yaitu Sekretaris Negara, Yusril Mahendra, ketika dia pergi berlibur ke Singapura untuk bertemu dengan rekan bisnis dari China.

SBY juga dilaporkan memerintahkan BIN memata-matai bakal calon presiden lainnya. Disebutkan, praktek itu telah dimulai sejak SBY bertugas sebagai Menko Polkam pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Dia memerintahkan intelijen untuk melaporkan hal-hal berkenaan dengan Panglima TNI dan calon presiden dari Golkar yaitu Wiranto. Bahkan, pada sebuah rapat kabinet, Ketua BIN Syamsir Siregar pernah menyebut Wiranto sebagai dalang teroris.

Berdasarkan informasi dari orang-orangnya sendiri, Wiranto mengetahui bahwa dia menjadi objek pelecehan dalam laporan BIN. Namun ketika Wiranto mengeluhkannya, TB Silalahi memberitahu bahwa laporan tersebut tidak ada.

Dalam bagian lain laporan diplomat AS disebutkan bahwa Penasihat Presiden, TB Silalahi mengatakan kepada diplomat AS bahwa SBY berbagi informasi sensitif dengan BIN, dirinya dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Kedutaan Besar AS di Jakarta melaporkan bahwa satu dari informan politik yang paling berpengaruh adalah penasihat presiden, TB Silalahi.

Laporan politik Kedubes AS yang sebagian besar bersifat rahasia itu menjelaskan meluasnya pengaruh politik uang di sekitar SBY, meskipun Presiden sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Walaupun laporan diplomatik AS, yang dimiliki Wikileaks dan diserahkan secara eksklusif kepada The Age dan *Sydney Morning Herald*, tidak memperlihatkan



Agung Laksono sumber informasi

secara jelas keterlibatan SBY dalam kasus korupsi. Tetapi, diplomat AS melaporkan bahwa pada tahun 2006, ketika bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, SBY hingga saat itu menyesali kegagalannya membangun bisnis untuk dirinya sendiri, dan tampaknya merasa perlu mengējarnya dan menginginkan warisan yang cukup untuk anak-anaknya.

Diplomat AS mencatat adanya hubungan antara SBY dan Tomy Winata, yang diduga menjadi anggota sindikat judi terkemuka yaitu 'geng 9' atau 'sembilan naga'. Diungkapkan, pada 2006, Agung Laksono, yang sekarang menjabat Menko Kesra, mengatakan pada pegawai Kedubes AS bahwa TB Silalahi berperan sebagai perantara, yang membawa dana dari Tomy Winata ke SBY, agar presiden tidak berhubungan langsung dengan Tomy Winata.

Tomy Winata juga dilaporkan menggunakan jasa Mohamad Luthfi sebagai saluran dana ke SBY. SBY menunjuk Luthfi sebagai Kepala BKPM. Begitu pula intel senior Yahya Asagaf juga memberitahu Kedubes AS bahwa Tomy Winata mencoba membangun pengaruhnya dengan memanfaatkan ajudan presiden untuk mendekati Ibu Negara Kristiani Herawati.

Laporan diplomat AS itu juga menekankan upaya keluarga presiden, khususnya Ibu Negara Kristiani Herawati, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politiknya. Awal 2006, Kedubes AS mengomentari bahwa Kristiani semakin berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator untuk usaha bisnis. Banyak sumber juga mengatakan bahwa keluarga Kristiani membangun perusahaan secara komersial.

Pada Juni 2006, salah seorang staf presiden memberitahu staf Kedubes AS bahwa anggota keluarga Kristiani sangat menginginkan keuntungan finansial dari

badan-badan usaha milik negara. Keinginan ini dilaksanakan dengan sangat rapi, dimana pelaksana utamanya adalah staf-staf terdekat (seperti Sudi Silalahi), sementara SBY tetap menjaga jarak hingga tidak terkena akibatnya.

Kedubes AS juga menggambarkan bagaimana kuatnya pengaruh Kristiani di balik layar sebagai anggota kabinet nomor satu dan penasehat utama Presiden yang tidak bisa dibantah. Tentang peran Ibu Negara ini, Kedubes juga melaporkan, penasehat presiden TB Silalahi mengatakan pada (staf kedubes AS) bahwa staf presiden mulai merasa terpinggirkan dan tidak punya kekuatan untuk memberikan konsultasi pada Presiden. Anggota BIN Yahya Asagaf secara pribadi mengatakan pendapat ibu negara menjadi satu-satunya hal penting.

Sejalan dengan itu, diplomat AS juga mengindikasikan peran utama Kristiani yang mendorong SBY mengambil keputusan untuk tidak menjadikan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pasangannya dalam Pilpres 2009.

Bersama mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, SBY meraih kemenangan sebagai presiden periode 2009-2014. SBY berhasil meraup 60% suara, mengalahkan mantan Presiden Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan Wapres Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto.

Pada Januari 2010, Kedubes AS mengamati: Sepuluh tahun reformasi politik dan ekonomi telah menjadikan Indonesia demokratis, stabil dan semakin percaya diri sebagai pemimpin negara-negara Asia Tenggara dan dunia Islam. Indonesia telah menjalankan pemilu dengan sukses, bebas dan adil; mengatasi krisis keuangan global; dan menangani ancaman keamanan internal.

Akan tetapi, dalam catatan diplomat AS,

serangkaian skandal politik yang terjadi sejak akhir 2009 hingga 2010, sangat merusak posisi politik SBY. Pertentangan antara Kepolisian RI dan KPK telah merusak citra pemberantasan korupsi di Indonesia, ditambah lagi dengan pertanyaan (Hak Angket) DPR seputar kasus Bank Century yang mengaitkannya dengan kinerja Wapres Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI.

Dilaporkan pula, salah satu LSM anti-korupsi yang cukup berpengaruh, kepada Kedubes AS mengatakan, bahwa berdasarkan sumber yang bisa dipercaya, dana dari Bank Century telah digunakan untuk membiayai kampanye Pemilu SBY.

Disebutkan pula, mantan Wapres Jusuf Kalla, sangat tidak setuju dengan *bailout* tersebut dan menuding Bank Indonesia yang saat itu dipimpin Boediono, telah gagal melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank Century. Menurut Kalla, Bank Century seharusnya ditutup karena dianggap gagal mengelola dananya. Kegagalan tersebut diakibatkan oleh kecurangan pemegang saham besar.

Menurut Kedubes AS, latar belakang ini yang menjadikan SBY semakin 'lumpuh', dimana popularitas politiknya menurun drastis. Bahkan, SBY dianggap memperlambat proses reformasi karena enggan untuk mengambil risiko berseberangan dengan DPR, media, birokrasi dan masyarakat sipil. Dia juga enggan untuk menerebos peraturan-peraturan sebelum dia merasa posisinya kuat, SBY tidak akan melepas modal politiknya untuk menjalankan agenda reformasi.

Dilaporkan, selama tiga belas tahun terakhir demokrasi di Indonesia semakin kokoh. Kediktatoran Soeharto telah digantikan oleh sistem politik yang kompetitif yang tercermin dari perdebatan yang sengit dan kebebasan pers. Akan tetapi, di balik kesuksesan pemerintahan SBY, sebagian kebiasaan buruk dan korup era Soeharto masih mewarnai politik kepresidenan di Indonesia. Demikian 'berita sensasi dan omong kosong' dua koran Australia. ■ BI/CRS

Sensasi Omong Kosong

Pemerintah Indonesia menggunakan hak jawab atas berita headline Koran Australia *The Age* berjudul *Yudhoyono Abuse Power*. Hak jawab itu diterbitkan *The Age* Sabtu (12/3/2011) dengan judul *Rejects Corruption Claim*. Pemerintah RI membantah pemberitaan tersebut dengan menyebut kadar (konten) berita itu penuh sensasi dan menghina, semuanya omong kosong.

Dalam bantahan (hak jawab) tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menuntut dan menerima ungkapan penyesalan dari Duta Besar AS di Jakarta (11/3) seiring pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyanggah tuduhan dari kawat diplomatik AS bahwa dirinya dan keluarga terlibat dalam korupsi.

Dubes AS Scot Marciel secara resmi menyatakan penyesalan. Dalam konferensi pers Scot Marciel mengatakan kami mengungkapkan penyesalan terdalem kepada Presiden Yudhoyono dan pada warga Indonesia atas penerbitan dari kawat-kawat diplomatik yang sangat tidak bertanggung jawab.

Marciel mengatakan, secara umum, kawat-kawat seperti itu mengandung informasi yang apa adanya dan sering kali masih mentah' yang juga 'kerap tidak lengkap dan belum terbukti kebenarannya.

Presiden SBY mengatakan media itu telah melanggar kode etik jurnalisisme universal, dengan menerbitkan rincian data dari Wikileaks tanpa meminta konfirmasi kepadanya. "Presiden sama sekali tidak senang dengan ulasan palsu, penuh kebohongan, yang dimuat dalam *The Sydney Morning Herald* dan *The Age*," tulis *The Age* berdasarkan pernyataan yang dikirim atas nama Presiden SBY, oleh staf khusus, Daniel Sparingga. "Kadar (konten) berita itu penuh sensasi dan menghina (tidak menghormati), semuanya omong kosong," katanya.

Menurut Daniel Sparingga kepada pers di Indonesia, pemberitaan itu penuh sensasi dan seronok yang menjadikan bualan sebagai pemberitaan. "Kami sangat menyesalkan kecerobohan *The Age* dan menganggapnya sebagai skandal pemberitaan yang memalukan karena

memuat berita dengan sumber yang tidak bisa divalidasi," katanya. Dia menjelaskan, koran terbitan Australia itu mencoba berlandung di balik sifat kerahasiaan yang sesungguhnya kontroversial. "Kami prihatin tetapi juga gusar oleh sikap *The Age* yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik universal," tegas Daniel.

Terkait dengan pemberitaan itu, kata Daniel, Istana Presiden akan melakukan semua langkah yang perlu untuk meluruskan kembali semua yang dijangkirbalikkan oleh pemberitaan tersebut. Termasuk klarifikasi dari kedubes AS di Jakarta. Menurut Daniel, Presiden SBY juga meminta TB Silalahi, segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait posisinya dengan pemberitaan di koran Australia itu.

Atas kesediaan *The Age* dan *Sydney Morning Herald* memuat hak jawab tersebut, meski hak jawab itu hanya dimuat di halaman 16, Presiden SBY mengapresiasi dan menghargainya sebagai komitmen media itu memberikan kesempatan untuk memperbaiki informasi yang tidak benar. Juga sebagai bentuk penegakan prinsip *cover both side* dalam jurnalistik. "Ini sebagai penjelasan kepada publik atas berita dengan rujukan Wikileaks yang tidak akurat," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada pers. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi sikap pemerintah Amerika Serikat melalui kedutaannya yang memberikan penjelasan soal kawat diplomatik yang secara mentah diambil Wikileaks.

Beberapa menteri, pejabat dan staf khusus presiden serta elit Partai Demokrat juga dengan tegas membantah tuduhan omong kosong itu. Hanya beberapa saat setelah berita *The Age* dan *Sydney Morning Herald*, para elit Partai Demokrat segera menyerukan agar Kedutaan Amerika Serikat bisa secepatnya memberikan klarifikasi. "Demokrat berharap



Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha

Kedubes AS bisa secepatnya klarifikasi. Itu semua berita bohong," tegas Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa dalam diskusi Polemik Trijaya di Kafe Warung Daun, Sabtu (12/3/2011).

Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah Jumat (11/03/2011) mengatakan pemberitaan tersebut bersifat gosip semata. Berupa informasi yang tidak memiliki kredibilitas.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden sangat terkejut atas pemberitaan media di Australia itu. Dia mengatakan artikel yang ditulis kedua koran tersebut sangat tidak akurat. Menurut Julian, tidak hanya SBY dan Bu Ani yang terkejut membaca berita tersebut, tetapi sejumlah nama yang disebutkan dalam artikel tersebut diyakini juga akan memiliki keterkejutan yang sama.

Julian Pasha Minggu (13/3/2011) malam kembali menegaskan meski sangat dirugikan dengan pemberitaan *The Age* dan *Sydney Morning Herald* yang merilis bocoran Wikileaks, Presiden Susilo SBY berusaha untuk berjiwa besar. "Beliau tetap dirugikan, tapi apa boleh buat telanjur sudah dipublikasikan. Tapi beliau berjiwa besar tentang hal itu," kata Julian Aldrin Pasha. Julian juga mengatakan bahwa Pemerintahan Amerika Serikat sangat meminta maaf dan sangat menyesal paling dalam tentang pemberitaan tersebut.

Kendati kemudian Selasa (15/3), Julian Aldrin Pasha, menegaskan, Presiden SBY tidak akan menggugat kedua koran Aus-



Mensesneg Sudi Silalahi



Mantan Wapres Jusuf Kalla

tralia itu. Sebab, bagi Presiden, masih ada banyak pekerjaan besar lain yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengungkapkan, sesuai pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, kawat diplomatik yang dibocorkan laman Wikileaks itu adalah penilaian pribadi dari diplomat AS di Indonesia. Karena itu, menurut Anas, perlu ada evaluasi dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sendiri tentang kualitas dan akurasi kawat diplomatiknya.

Menurut Anas, bocoran kawat diplomatik itu hanya sebuah sensasi dan gosip belaka. "Obrolan warung yang tidak berbasis data, tidak berbasis fakta," kata Anas. Anas menjelaskan, banyak diplomat melakukan wawancara kepada tokoh dan orang Indonesia untuk mendapatkan informasi. Hasil wawancara itu, tidak disertai dengan data. Hasil pembicaraan yang tidak berbasis data itulah yang dijadikan dasar bagi diplomat.

Mestinya, menurut Anas, kawat diplomatik itu diverifikasi dulu berdasarkan data-data. Maka, Anas menyarankan supaya pemerintah Amerika Serikat mengevaluasi kualitas dan akurasi kawat diplomatiknya. "Jangan sampai kawat diplomatik itu turun nilainya menjadi kawat gosip. Sebab jika menjadi gosip, tentu akan menyebabkan dampak negatif pada hubungan antarnegara," kata Anas di Jakarta, Minggu 13 Maret 2011.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mu-



Menkominfo Tifatul Sembiring



Anas Urbaningrum: Sensasi dan gosip

barok, mengatakan informasi yang dibocorkan Wikileaks kualitasnya tak jauh beda dengan informasi yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera). "Hanya cari sensasi saja tak bisa dibuktikan kebenarannya," kata Mubarak. Bendera pernah membuat sensasi dengan menuduh beberapa pejabat pendukung SBY-Boediono pada Pilpres 2009, telah menerima milyaran rupiah dari aliran dana talangan Bank Century. Dua aktivis Bendera, Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun, kini tengah diadili atas perkara pencemaran nama baik.

Mubarak menyerukan agar tidak menanggapi pemberitaan di dua harian di Australia itu dengan serius. "Saya katakan itu sampah. Kita senang banget konsumsi

sampah," ucap Ahmad Mubarak, saat diskusi di Jakarta, Minggu (13/3/2011).

Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR dari PDIP, mempertanyakan tindakan dua media Australia itu yang menerbitkan tanpa ada bukti. Pertanyaan itu dilontarkannya mengingat sejarah berdirinya dua media itu yakni The Sydney Morning Herald berdiri tahun 1831 dan The Age tahun 1854. Oplahnya pun besar, yang satu 750 ribu eksemplar, yang satu lagi 600 ribu eksemplar. "Tapi kok dengan mudah buat spekulasi," katanya.

Menkominfo Tifatul Sembiring pun mengimbau semua pihak agar tidak memperpanjang polemik seputar berita bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang dimuat di harian

Sydney Morning Herald dan The Age edisi 11 Maret 2011. Sebab, menurut Tifatul, Senin (14/3/2011), kebenaran berita tersebut tidak bisa dipegang, dari segi ilmiahnya tidak bisa dijadikan data. Apalagi sampai diangkat derajatnya menjadi informasi.

Sementara itu, kendati Presiden SBY sudah menyatakan tidak akan menggugat kedua koran Australia terkait pemberitaan itu, empat warga negara Indonesia, Selasa (15/3/2011), mengajukan gugatan kepada The Age (tergugat I), The Sydney Morning Herald (tergugat II), dan Pemerintah AS (tergugat III). Dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, penggugat meminta ganti rugi satu miliar dollar AS dan Rp 2 juta secara tanggung renteng. Keempat penggugat ialah Suparto (sopir), Tri Sasano dan Sunardi (pegawai PT Pos Indonesia), dan Surono. Kedua media itu dinilai telah melanggar asas *cover both sides* atau pemberitaan berimbang. Mereka diwakili kuasa hukumnya, Habi-burokhan, dari Serikat Pengacara Rakyat.

TB Silalahi Menjawab

Presiden SBY meminta Tiopan Bernhard Silalahi (TB Silalahi), yang dalam laporan diplomatik AS yang bocor ke Wikileaks dan diberitakan dua koran Australia sebagai seorang 'sumber informasi intelijen terpercaya' bagi Kedubes AS, segera mengklarifikasi posisinya. TB Silalahi pun akhirnya angkat bicara.

Dalam laporan diplomatik (intelijen) Kedubes AS pada Desember 2004, disebutkan berdasar informasi yang diterima dari TB Silalahi bahwa Presiden SBY memerintahkan Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, yang kini menjabat Ketua MPR yang juga suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. TB Silalahi juga disebut berperan membawa Tomy Winata masuk dalam lingkaran pendanaan bagi kepentingan SBY.

Atas tuduhan itu, TB Silalahi mengatakan bahwa data itu ngawur, itu sampah. Dia menjelaskan ketika itu dirinya menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang pertahanan (bukan bidang hukum, red). Menurutnya, Kedutaan Besar AS mendapat informasi yang salah pada Desember 2004. Dimana informasi itu menyatakan perkara yang diduga melibatkan Taufik Kiemas telah dinyatakan lengkap dan akan diajukan ke pengadilan. Padahal, jelas TB Silalahi, ketika itu Megawati sudah lengser dan Yudhoyono baru dua bulan menjabat sebagai presiden.

Maka, jika disebutkan Presiden SBY



Anggota DPR RI Gayus Lumbuun

menginstruksikan penghentian penyidikan kasus yang diduga melibatkan Taufik Kiemas, hal itu menjadi tidak masuk akal. "Masa ada kasus selesai dua bulan. Dari logika, mana ada cerita seperti itu," kata Silalahi.

Menurutnya, kasus korupsi yang diduga melibatkan Taufik Kiemas seperti disebutkan dua harian Australia itu pun sebenarnya tidak ada. Sehingga, kata Silalahi, buat apa Presiden Yudhoyono memerintahkan penghentian kasus yang sebenarnya tidak ada. "Beliau (SBY) pun nggak tahu. Perkaranya sendiri tidak ada. Tidak pernah ada Taufik Kiemas dapat masalah pada Desember 2004," paparnya.

Selain itu, kata Silalahi, pada dua bulan awal menjabat sebagai presiden, perhatian Yudhoyono baru sebatas pada hal-hal umum tentang pembangunan nasional, bukan pada kasus-kasus khusus. Apalagi, ketika Desember 2004, Aceh dilanda gempa bumi dan tsunami dahsyat, sehingga perhatian Yudhoyono terpusat ke sana.

Silalahi juga menjelaskan kejanggalan dari isi berita itu, yakni soal Hendarman Supandji yang pada Desember 2004 disebutkan sudah menjabat sebagai Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). "Informasi ini, sangat tidak akurat," kata TB Silalahi. Sebab, Hendarman baru diangkat sebagai Jampidsus pada Mei 2005. Maka dia menyebut datanya ngawur. TB Silalahi pun mempertanyakan apakah sebodoh itu Kedubes AS mengumpulkan informasi dan membuat laporan?

Taufik Kiemas Tidak Tahu

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas enggan menanggapi pemberitaan dua media Australia itu. Dia mengaku tidak tahu apa-apa soal tuduhan korupsi yang disangkutkan pada dirinya itu. "Kan saya bilang saya



Teuku Faizasyah

tidak tahu apa-apa," katanya di Jakarta, Minggu, 13 Maret 2011. Taufiq Kiemas pun menyerahkan persoalan tuduhan kasus korupsi itu kepada fungsionaris PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dan Trimedy Pandjaitan.

The Age dan The Sydney Morning Herald, berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Wikileaks menulis dugaan korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas terkait proyek infrastruktur. Hal mana Kiemas diyakini telah diuntungkan dari sejumlah proyek seperti Jakarta Outer Ring Road senilai US\$2,3 miliar, jalur kereta api *double track* dari Merak - Banyuwangi senilai US\$2,4 miliar, jalan trans-Kalimantan senilai US\$2,3 miliar, dan jalan trans-Papua senilai US\$1,7 miliar.

Disebut, pada tahun 2004, Presiden SBY ikut campur dalam menghentikan penanganan sebuah kasus hukum yang melibatkan Taufik Kiemas. Menurut anggota DPR dari PDI Perjuangan Gayus Lumbuun The Age dan The Sydney Morning Herald tidak berimbang, karena tidak meminta konfirmasi kepada pihak yang diberitakan, tanpa *cover both sides*.

Kejaksaan Agung pun membantah tuduhan adanya intervensi Presiden SBY terhadap penanganan kasus yang menyebut nama Ketua MPR Taufiq Kiemas. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, M. Amari mengatakan, tidak terdapat catatan di Kejaksaan Agung yang menyatakan Ketua MPR Taufik Kiemas sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi. "Setahu saya di Kejaksaan Agung tidak ada kasusnya TK. Ya, nanti saya review-lah," ungkap Amari di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/3/2011) usai menerima perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kejaksaan Agung pun proaktif memeriksa berkas perkara yang mungkin terkait dengan TK. Faried Harianto Kepala



Tommy Winata: Berita itu tidak benar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dipanggil ke Jakarta untuk meneliti kembali berkas perkara yang pernah ditanganinya 12 tahun silam. Faried Harianto adalah jaksa penyidik dan penuntut umum perkara korupsi proyek Jakarta Outer Ring Road. Dia ditugaskan meneliti ulang dokumen dan berkas perkara itu.

Perkara korupsi yang semula diduga merugikan negara Rp 1 triliun itu disidik sejak awal 1999. Dua proyek jalan tol itu dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada dan PT Marga Nurindo Bhakti. Kala itu, Djoko, Tjokorda Raka Sukawati (mantan Direktur Utama PT Hutama Karya), dan Thamrin Tanjung (mantan Direktur Marga Nurindo) ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dituduh salah menggunakan dana hasil penerbitan surat utang senilai Rp 1,048 triliun plus US\$ 471 juta. Namun, Djoko akhirnya bebas karena Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan. Tjokorda dihukum satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Thamrin dipenjara dua tahun.

Faried pun kembali membuka seluruh dokumen perkara. Semua keterangan tersangka dan saksi dibaca ulang. Tapi tidak ada saksi atau tersangka yang menyebut nama Taufiq Kiemas. Demikian pula Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendy juga proaktif membuka lagi dokumen register perkara yang pernah masuk Kejaksaan Agung. "Tapi tidak ditemukan perkara yang menyangkut nama Pak Taufiq," katanya. (Majalah Tempo, 21 Maret 2011).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mendesak pihak Kementerian Luar Negeri segera mengejar informasi langsung dan meminta klarifikasi dari "Wikileaks" mengenai kebenaran dan motivasi membocorkan nota diplomatik yang isinya memojokkan Presiden dan Ketua MPR RI itu.

Tjahjo Kumolo yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, Sabtu 12 Maret 2011 mengatakan, walau bocoran media asing itu hanya ingin membuat keruh suasana di Indonesia dengan politik adu domba, tetap saja hal ini harus ada klarifikasi, langsung dari pihak pembocor itu sendiri.

Tjahjo Kumolo menambahkan agar kiranya Hendarman Supandji, mantan Jaksa Agung juga memberikan klarifikasi. "Karena ini terkait kelembagaan negara dan kepresidenan, walaupun berita tersebut katanya cuma isu," ujar Tjahjo.

Tomy Winata, Hak Jawab

Sementara pengusaha Tomy Winata, pengusaha yang disebut sebagai cukong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah mengirimkan hak jawab kepada dua harian Australia tersebut. Dalam hak jawabnya, Tomy menyatakan, berita mengenai dirinya itu adalah tidak benar, tendensius dan dapat berdampak buruk pada kinerja perusahaannya, yaitu Artha Graha. Tomy meminta dua harian itu meluruskan pemberitaannya.

"Hubungan kami dengan Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono sebatas hubungan antara anak bangsa yang loyal kepada pemimpinnya," tegas TW, panggilan akrabnya. Dia mengaku tidak pernah memberi uang atau apa pun dan lewat siapa pun yang ditujukan kepada Presiden Yudhoyono atau Ibu Ani.

Tomy mengakui, telah mengenal lama dan baik TB Silalahi. Bahkan, TB Silalahi disebutnya merupakan mentor dan guru pada awal pertumbuhan Artha Graha Network. "Namun, tuduhan bahwa beliau sebagai jembatan kami ke pusat pemerintahan, adalah tidak benar," ujar Tomy.

Dalam keterangan pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (13/3/2011) petang, Tomy Winata, bahkan mengaku rela menjilat sepatu kotor para wartawan. "Jadi, andaikata saya ini harus jilat sepatu bapak-bapak (para wartawan) yang penuh dengan kotoran, harga diri saya itu tidak direndahkan oleh bapak-bapak. Demi 1 juta keluarga yang harus hidup bulan-bulan ke depan. Asal itu jangan jadi berita yang dipercaya," ungkap bos Artha Graha itu.

TW menegaskan, berita yang dilansir *The Age* dan *The Sydney Morning Herald* sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak benar. Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah menyampaikan penyesalan dan membantah berita itu.

Sudi Silalahi, MA Membantah

Terkait disebutkan nama Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Mahkamah Agung membantah informasi hakim menerima intimidasi dari Sudi Silalahi

saat menjabat Sekkab dalam kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti yang diberitakan harian Australia, *The Age* dan *Sidney Herald Morning* dengan sumber kawat diplomatik yang dibocorkan situs Wikileaks. Disebut bahwa SBY melalui Sudi Silalahi melakukan intimidasi pada hakim, dalam kasus sengketa kepemimpinan PKB 2006. Sudi meminta pada hakim untuk tidak memenangkan PKB Gus Dur.

Ketua MA Harifin Tumpa juga membantah adanya hakim menerima Rp.3 milyar terkait sengketa PKB itu. "Buktikanlah kalau itu benar. Mana buktinya. Kalau ada buktinya, serahkan ke KPK. Kalau memang ada, buktikan siapa yang menerima," kata Ketua MA Harifin Tumpa, di Gedung MA, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Harifin Tumpa mengatakan, pemberitaan kedua harian tersebut bisa menjadi masalah antarkedua negara. Oleh karena itu, katanya, kewenangan pemerintah yang harus menyelesaikan hal tersebut.

Jusuf Kalla Mengaku Itu Lazim

Berita koran Australia, *The Age* dan *Sidney Morning Herald*, yang sempat menggemparkan publik, lantaran selain menyebut penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY, juga menyebut mantan Wapres JK memberikan suap untuk merebut kursi Ketua Umum Golkar pada saat kongres Desember 2004.

Dalam laporan Diplomat AS yang dibocorkan Wikileaks, menyebutkan JK harus merogoh 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 52.785.000.000 untuk meraih 243 suara yang diperlukan. Disebutkan, berdasarkan berbagai sumber yang dekat dengan kandidat utama, tim Kalla menawarkan setiap pengurus daerah Rp 200 juta (lebih dari US\$ 22.000).

Jusuf Kalla membantah melakukan *money politic*. Kalla mengaku hanya memberikan pengganti akomodasi dan transportasi bagi peserta Golkar, bukannya melakukan *money politic* untuk menduduki kursi nomor satu di Partai Golkar.

"Dalam Kongres yang dihadiri 3.000 peserta perlu akomodasi dan transportasi. Apalagi menggunakan uang sendiri dan pendukung lainnya. Saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya yang menang (dalam Kongres) itu membantu peserta kongres untuk tiket pulang dan hotel dan itu kita bantu," jelas Jusuf Kalla kepada pers, Jumat (11/03/2011).

"Saya tanya kalau (peserta Kongres Golkar) hadir (mengikuti kongres) dan pulang (ke daerahnya) bagaimana untuk bayar tiket mereka. Di mana mereka menginap," katanya. Hal itu, menurutnya, lazim dilakukan ketua umum terpilih di Partai Golkar. Dan jumlahnya tidak sampai 6 milyar rupiah. ■ **BI**

Intelijen dan Fenomena Wikileaks



Pendiri dan juru bicara WikiLeaks Julian Paul Assange

Dunia intelijen dan diplomasi antarnegara mengalami tantangan dan perkembangan baru dengan kehadiran situs Wikileaks. Tak tanggung-tanggung, para diplomat dan intelijen AS pun dibuat kalang-kabut.

Pada Juli 2010, situs Wikileaks membuat sensasi yang menghebohkan para diplomat AS karena pembocoran dokumen Perang Afganistan. Kemudian, pada Oktober 2010, situs yang didirikan Julian Assange itu membocorkan hampir 400.000 dokumen Perang Irak. Lalu pada November 2010, WikiLeaks mulai merilis pula kabel-kabel diplomatik Amerika Serikat.

Wikileaks telah menjadi sebuah fenomena. Telah membuat dokumen intelijen dan diplomatik yang bersifat rahasia menjadi berita umum terbuka. Selain berdimensi negatif atas terbukanya suatu rahasia (sesuatu yang pantasnya dirahasiakan), juga berdimensi positif untuk mendorong perkembangan dunia intelijen dan diplomasi lebih bermartabat, beretiket dan menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kemanusiaan.

Orang pun bertanya, apa dan siapa itu Wikileaks yang bisa dengan mudah mengacak-acak dokumen rahasia negara adidaya tersebut? Wikileaks adalah sebuah organisasi internasional yang ber-

markas di Swedia. Wikipedia menulis bahwa organisasi ini didirikan oleh disiden politik Cina, dan juga jurnalis, matematikawan, dan teknolog dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia, dan Afrika Selatan. The New Yorker mendeskripsikan pendirinya, Julian Assange, seorang jurnalis dan aktivis internet Australia, sebagai direktur Wikileaks.

Situs Wikileaks yang menggunakan mesin MediaWiki itu menerbitkan dokumen-dokumen rahasia sambil menjaga kerahasiaan sumber-sumbernya. Situs tersebut diluncurkan pada tahun 2006. Saat ini alamat situs telah dialihkan ke www.wikileaks.ch untuk alasan keamanan.

Wikileaks telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk New Media Award dari majalah Economist tahun 2008. Pada bulan Juni 2009, Wikileaks dan Julian Assange memenangkan UK Media Award dari Amnesty International (kategori New Media) untuk publikasi tahun 2008 berjudul Kenya: *The Cry of Blood – Extra Judicial Killings and Disappearances*, sebuah laporan oleh Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia Kenya tentang pembunuhan oleh polisi di Kenya. Pada Mei 2010, New York Daily News menempatkan WikiLeaks pada peringkat pertama dalam "situs yang benar-benar bisa mengubah berita".

Pendiri dan juru bicara WikiLeaks Julian Paul Assange, seorang jurnalis asal Australia. Sebagian besar pendidikan Julian pada masa kecilnya dilakukan di rumah, arena orang tuanya menjalankan tur teater sehingga keluarganya hidup berpindah-pindah. Pada usia 14 tahun, Assange diketahui telah berpindah rumah sebanyak 37 kali.

Wikipedia mendeskripsikan bahwa pada usia 11 hingga 16 tahun, Assange hidup dalam pelarian karena hubungan ibunya dengan seorang musisi dipenuhi kekerasan. Pada usia 18 tahun, dia telah memiliki seorang anak. Dia berpisah dengan istrinya pada tahun 1991, setelah polisi menyerang dan membawa putra mereka. Hingga tahun 1999, dia melakukan gugatan atas pengaturan hak asuh anaknya. Lalu, bersama dengan ibunya, Assange membentuk suatu kelompok aktivis Penyelidikan Orang Tua terhadap Perlindungan Anak. Kegiatan kelompok ini berpusat pada pembuatan bank data yang berisi catatan hukum terkait dengan isu hak asuh anak di Australia.

Pada tahun 1991, ketika Assange berusia 20 tahun, dia dan beberapa teman yang berprofesi sebagai hacker (pengacak komputer) memecahkan dan memasuki jaringan terminal Nortel, perusahaan telekomunikasi Kanada. Akibatnya, dia ditangkap dan dinyatakan bersalah atas 25 dakwaan yang dikenakan padanya. Dia harus membayar denda sejumlah ribuan dolar kepada pemerintah Australia, namun dibebaskan dari hukuman penjara.

Assange diketahui pernah belajar di enam universitas. Dari tahun 2003-2006, dia memelajari fisika dan matematika di Universitas Melbourne. Selain itu, dia juga memelajari filsafat dan neurosains. Pada tahun 1990-an, Assange bekerja sebagai perancang program perangkat lunak yang mengatur keamanan komputer di Australia dan luar negeri. Tahun 1997, dia ikut menciptakan *Rubberhose deniable encryption*, suatu sistem kriptografi yang dibuat untuk pekerja hak asasi manusia

untuk melindungi data sensitif di lapangan dan dia juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan pembebasan perangkat lunak.

Tahun 2006, Assange memutuskan untuk mendirikan WikiLeaks. Hal ini dilakukannya karena dia yakin bahwa pertukaran informasi akan mengakhiri pemerintahan yang tidak sah. Situs tersebut memiliki server utama di Swedia dan menerbitkan berbagai bahan dari berbagai sumber. Terkadang, dia dan beberapa rekan di WikiLeaks menyusup ke dalam sistem keamanan untuk mencari dokumen dan kemudian memublikasikannya. WikiLeaks tidak menggaji Assange, namun dia memiliki investasi yang tidak diungkapkannya. Kini banyak polisi internasional bekerja sama untuk memburu Assange untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kebocoran informasi rahasia milik negara.

Kemudian, jaksa Swedia menjatuhkan tuduhan kepada Assange atas pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pemaksaan yang dilaporkan oleh dua wanita. Tuduhan tersebut diumumkan pada Agustus 2010, kemudian dibatalkan dan setelah itu diperbaharui kembali. Pada 24 November 2010, pengadilan Swedia menolak usaha banding Assange atas perintah penahanan yang dijatuhkan kepadanya. Kasus ini masih ditangani oleh Mahkamah Agung.

Julian Assange dan Wikileaks telah membuat para intelijen dan diplomat berbagai negara terperangah dan bahkan terbodoh. Bahkan para pemimpin AS dibuat terperangah dan marah. Kualitas kerahasiaan dokumen diplomatik AS pun kini diragukan. Tak terkecuali, para intelijen dan diplomat Indonesia pun terperangah dan tampak hipokrit dengan melecehkan Wikileaks.

Wikileaks: Rahasia Jadi Berita

Umumnya para diplomat dan intelijen menyalahkan Wikileaks karena membocorkan dokumen yang sesungguhnya bersifat rahasia. Wikileaks benar-benar mengejutkan dengan menjadikan sesuatu yang bersifat rahasia menjadi berita terbuka.

Amerika Serikat menjadi negara paling sibuk akibat kehadiran Wikileaks. Mengingat, kuat dugaan tujuan utama WikiLeaks adalah menghancurkan kredibilitas AS di mata dunia. Namun, AS yang telah diperdaya Wikileaks, bukan negara bodoh. Para diplomat dan intelijen negara adidaya yang sering memamerkan posisi sebagai polisi dunia, itu sudah terlatih memanfaatkan kelebihan dan kekurangan pihak lain (kawan atau lawan) demi kepentingannya.

Tak terkecuali kemungkinan memanfaatkan Wikileaks, yang sejauh ini secara terbuka melawan AS, justru telah dan



Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono

akan dimanfaatkan demi kepentingan (diplomasi dan intelijen) AS sendiri. Termasuk, patut dicurigai, pembocoran dokumen-dokumen diplomatik Kedubes AS di Jakarta. WikiLeaks mengatakan, ada 3.059 kawat dari Kedubes AS di Jakarta di tangan mereka.

Patut dicermati, kebocoran atau pembocoran dokumen-dokumen diplomatik Kedubes AS di Jakarta oleh Wikileaks yang sebagian telah diberikan secara khusus kepada dua koran Australia *The Age* dan *Sydney Morning Herald*, yang menuding Presiden SBY korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan, serta melibatkan beberapa nama tokoh nasional, tak terlepas dari kepentingan diplomasi AS dan mungkin Australia.

Sebagaimana dikemukakan Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Selasa, 15 Maret 2011 dalam ulasannya soal WikiLeaks dan SBY, pembocoran kawat Kedubes AS di Jakarta oleh dua media di Australia itu punya implikasi pada dua dimensi, yakni dimensi internasional dan dimensi nasional di Indone-

sia. Dalam dimensi internasional, pembocoran kawat Kedubes AS di Jakarta masih sesuai dengan tujuan utama WikiLeaks: menghancurkan kredibilitas AS di mata dunia. Dalam dimensi kedua yang tidak dialami oleh negara lain sebelum Indonesia, secara nasional penayangan kawat Kedubes AS berpotensi mengguncang stabilitas pemerintah dan tekad pemerintah memerangi korupsi. Walaupun Hikmahanto belum melihat kemungkinan justru AS yang memainkan peran.

Dalam mencermati fenomena WikiLeaks ini, pemerintah perlu lebih meningkatkan kemampuan para diplomat dan pejabatnya dalam menyaring informasi yang diberikan kepada para diplomat asing.

Sebagaimana dikemukakan Hikmahanto Juwana, mental pejabat dalam mengumbar informasi kepada diplomat asing harus diakhiri. Para pejabat harus paham, di mata para diplomat asing, informasi dari pejabat bernilai sangat tinggi dibandingkan dari aktivis, akademisi atau wartawan.

“Baik pejabat maupun politisi harus menghentikan penyampaian informasi kepada diplomat asing yang bertujuan politis. Tujuan politis dimaksud adalah meminjam tangan negara asing untuk melawan rival politiknya, bahkan melawan atasan pejabat yang menyampaikan informasi,” kata Hikmahanto.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di gedung DPR RI Senin (14/3/2011) mengingatkan pemerintah perlu mengambil langkah darurat untuk mencegah permainan intelijen. Karena itu, menurutnya, ruang-ruang rapat internal dan rahasia perlu disterilkan dari upaya penyadapan, terutama yang berkaitan dengan rahasia dalam negeri.

Menurut Tubagus Hasanuddin, dari berbagai macam kasus Wikileaks yang kemudian salah satunya tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin



PRESIDEN SBY: Peran aktor non-negara, seperti media, LSM dan yang lain semakin menguat sehingga memaksa pemerintah untuk mengubah cara berpikirnya.

The Age dan The Sidney Morning Herald, telah menjadi perhatian Amerika Serikat (AS), bahkan telah menjadi sasaran intelijen AS. Dengan demikian, tidak mustahil AS melakukan penyadapan terhadap berita dan informasi dari dalam negeri.

Tubagus Hasanuddin melihat kemungkinan AS memandang perlu mengawasi dan mendapatkan informasi yang akurat mengingat peran Indonesia di ASEAN dan di Asia Pasifik, terutama hubungannya dengan China dan Korut.

Dia pun memandang perlu seleksi ketat untuk para pejabat dan agen intelijen yang direkrut, terutama terkait ketaatan dan loyalitasnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, Jumat (11/3/2011) mengharapkan intelijen bekerja lebih keras agar stabilitas dalam negeri tidak terganggu terkait dengan berita di harian The Age dan The Sidney Morning Herald. "Intelijen harus kerja keras agar berita-berita eksternal tidak mengganggu stabilitas dalam negeri. Sebab dalam situasi dimana terjadi krisis kepercayaan, membantah saja tidak cukup," kata AM Hendropriyono.

Menurutnya, periode akhir sebuah pemerintahan biasanya memang lebih ramai karena banyak pihak yang berebut ingin menjadi pengganti SBY. Apalagi menurut hasil survei, saat ini popularitas SBY menurun. "Kepercayaan terhadap pemerintahannya otomatis juga menurun. Saat terjadi krisis kepercayaan seperti sekarang, maka segala berita maupun gosip akan sangat berpengaruh besar," tukasnya.

Pada hal, menurut Hendropriyono pemberitaan yang dilansir oleh The Age dan The Sidney Morning Herald bukan sesuatu yang baru. Apalagi dokumen Wikileaks sudah beredar cukup lama. "Namun



Hikmahanto Juwana

karena saat ini kita ibarat orang sakit, saat ada orang yang datang membawa virus, kita bisa mati. Artinya, kalau negara stabil, berita semacam itu tidak akan berpengaruh apa-apa," tandasnya.

Hendropriyono menambahkan, intelijen harus bisa bekerja dengan pendekatan yang lebih cerdas. Antara lain dengan bekerjasama dengan media-media nasional dan internasional. Termasuk berkawan dengan pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintahan. Walaupun Hendropriyono mengaku tidak percaya bahwa pemberitaan negatif mengenai SBY merupakan bagian dari sebuah desain. Sebab, menurutnya, desain seperti itu terlalu berat dan mahal.

Menyikapi fenomena Wikileaks, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsudin di Jakarta, Senin (14/3/2011) mengatakan bahwa dunia strategi dan pertahanan sedang memasuki babak baru, yakni perang asimetris. "Kita harus menanggalkan cara berpikir perang konvensional. Banyak hal yang terjadi tanpa disadari

adalah dampak perang asimetri. Media digunakan sedemikian rupa mengumbar sensasi. Perang asimetri itu bukan menghadapi senjata dengan senjata atau tentara melawan tentara," ujarnya.

Sjafrie mengingatkan, negara yang secara ekonomi dan kesenjataan lemah adalah sasaran utama perang asimetris. Sebagai contoh, media internet atau media massa tanpa sadar dipakai untuk memengaruhi cara berpikir atau melemahkan bangsa.

Menurut Sjafrie Samsudin, setelah teknologi perang nuklir, dunia mengenal istilah baru, perang asimetri atau asymmetric warfare. Perang asimetri berlangsung dalam pelbagai mandala, seperti pemberitaan media massa, jejaring sosial dunia maya, tanpa satuan tempur, dan terkadang tanpa aktor negara sebagai *bel-ligerent* atau pihak yang bertempur.

Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Jakarta International Defense Dialog di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/3/2011), juga mengatakan, peran aktor non-negara pada saat ini semakin menguat. Aktor non-negara itu misalnya, media, kelompok masyarakat madani, LSM, perusahaan-perusahaan, dan individu-individu lainnya. Mereka, menurut Presiden, memaksa pemerintah untuk mengubah cara berpikirnya.

"Selain mereka, ada pula kelompok lain yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi implikasi politik dan keamanan ketika melakukan aksinya, salah satunya adalah Wikileaks," kata Presiden. Menurut Presiden, sekelompok kecil orang di Wikileaks dengan anti-establishment agenda, misalnya, telah merepotkan pemerintah di berbagai negara di dunia, dengan segala implikasi politik dan keamanan. ■ BI/CRS

Saling Curiga Pasca Teror Bom Buku



MODUS BARU: Teror bom buku marak melanda Indonesia setelah pada 15/3/2011 bom meledak di Utan Kayu, Jakarta Timur.

Teror dengan modus bom buku yang marak melanda Indonesia baru-baru ini sempat membuat masyarakat merasa was-was dan panik. Merasa ada beberapa kejanggalan, peristiwa ini pun menimbulkan kecurigaan dan di tengah masyarakat, apakah peristiwa ini sebagai pengalihan isu atau memang ulah jaringan teroris sungguhan.

Selasa 15 Maret 2011 masyarakat dikejutkan dengan adanya paket bom di dalam buku yang dikirimkan kepada Ulil Abshar Abdalla, pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) yang juga salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, ke kantornya di Komunitas Utan Kayu di Jalan Utan Kayu No.68H Jakarta Timur. Dalam upaya menjinakkan bom tersebut, tiga orang petugas menderita luka, termasuk Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, Kopol Dodi Rahmawan.

Paket buku yang berjudul 'Mereka Harus Dibunuh Karena Dosa-Dosa Mereka Terhadap Islam dan Kaum Muslimin' itu dikirim oleh penulisnya Sulaiman Azhar Lc yang beralamat di Jalan Bahagia, Gg Panser, No 29 Ciomas, Bogor Jawa Barat. Di samping buku tersebut, ia juga melampirkan surat pengantar yang meminta Ulil memberikan kata pengantar untuk bukunya.

Selain di Utan Kayu, pada jam yang hampir bersamaan, yakni kira-kira pukul 10.00 WIB, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menerima paket bom serupa. Paket yang dikirim kepada Kepala BNN Inspektur Jenderal Pol. Goris Mere ke Kantor BNN di JL MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, itu akhirnya diamankan tim gegana Mabes Polri dengan cara meledakkannya. Pada hari yang sama, Ketua Pemuda Pancasila Japto S Soeryosumarno juga melaporkan ke Polda Metro Jaya adanya kiriman paket bom serupa di

kediamannya. Dan sehari kemudian, artis Ahmad Dhani juga melaporkan adanya kiriman paket yang sama kepadanya.

Melihat rangkaian teror bom yang begitu cepat di beberapa titik dalam satu hari, para pemerhati keamanan nasional sepakat menilai aksi teror ini dilakukan oleh kelompok yang terstruktur dan sistematis. Salah seorang yang menilai demikian adalah anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo. "Teror bom ini dilakukan oleh jaringan terstruktur, terencana secara sistematis, dan memahami psikologi massa," katanya.

Walau menilai ulah ini dilakukan oleh kelompok terstruktur, tapi siapa kelompok tersebut kemudian menjadi perdebatan publik. Mengingat teror ini terjadi tidak lama setelah tersebarnya berita Wikileaks, yakni berita yang cukup mejojokkan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di samping pengungkapan dalang teror yang cukup lama, sempat timbul kecurigaan masyarakat bahwa teror ini kemungkinan merupakan upaya untuk mengalihkan isu. Namun beberapa pihak lainnya juga tetap berkeyakinan teror ini merupakan pekerjaan orang-orang atau pelaku teror lama.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khatat misalnya, sebagaimana disampaikan kepada *Tempo*, Rabu (16/3) menduga pelaku teror adalah spesialis pembuat bom yang memiliki akses untuk pemakaian bahan peledak. "Ini profesional,

jelas bukan rakyat biasa yang melakukannya," katanya. Dan itu menurutnya bukan kelompok Islam radikal. "Semua ormas Islam radikal itu tidak punya kemampuan membuat bom," katanya. Menurut Khatat, teror bom-bom itu bisa jadi pengalihan isu dari pemberitaan Wikileaks yang telah menyudutkan pemerintah. "Bom itu pengalihan saja," katanya.

Mantan Kepala Bakin, Suripto juga berpendapat, kemungkinan teroris mengirim paket bom buku itu sangat kecil. Sebab, setelah beberapa tokoh terduga teroris ditangkap, tewas, dan Abu Bakar Ba'asyir menghadapi pengadilan, gerakan jaringan teroris di Indonesia tiarap.

Sebaliknya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Ansyad Mbai, (16/3/2011) mengatakan keyakinannya bahwa pelaku teror itu adalah 'pemain lama'. Ansyad mengatakan, kelompok lama itu memiliki target melabrak ideologi Pancasila, konstitusi, serta NKRI. Mereka berniat menggantikannya dengan khilafah dan syariah. "Jadi semua yang dianggap menghambat target mereka akan menjadi musuh mereka," ujar Ansyad.

Nasir Abas, mantan anggota Jamaah Islamiah dalam tulisannya di harian *Republika* 21/3/2011, juga berpendapat, jika melihat dari tiga sasaran teror tanggal 15/3, yakni Ulil, Goriess Mere, dan Japto, bom buku itu bermotif agama berdasarkan keyakinan pelaku, -bukan Islam yang sebenarnya. Alasannya, Ulil adalah pendiri JIL yang pemikiran dan pendapatnya dinilai bertentangan dengan Islam, Komjen Goriess Mere pernah menjabat Kepala Satgas Bom Polri yang menangkap para pelaku bom di Indonesia. Japto adalah Ketua Umum Pemuda Pancasila yang para aktivis jihadiy tidak suka dengan Pancasila.

Walaupun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun target pelaku, yakni menebar ketakutan di tengah masyarakat tampaknya telah berhasil. Selain membuat trauma orang yang menjadi objek peneror, peristiwa ini juga telah membuat banyak masyarakat paranoid. Buktinya, beberapa hari sesudah peristiwa itu, laporan masyarakat atas adanya paket mencurigakan mengalir ke kepolisian. Kepolisian, khususnya tim gegana pun terpaksa ekstra sibuk menanganinya. Padahal setelah diamankan, paket-paket itu kebanyakan terbukti tidak ada bom.

Sementara itu, hingga akhir Maret 2011, kepolisian belum berhasil mengungkap otak teror ini. Tapi mengklaim sudah mengantongi bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku. Polri meyakini, serangkaian bom teror bom itu kemungkinan dilakukan oleh sumber yang sama. ■ MS

Pro Kontra, Pembatasan BBM Bersubsidi

Perbedaan pendapat masih mewarnai pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah pun diminta untuk tegas.

Rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan BBM bersubsidi belum menemui titik terang. Bagi buah simalakama kebijakan ini menjadi sebuah dilema. Di tengah naiknya harga minyak dikhawatirkan implementasinya bisa menimbulkan inflasi. Seiring dengan wacana pembatasan dan menaikkan BBM bersubsidi, kelangkaan minyak di beberapa kota di Tanah Air sudah terjadi akibat ulah spekulasi. Terlebih lagi pembatasan yang dijadwalkan 1 April 2011 masih simpang siur.

Sesuai amanat UU No. 10/2010 tentang APBN 2011, pemerintah berperan mengatur pemakaian BBM bersubsidi secara bertahap agar lebih tepat sasaran. Pemerintah pun lantas mengupayakan pembatasan BBM bersubsidi. Alasannya, pemerintah menilai penggunaan BBM bersubsidi selama ini belum tepat sasaran. Penggunaan BBM bersubsidi masih lebih banyak dinikmati dari golongan ekonomi menengah ke atas, sekitar 54 persen. Sehingga subsidi BBM yang diberikan pemerintah bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain, seperti pembangunan infrastruktur.

Untuk melakukan hal tersebut pemerintah mencoba menerapkan pembatasan BBM bersubsidi dengan membatasi kuota penggunaan premium. Dalam hal ini pengguna kendaraan mobil plat hitam dan merah dilarang menggunakan premium dan solar. Para pengguna kendaraan tersebut diarahkan untuk menggunakan pertamax. Seandainya tidak ada penundaan, pembatasan BBM bersubsidi dijadwalkan akan diterapkan di kota Jabodetabek hingga meluas ke seluruh kota di Pulau Jawa.

Namun melihat dinamika krisis di Timur Tengah mengakibatkan pergerakan kenaikan harga minyak dunia menjadi tidak stabil, pembatasan BBM bersubsidi urung dilakukan yang sedianya bulan April 2011. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kebijakan tersebut ditunda karena kenaikan harga minyak yang tinggi dapat mendorong inflasi dan

ketidaksiapan infrastruktur untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Hatta juga menyebutkan kenaikan tersebut bisa mendorong terjadinya inflasi di dalam negeri yang pada Januari 2011 sudah menembus angka 7 persen dibandingkan Januari 2010.

Sebelumnya harga minyak dunia sempat menembus US\$119,79 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), mencapai US\$97,11 per barel untuk rata-rata Januari 2011. Sehingga kenaikan ini turut mempengaruhi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah dianggarkan pada APBN 2011 dengan asumsi harga minyak mentah 80 dollar AS per barrel. Sedangkan subsidi BBM pada APBN 2011 ditetapkan sebesar Rp 92,79 triliun, meningkat dari Rp 88,89 triliun pada APBN 2010. Diperkirakan kenaikan 1 dollar akan memberi tekanan 0,8 triliun bagi APBN Indonesia.

Seyogyanya pembatasan BBM ini jadi dilaksanakan, kebijakan ini sangat diperlukan untuk menjaga postur APBN-P dari efek deviasi realisasi volume BBM bersubsidi dari yang ditetapkan. Kuota BBM bersubsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter untuk APBN 2011. Namun jika tidak jadi dilakukan akan membuat anggaran subsidi naik Rp 3 triliun-Rp 5 triliun.

Kemungkinan lain jika pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini adalah turut berdampak kepada naiknya konsumsi BBM subsidi dari alokasi awal 38,5 juta KL di 2011 melonjak menjadi 42,2 juta kiloliter (KL) atau naik sekitar 3 juta KL.

Sementara itu Ketua Tim Kajian Pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Anggito Abimanyu yang telah melakukan kajian tentang kesiapan di tingkat kebijakan maupun tingkat lapangan melihat bulan April sebagai momentum yang tepat karena pada April 2011 akan terjadi deflasi. Kajian yang dilakukan atas permintaan pemerintah dan DPR ini bahkan sudah memiliki beberapa opsi final yang diajukan ke pemerintah setelah



SUBSIDI BBM: Pengguna kendaraan plat hitam dan m

dilakukan kalkulasi secara cermat.

Tim ini menawarkan tiga opsi yakni dengan menaikkan harga jual BBM subsidi jenis premium untuk domestik Rp500 per liter serta mengupayakan kestabilan harga jual BBM nonsubsidi hingga pada level kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia. Opsi terakhir adalah membatasi kuota konsumsi BBM subsidi. Dengan catatan, jika memilih opsi kenaikan harga BBM subsidi, khusus untuk moda transportasi umum tidak ada kenaikan. Selebihnya kendaraan milik pribadi, jenis sepeda motor dan mobil, tetap diberlakukan. Dengan kenaikan BBM bersubsidi Rp500 per liter ditaksir penghematan APBN mencapai Rp15 triliun.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan, jika pemerintah dan legislatif memilih opsi menjaga kestabilan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis pertamax, tim yang sudah melakukan survei terhadap aspek daya beli masyarakat, memperhitungkan harga jual kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat sekitar Rp8.000 per liter. Untuk mendukung skema ini perlu didukung dengan penerapan sistem kendali terpusat. Hal ini tidak lain untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian.

Pendapat senada juga dikemukakan



Merah diarahkan untuk menggunakan bahan bakar selain premium.

Koordinator Tim Kajian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam. Menurutnya, menaikkan BBM bersubsidi secara bertahap hingga mencapai nilai keekonomiannya dinilai paling realistis dibandingkan opsi lain. Meski kebijakan ini nantinya memicu inflasi dan mendapat resistensi dari masyarakat. "Tapi, itu merupakan ongkos yang harus diambil," katanya.

Jika dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara lain di Asia, BBM di Indonesia lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah. Ia mencontohkan dengan kurs Rp 9.000, harga keekonomian BBM jenis premium di level Rp6.500 sedangkan harga premium saat ini Rp4.500. Artinya, pemerintah harus mensubsidi Rp2.000 per liter. Ditambah dengan 70% konsumsi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Dengan naiknya harga BBM bersubsidi, pemakaian BBM akan semakin efektif dan efisien dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan, pada saat pemerintah menaikkan BBM di 2005, terjadi penurunan konsumsi yang drastis. Lalu, pada saat pemerintah menurunkan harga BBM di 2009, konsumsinya kembali tinggi.

Sehingga pilihan mengurangi subsidi

BBM dinilai sudah sangat tepat. Karena tidak ada lagi jalan keluar efektif untuk menekan anggaran subsidi. Pemerintah terlambat meningkatkan produksi minyak dalam negeri padahal kebijakan tersebut tidak bisa secara instan terlaksana dalam satu tahun ini. "Opsi yang tersedia, relatif realistis dan efektif untuk mengurangi subsidi sebenarnya hanya tinggal menaikkan harga BBM secara terbatas saja sudah cukup sebenarnya," jelas Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto yang dilansir detikFinance (26/2/2011).

Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bila pembatasan BBM bersubsidi ini jadi dilakukan. Pengamat perminyakan dari Universitas Indonesia, Kurtubi, melihat pengontrolan terhadap pembatasan subsidi BBM akan sulit dilaksanakan karena akan terjadi penyalahgunaan pihak pihak pom bensin asing yang kebanjiran pembeli dan akan lebih diuntungkan. Ia juga tidak sependapat dengan pembatasan kuota pengguna BBM bersubsidi agar beralih dari premium ke pertamax. Penggunaan minyak diganti dengan minyak tidak visioner, seharusnya dari minyak diganti dengan nonminyak.

Selain itu, pembatasan BBM bersubsidi dengan kuota juga dinilai terburu-buru, sedangkan kesiapan infrastruktur belum

memadai dan prosesnya juga baru berjalan dua bulan. Usaha pemerintah apabila terjadi kelangkaan BBM harus lebih mengefektifkan pengawasan. Tidak dengan membatasi kuota dengan mengalihkan kekuangan premium ke pertamax. "Jangan kemudian mengorbankan masyarakat dengan tidak menambah kuota saat terjadi kelangkaan," ujar Pri Agung Rakhmanto kepada Media Indonesia, Kamis (10/3).

Selama ini, tugas untuk pengawasan merupakan wewenang BPH Migas. Lembaga ini bertugas mengawasi agar BBM bersubsidi diterima orang-orang yang berhak, mencegah gejala akibat adanya kelangkaan, serta menjaga kuota agar tidak terlampaui. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan pihaknya tetap akan mengupayakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran jika pun pembatasan konsumsi batal dilaksanakan. BPH Migas sendiri dalam melakukan pengawasan akan bekerjasama dengan pihak dari kepolisian, kejaksaan, Departemen Perhubungan, dan juga Organda.

Sementara itu, mengenai opsi mana yang dipilih, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi yang dipilih sebab masih menunggu pembahasan untuk dikaji lebih dalam dan ada persetujuan DPR. "Kita mengamati pergerakan harga minyak dunia dan kita sampai sejauh ini belum ada satu pemikiran untuk menaikkan harga BBM," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/3/2011). Hatta menghubungkan pengaruh kenaikan harga minyak yang tertolong dengan dengan penguatan rupiah.

Mengingat masalah BBM merupakan masalah yang serius, bukan hanya di Indonesia tapi juga masalah dunia, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, pemerintah harus mempunyai pilihan, apakah menjaga defisitnya makin tinggi atau subsidiinya dinaikkan. Harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menaikkan subsidi BBM, sebab dalam masyarakat tidak ada pertumbuhan baru dari industri," kata Pramono Anung di gedung DPR (9/3).

Sebenarnya Indonesia memiliki sumber minyak dan gas yang melimpah. Konsumsi terus meningkat, sementara eksplorasi minyak terus menurun dari tahun ke tahun. Merosotnya eksplorasi tidak lepas dari kondisi buruk investasi dalam negeri serta korupsi yang merajalela. Selain korupsi, keterbatasan akses data, banyak komponen yang dilanggar dan adanya UU No.22/2001 yang membuat proses untuk melakukan investasi sangat panjang.

■ HS

Jalan Terjal Capres Independen

Publik menginginkan adanya calon presiden independen. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membuka peluang lewat usul amandemen UUD 1945 ke-lima. Secara resmi partai-partai belum menyatakan sikap, namun beberapa elit partai sudah menyatakan kesetujuan dan ketidaksetujuannya.

Salah seorang elit partai yang menyatakan setuju adanya capres perseorangan (independen) adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas mengatakan, capres independen bukan ancaman. Dia menyebut bahwa dalam sejarahnya, calon independen sudah pernah ada pada tahun 1955. Dengan adanya calon independen, akan memacu partai untuk berbenah. "Jadi buat saya, calon perseorangan itu bukan ancaman bagi partai," kata Anas kepada *Berita Indonesia* ketika ditemui di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Apalagi dalam pemilukada calon perseorangan sudah ada. "Saya termasuk yang setuju kalau ada calon perseorangan untuk pilpres," katanya kembali menegaskan. Akan tetapi harus lewat amandemen konstitusi. "Kalau ada partai yang merasa tersaingi atau terancam oleh kehadiran calon perseorangan, berarti partai itu tidak percaya diri," katanya menegaskan.

Sebelumnya, wacana capres independen ini sempat mengemuka pada tahun 2009 setelah salah satu kandidat yang hendak mencalonkan diri lewat jalur perseorangan, melakukan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi. Namun MK mementahkan permohonan tersebut. Meski tidak menutup adanya calon independen, MK lebih menginginkan capres independen tetap melalui jalur partai politik.

Belakangan hal ini mengemuka kembali setelah DPD mengusulkan draf amandemen UUD 1945 yang kelima yang memungkinkan adanya calon presiden dan wakil presiden dari calon perseorangan (calon independen). Sebagaimana draf amandemen yang dilansir Februari 2011 menyangkut Pasal 6A bagian kedua menyebutkan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari usulan

partai peserta pemilihan umum atau perseorangan.

DPD berpandangan, amandemen kelima UUD 1945 perlu dilakukan, sesuai aspirasi dari daerah-daerah yang menginginkan adanya calon independen. Di samping itu, dalam prosesnya sudah dilakukan kajian secara ilmiah di hampir 75 perguruan tinggi besar di Indonesia. Sebelum dibawa ke MPR, para senator Senayan ini sedang melakukan pembicaraan intensif dengan DPR, agar amandemen ini dapat diterima elit-elit parpol.

Pimpinan Kelompok Kerja (Pokja) Amandemen UUD DPD Bambang Suroso mengatakan kepada pers di Gedung DPD, Jakarta, Senin (21/3), adanya kata 'perseorangan' di akhir kalimat pada pasal tersebut bertujuan mengakomodasi capres dan cawapres dari perseorangan. Hal ini dilakukan agar demokratisasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden bisa diwujudkan. Apalagi, menurut Suroso, UU juga mendukung bahwa semua partai politik yang sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, konsekuensinya, konstitusi juga memberi hak kepada perseorangan untuk menjadi capres dan cawapres dengan syarat-syarat dan dukungan yang ada sesuai ketentuan UU.

Jika DPD bisa meyakinkan DPR melakukan amandemen ini, peluang capres independen kian terbuka. Sementara itu dalam agenda pembahasan yang dilakukan DPD dengan partai di Senayan, beberapa elit partai sudah menyatakan penolakannya. Parpol menilai usulan amandemen tersebut bila diterapkan akan merusak sistem kaderisasi kepemimpinan yang dilakukan parpol sekaligus menimbulkan ongkos politik yang boros. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin



Iskandar yang mengatakan, capres non-parpol tidak memberi jawaban terhadap masalah kepemimpinan nasional. Selain itu, menurutnya, usul tersebut bisa merusak pendidikan ideologi kebangsaan dan sistem pemerintahan nasional.

"Untuk calon presiden yang di luar Parpol saya kira tidak boleh terlaksana. Karena dimanapun negara, teori politik manapun, calon presiden ya dari partai politik. PKB sampai sekarang menganggap tidak ada pintu kecuali selain dari pintu Parpol," kata Muhaimin usai bertemu perwakilan DPD RI dalam agenda pembahasan amandemen konstitusi, di kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (24/3/2011).

Hal senada juga dikemukakan, Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Anis pesimis dengan potensi kemenangan capres independen. "Di Amerika Serikat yang mengakomodasi sistem ini, tidak pernah ada calon independen yang unggul," katanya. Kendati demikian, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, menurut Anis,



Indonesia tidak boleh 'alergi' terhadap konsep capres independen, karena hal itu sangat baik untuk perkembangan sistem demokrasi, menghindari pencalonan oligarkis.

Sementara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap menyatakan penolakannya. Menurut AW Thalib, jikapun nantinya capres independen ini menang, posisinya sangat lemah, karena tidak mendapat dukungan dari partai, bisa menjadi bulan-bulanan.

Meski mendapat penolakan sejumlah elit partai, Ketua DPD Irman Gusman bisa memahami hal tersebut, karena partai belum mempelajari latar belakang meningkatkan demokrasi. Ia menilai penolakan ini justru membelenggu demokrasi. Dengan melihat di negara maju yang selalu memberikan ruang alternatif untuk capres independen, menurutnya usulan capres independen, sebagai penyehatan sistem internal parpol, sehingga parpol lebih selektif dalam menentukan capres yang terbaik. Dalam hal ini posisi parpol tidak tergradasi.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mengatakan usulan terhadap calon presiden perseorangan merupakan kritik terhadap partai politik. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari situasi politik saat ini yang mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik. "Usulan itu (capres independen) terkait ketidakpercayaan terhadap situasi politik sekarang saja," tegas Mahfud saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Antar Lembaga di DPP PDIP, Jakarta, Senin (28/3).

Secara pribadi Mahfud kurang mendukung adanya gagasan capres independen. Ia mengatakan, untuk menentukan calon pemimpin nasional, partai seharusnya tetap didorong menjadi alat rekrutmen politik yang sehat. Meski publik banyak yang tidak suka dengan keadaan parpol sekarang. Ia lebih setuju pengajuan capres dilakukan parpol atau gabungan parpol. "Ini untuk menyehatkan parpol ke depan," kata Mahfud usai bertemu dengan Ketua MPR Taufik Kiemas di gedung parlemen (24/3/2011). Selain itu, konsti-

tusi beserta sejumlah perangkat undang-undang politik sudah membawa semangat memperkuat parpol sebagai alat rekrutment politik. Meski demikian, MK sendiri, menurutnya, tidak akan ikut campur mengenai amandemen UUD 1945 karena sepenuhnya hal tersebut merupakan kewenangan MPR.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fajrul Falaakh, menanggapi adanya penolakan sejumlah partai, mengatakan justru usulan amandemen (capres independen) tersebut untuk mempertegas fungsi dan kewenangan eksekutif dan legislatif pada sistem pemerintahan presidensial. Hal itu dia kemukakan agar partai politik tidak perlu takut terhadap usulan calon presiden dan calon wakil presiden dari unsur perseorangan atau independen karena persyaratannya sangat berat. "Usulan calon presiden dan calon wakil presiden independen hanya untuk mengakomodasi bahwa elemen masyarakat bisa mengajukan calon di luar partai politik yang merupakan penerapan demokrasi," kata Fajrul Falaakh di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (23/3).

Ia melihat dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam paket undang-undang politik, realisasi usulan calon perseorangan itu sudah sangat sulit dan terbentur. Ia mencontohkan, tidak semua partai politik bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tapi hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara minimal 20 persen pada pemilu legislatif. "Perolehan suara 20 persen pada pemilu legislatif setara dengan jumlah 112 kursi di DPR," katanya. Menurut dia, jika diasumsikan satu kursi DPR setara dengan 400.000 suara konstituen, maka pasangan calon presiden dan calon wakil presiden independen juga harus mendapat dukungan suara 50 juta suara. "Dukungan itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh calon independen," katanya.

Lebih tegas Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, capres independen bukan ancaman. Hanya, menurut Anes, perlu dipikirkan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. "Karena partai masih baru dibangun secara serius sejak pertengahan tahun 1998-1999 sehingga tradisi politik demokrasi berbasis partai perlu dipikirkan," katanya.

Menurut Anas, sekarang adalah masa yang tepat untuk membangun demokrasi berbasis partai yang makin solid. Sehingga ide calon perseorangan itu bisa diterima. "Kalau sudah solid, calon perseorangan itu akan saling melengkapi," katanya menjelaskan. ■ SAN

Ironi Angket Pajak dan Isu Reshuffle



Anggota DPR RI Fraksi PKB Lily Wahid (kanan) dan Effendi Choirie (kiri) yang menjadi korban usulan hak angket pajak tidak menyesal atas sikap mereka

Usulan hak angket pajak di DPR berakhir dengan ironis. Kegagalan usulan ini dianggap sebagai kemenangan kembali mafia pajak. Wacana perombakan formasi Setgab dan reshuffle kabinet sebagai buntut dari usulan angket pajak ini juga hanya angin lalu.

Berbeda dengan angket skandal Bank Century yang berakhir gemilang dengan kemenangan kubu pendukung, walaupun kemudian tidak ditindaklanjuti pemerintah, usulan angket pajak di DPR pada awal tahun 2011 lalu berakhir dengan kekalahan tipis kubu pendukung. Proses dan hasil usulan angket ini menimbulkan banyak pertanyaan.

Dalam voting di rapat paripurna DPR, Selasa (22/2/2011), kekalahan kubu pendukung hanya selisih dua suara dari kubu penolak, yakni dari 530 orang anggota DPR yang mengikuti voting, anggota yang mendukung sebanyak 264 orang, sedangkan yang menolak 266 orang. Yang membuat usulan angket ini semakin ironis adalah, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya menjadi inisiator pertama, belakangan malah menjadi partai paling ngotot menolak. Sementara Partai Gerindra yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah atau oposisi, justru malah ikut bersama barisan partai pendukung pemerintah untuk menolak angket, sekaligus menjadi penentu kemenangan kubu pemerintah. Di sisi lain, Partai Golkar dan PKS yang merupakan anggota Setgab, justru mendukung penggunaan hak angket.

Mengenai perubahan sikap partai-partai itu, masing-masing memang punya

alasan tersendiri. Anggota DPR dari Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa misalnya mengatakan, fraksinya menolak angket pajak karena mereka menduga angket akan dipolitisasi oleh salah satu partai politik. "Saya pribadi mensinyalir hak angket ini merupakan salah satu cara cuci tangan segelintir pihak dalam masalah perpajakan," katanya. Memiliki alasan yang sama, Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Romahurmuziy lebih tegas mengatakan partainya menduga bahwa ngototnya Golkar mengusung Pansus adalah untuk membersihkan citra Aburizal Bakrie.

Partai Demokrat, sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarak, juga menuduh Partai Golkar dan PKS punya kepentingan mendukung hak angket. Golkar menurutnya berkepentingan melindungi ketua umumnya, Aburizal Bakrie. "Dengan adanya angket, Golkar berharap Aburizal lepas dari masalah-masalah pajak," kata Mubarak. Namun secara formal, partai-partai penolak usulan angket itu menolak usulan hak angket karena menurut mereka tidak ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan pemerintah dalam masalah ini.

Sementara kubu pendukung angket, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS dan Partai Hanura, bertahan mengajukan

angket karena menganggap skala masalah perpajakan sangat besar. Dan lebih mendasar lagi, seperti dikatakan Akbar Faisal dari Fraksi Hanura, karena adanya kerugian negara serta adanya beberapa pelanggaran kebijakan dalam perpajakan. Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, partainya sengaja mendukung angket pajak sebagai upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan yang saat ini masih banyak menghasilkan mafia pajak. "Kita ingin pajak semuanya harus masuk negara, angket ini salah satu caranya," katanya. Selain itu, ia mengatakan, partainya ingin menghindari fitnah. Sebab, jika partainya mundur dari dukungan angket, hal itu menurutnya justru akan menimbulkan tuduhan yang bukan-bukan dari berbagai pihak.

Menyambung alasan ketua umumnya, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso juga mengatakan bahwa dukungan Golkar pada pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak adalah agar negara melakukan 'bersih-bersih' dari mafia pajak. Selain itu, agar tidak ada lagi saling tuduh dalam kasus pajak. "Selama ini kami diserang dan jadi sasaran tembak dari pihak-pihak termasuk yang tergabung di Setgab. Dan akhirnya Golkar tidak punya banyak pilihan (untuk mengatakan, red) bahwa Golkar baik-baik saja," kata Priyo (18/2/2011).

Menanggapi tuduhan yang dilontarkan beberapa politisi yang mengatakan alasan Partai Golkar mengusulkan hak angket hanya untuk membersihkan nama Ketua Umumnya Aburizal Bakrie, dengan tegas disangkal para politisi partai berlambang pohon beringin tersebut. Anggota DPR Bambang Soesatyo misalnya, mengatakan angket itu justru untuk mengungkap semua. Sebaliknya, ia justru berpendapat bahwa pihak yang menentang hak angket itulah yang patut diduga melindungi mafia pajak. Lebih jelas, Bambang mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang menolak hak angket pajak. Penolakan itu menurut Bambang akan mengundang kecurigaan publik.

Pandangan senada diutarakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun. Ia menilai, angket pajak urgen dibentuk sebab aparat penegak hukum tampak lamban menangani perkara mafia pajak. Ia berpendapat, menolak angket berarti ketakutan ikut membongkar kejahatan pihaknya. Gayus Lumbuun

mengakui pembentukan pansus itu memang bisa jadi alat legislatif menggoyang pemerintah. "Kalau yang digoyang tidak menjalankan *policy* dengan baik, mengapa tidak? Kami digaji bukan untuk diam saja," ujarnya.

Begitu ironisnya, sehingga "drama" usulan hak angket ini pun sempat membuka luka lama di tubuh sekretariat gabungan (Setgab) koalisi, khususnya terkait angket skandal Bank Century yang ketika itu banyak didukung oleh partai koalisi. Akumulasi persoalan itu pun sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gusar sehingga mengancam akan mengubah formasi Setgab. Dalam pidatonya pasca voting usulan hak angket Pajak, Presiden SBY menyatakan bahwa karena ada satu-dua parpol anggota Setgab yang melanggar kesepakatan koalisi, maka ia akan melakukan penataan ulang formasi Setgab. Pernyataan itu pun kemudian diterjemahkan masyarakat sebagai aba-aba akan diadakannya *reshuffle* (perombakan) kabinet.

Mengingat Partai Golkar dan PKS merupakan dua partai anggota Setgab yang mendukung hak angket Skandal bailout Bank Century dan angket Pajak, dua partai ini pun sejak semula diduga menjadi sasaran utama dari perombakan Setgab maupun kabinet.

Mendukung wacana tersebut, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga secara halus telah 'mengusir' kedua partai tersebut. Ia menyatakan, mempersilahkan dua partai yang dianggap membelot itu jika ingin keluar dari Setgab. "Kita ikhlaskan kalau mau keluar," kata Anas di Surabaya, Selasa (22/2). Dalam kesempatan itu, Anas juga menanggapi boleh tidaknya ada perbedaan di Setgab. Menurutnya, anggota Setgab memang diperbolehkan berbeda, namun tidak mungkin selama perjalanannya selalu berbeda. "Setgab saat ini sudah kurang asyik karena terlalu sering beda," tambahnya.

Memperhatikan gerak-gerik pemerintah pasca voting usulan hak angket Pajak ini, isu *reshuffle* kabinet ini sempat dianggap semakin mendekati kebenaran. Diberitakan, komunikasi intensif sudah dilakukan orang-orangnya Presiden SBY terhadap Partai Gerindra sebagai calon anggota baru Setgab. Posisi menteri yang diincar Partai Gerindra atau yang akan diberikan Presiden kepada partai itu juga disebut-sebut sudah mendekati *deal*, yakni Menteri BUMN dan atau Menteri Pertanian.

Selain kepada Partai Gerindra, orangnya Presiden SBY juga diberitakan sudah melakukan komunikasi serius dengan PDI Perjuangan. Walaupun tidak disebut maksud dan tujuannya secara jelas, Menko Perekonomian Hata Rajasa sudah



Ahmad Mubarak

berkunjung ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar. Ketua Dewan Penasehat PDI Perjuangan, Taufik Kiemas yang juga suami Megawati, juga menyatakan jadi tidaknya partainya bergabung dalam barisan koalisi ada di tangan Puan Maharani. Walau demikian, Megawati Soekarnoputri belum memberikan respon tentang wacana itu, padahal sesuai pengalaman sebelumnya, keputusan terakhir partai ini selalu berada di tangan Ketua Umum PDI-P tersebut.

Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Absar Abdalla - usai diskusi "Rekonsiliasi dan rekonstruksi koalisi" di Jakarta (6/3/2011) ketika itu dengan yakin sudah mengatakan *reshuffle* akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama, yakni tidak sampai satu atau dua minggu.

Sebaliknya, menanggapi wacana itu, kecuali Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kader Partai Golkar dan PKS sudah pasrah akan langkah yang akan diambil Presiden SBY, termasuk *reshuffle* kader mereka di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dari PKS, Dewan Pembina PKS yang juga menjabat Menkominfo Tifatul Sembiring misalnya, menyatakan siap didepak dari partai koalisi. Sementara dari Partai Golkar, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan silakan saja menjatuhkan sanksi. Tapi ia mengingatkan bahwa Setgab bukan didesain untuk menyamakan semua pandangan.

Tapi seperti disebut di atas, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berkeyakinan bahwa masalah usulan angket pajak tidak akan mengubah posisi partainya di Setgab. Menurut pria yang kerap dipanggil Ical, ini, angket pajak terlalu kecil untuk membatalkan kemauan yang besar di antara Golkar dan Demokrat. Karenanya, ia menjamin perbedaan ini tidak akan membuat Golkar keluar dari Setgab. "Terlalu kecil (angket pajak),

batalan kemauan yang besar (di Setgab)," katanya.

Sejalan dengan keyakinan Ical, wacana perombakan Setgab dan kabinet memang betul-betul hanya wacana saja. Presiden SBY sendiri membantah adanya rencana melakukan perombakan atau *reshuffle* kabinet dan menganggapnya kurang logis. Dalam konferensi pers khusus mengenai hal ini di kantor Presiden Jakarta, Rabu (09/03/2011), Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi lebih menegaskan hal tersebut. "Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya *reshuffle* kabinet dalam waktu dekat," kata Sudi.

Bantahan itu pun membuat Partai Golkar dan PKS merasa senang. Sebaliknya, Partai Gerindra merasa hanya diberikan harapan semu. "Seperti dikeret dan dilipat. Kita sudah tahu tidak akan terjadi *reshuffle* dalam waktu dekat," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani (13/3/2011) sebagaimana dikutip harian *Republika* (14/3). Meski begitu, dia membantah jika partainya dikecewakan pernyataan SBY itu. Dia juga membantah ada komunikasi politik antara Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden SBY, baik melalui telepon maupun langsung. Dia bahkan berpendapat, sudah seharusnya SBY dan kekuatan politik lainnya berkonsentrasi untuk kepetingan masyarakat. "Jangan sampai (isu) *reshuffle* dibikin menjadi ancaman politik (untuk partai koalisi)," katanya.

Mengenai dukungan partainya terhadap penolakan hak angket pajak, Ahmad Muzani menyebut itu sebagai bentuk dukungan atau 'sedekah politik' kepada Partai Demokrat. Keputusan tersebut katanya tanpa mengharapkan embel-embel politik. "(Gerindra) tidak merasa dikadali (SBY), (tapi) jangan ganggu-ganggu atau undang-undang kita lagi," cetusnya.

Pupus soal perombakan Setgab dan kabinet, usulan angket pajak belakangan hanya menyisakan kenangan pahit bagi segelintir anggota dewan. Karena berbeda pendapat dengan partainya dan atau karena absen saat pelaksanaan voting, beberapa anggota dewan akhirnya mendapat sanksi dari partainya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lily Wahid dan Effendi Choirie misalnya, mendapat sanksi pemecatan dari partainya karena menyetujui usulan angket pajak, padahal kebijakan partainya menentukan untuk menolak. Sama dengan PKB, tiga kader PDI Perjuangan di DPR, yakni Indah Kurnia, Herman Heri, dan Sugianto juga diadili oleh Badan Kehormatan PDI-P (25/02/2011) karena bolos saat voting usulan Hak Angket Pajak. Ketiganya pun mendapat peringatan resmi dari partainya. ■ BI

Pelabuhan Merak Makin Mandek

Penyeberangan kapal dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni dan sebaliknya semakin mandek. Pembangunan terowongan bawah laut rel kereta api Selat Sunda perlu diprioritaskan.

Tom, supir truk yang membawa kacang ijo dari Jawa ke Sumatera tertegun di samping truknya yang sedang mengantre di jalan raya menuju Pelabuhan Merak. Pikirannya menerawang ke hari esok. Sudah tiga malam dia telat dari jadwal biasanya akibat kemacetan panjang di jalur tersebut. Tidak hanya keterlambatan yang dia khawatirkan, tapi risiko barang bawaannya akan ditolak pemesan lebih mengganggu pikirannya. Sebab, jika dia tidak segera menyeberang ke Pulau Sumatera, kacang ijo yang dia bawa terancam sudah berubah jadi toge, sehingga sudah pasti akan ditolak pemesan.

Tom hanyalah satu dari sekian banyak orang yang mengeluh karena mengalami kerugian akibat mandegnya angkutan penyeberangan dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni dan sebaliknya. Seperti diketahui, di samping berkurangnya armada, cuaca buruk juga telah mengurangi volume pelayaran kapal feri dan kapal roll on roll off (roro) dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung atau sebaliknya sejak awal Februari hingga Maret 2011. Ketidakseimbangan daya angkut dengan jumlah truk yang hendak menyeberang membuat terjadinya antrean panjang truk di sepanjang jalan raya hingga tol menuju Pelabuhan Merak. Saking banyaknya truk yang menunggu giliran, antrean bahkan bisa mencapai 12 Km lebih, terhitung mulai dari pintu masuk pelabuhan. Walau tidak separah di pelabuhan Merak, di Pelabuhan Bakauheni juga terjadi tumpukan truk yang menunggu giliran menyeberang ke Pulau Jawa.

Kemandekan penyeberangan ini dengan sendirinya telah mengganggu distribusi pangan dan barang lainnya di Jawa-Sumatera, sekaligus telah mengakibatkan kerugian berbagai pihak, khususnya pada para pelaku ekonomi di daerah ini. Para supir truk misalnya, sangat mengeluhkan kemacetan ini karena semakin lama mereka di perjalanan berarti biaya hidup mereka juga ikut membengkak. Di samping itu, upah mereka juga turut ber-

kurang karena pengupahan mereka biasanya dihitung per jumlah pengiriman, sementara waktu mereka sudah banyak terbuang hanya untuk menunggu menyeberang.

Selain supir truk, pedagang di dua wilayah ini juga banyak yang mengeluh karena barang mereka kerap terlambat, bahkan dengan kualitas yang sudah turun pula. Seperti komoditas pertanian misalnya, sering sampai kepada pemesan sudah dalam kondisi membusuk. Di Pasar Tamin, Bandar Lampung, pedagang sayur di tempat ini turut mengeluhkan kemacetan di Merak karena komoditas yang dikirim dari Jawa terlambat sehingga sudah membusuk.

Pengusaha ekspedisi dan travel juga tak luput dari kerugian karena volume perjalanan mereka jadi berkurang akibat kemandekan ini. Menurut pengakuan Agus, seorang sopir travel misalnya, ia yang biasanya bisa pergi-pulang (satu rit) dalam sehari, tapi akibat panjangnya antrean masuk kapal penyeberangan, kini tidak bisa satu hari lagi. Biaya solar dan makannya pun menurutnya ikut membengkak, seiring makin lamanya waktu penyeberangan. Sekarang menurutnya, untuk menyeberang tidak bisa lagi 2,5 jam. Tapi paling cepat 3,5 jam.

Tidak hanya sopir, pedagang, dan pengusaha travel yang mengeluhkan masalah ini, Operator jalan tol Tangerang-Merak, PT Marga Mandala Sakti (MMS) juga mengaku rugi akibat kemacetan ini. Sebab, volume kendaraan yang melintas di jalan tol juga ikut menurun dibanding hari normal. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, tidak lama lagi inflasi juga dikhawatirkan akan terjadi di sejumlah kota di Sumatera karena seiring langkanya barang dan pembengkakan biaya distribusi maka harga pun otomatis akan naik. Akhir-akhir ini, beberapa daerah di Lampung bahkan diberitakan sudah mengalami inflasi. Kota Bandar Lampung misalnya, selama Februari 2011 diberitakan telah mengalami inflasi 0,70 persen. Inflasi



Kemacetan menuju Pelabuhan Merak Banten semakin

yang cukup tinggi ini disumbang komponen sayur-sayuran, terutama bawang, serta sejumlah barang konsumsi, seperti mi instan, susu kaleng, sabun, dan buah-buahan yang selama ini masih dikirim dari Jawa. Selain Bandar Lampung, kota lain di Sumatera seperti Tanjung Pinang, Padang, dan Bengkulu juga diberitakan mengalami inflasi tinggi.

Menganggap persoalan ini bukan persoalan enteng, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sampai merasa perlu menyampaikan perintah tegas kepada bawahannya agar segera mengatasi masalah ini. Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, 25/2/2011, Presiden SBY disebutkan telah menginstruksikan Kementerian terkait agar mengoptimalkan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk mengatasi antrean truk ke Pelabuhan Merak itu. Kedua BUMN pelayaran itu juga diminta segera melakukan langkah daru-



...n sering terjadi sehingga mengganggu perekonomian di Jawa dan Sumatera.

rat, yaitu mengerahkan semua kapal feri dan kapal roll on roll off (roro) yang bisa mengatasi gelombang laut di atas 2-3 meter. Menhub Freddy Numberi dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar diminta Presiden untuk memantau pelaksanaan instruksi itu.

Mendapat instruksi demikian, PT ASDP pun menambah 13 kapal ke Selat Sunda. "Untuk enam kapal milik ASDP dikirim tahun ini, dua kapal baru dan empat lagi kapal bekas, sedangkan untuk tujuh kapalnya menyusul," kata Menteri Menteri BUMN, Mustafa Abubakar usai melakukan rapat tertutup dengan pihak ASDP Pusat dan Cabang Utama Merak, Minggu (6/3/2011).

Terowongan KA Selat Sunda

Untuk jangka panjang, pembangunan Jembatan Selat Sunda yang sudah lama diwacanakan kembali dibicarakan sebagai solusi mengatasi permasalahan penyeberangan ini. Menko Perekonomian Hatta Radjasa merupakan salah satu petinggi

negara yang mengajukan solusi tersebut. "Jangka panjangnya mau tidak mau kita



Maket Jembatan Selat Sunda

bangun jembatan di situ," kata Hatta Radjasa, Selasa (1/3/2011). Namun sampai saat ini, rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu, menurut Hatta, baru pada tahap persiapan regulasi.

Sementara, ketika wacana pembangunan jembatan Selat Sunda itu mengemuka, Syaykh Panji Gumilang menyampaikan gagasan pembangunan terowongan kereta api bawah laut Selat Sunda dan Selat Bali untuk menghubungkan Lintas Kereta Api Sumatera-Jawa-Bali atau Trans Sumatera-Jawa-Bali Railways, disingkat TSJB Railways. Syaykh Panji Gumilang berpendapat bahwa akan lebih baik memprioritaskan pembangunan terowongan kereta api bawah laut Selat Sunda daripada jembatan Selat Sunda.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, sesuai keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan, sudah saatnya pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur kereta api dan perhubungan laut daripada infrastruktur jalan darat. Di samping itu, pembangunan jalan darat, tol dan jembatan, jauh lebih besar, terutama dalam hal biaya pembebasan tanah, daripada pembangunan rel kereta api.

Sependapat dengan Syaykh Panji Gumilang, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tunjung Inderawan mengatakan pembangunan angkutan kereta api seakan masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Dia memberi contoh, pengajuan anggaran perkeretaapian 2011 untuk membangun jalur-jalur ganda di lintas utara dan selatan Jawa serta rehabilitasi sejumlah rel peninggalan Belanda Rp.8 triliun, tapi yang disetujui Rp4,1 triliun. ■ MS

Al-Zaytun - Partai Demokrat Sehati Bangun Bangsa

Partai Demokrat menjalin silaturahmi dengan Mahad Al-Zaytun dalam rangka membangun bangsa dan negara ke depan. Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono berkeyakinan, Al-Zaytun dan Partai Demokrat mempunyai jalan pikiran yang sama untuk membangun bangsa dan negara. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang juga berpendapat, kedua kekuatan ini bila bersinergi, akan menjadi kekuatan bangsa.

Partai Demokrat dan Mahad Al-Zaytun menorehkan catatan baru dalam perjalanan dua lembaga itu. Puluhan elit partai berlambang tiga berlian itu, mulai dari pengurus pusat, provinsi hingga kabupaten datang bersilaturahmi ke kampus Al-Zaytun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu pada Kamis 17 Maret 2011. Dalam silaturahmi itu Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, yang juga putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka disambut oleh Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, para civitas akademik Al-Zaytun, dan para pengurus ormas Masyarakat Indonesia Membangun yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

Pertemuan yang baru pertama kalinya ini barangkali boleh disebut merupakan titik awal sinergi dua kekuatan, yakni bidang politik dan pendidikan yang cukup besar dalam perjalanan bangsa ke depan. Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu 2009 sekaligus menjadi partai berkuasa hingga 2014. Sementara Mahad Al-Zaytun merupakan kampus yang mengusung visi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian yang telah mendidik anak bangsa dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan dari beberapa negara.

Beberapa hikmah lahir dari



Syaykh Al-Zaytun (berdiri) sedang menyampaikan sambutan pada acara silaturahmi Partai Demokrat dengan Al-Zaytun yang disimak oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro dan rombongan lainnya dengan serius

pertemuan yang berlangsung bersahabat dan jauh dari kesan kampanye itu. Salah satu di antaranya, kedua pihak tampak sehat untuk membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Pertemuan itu sendiri terasa sangat singkat, yakni hanya sekitar tiga jam. Walau demikian, banyak hal yang telah dilakukan bersama kedua belah pihak sehingga pertemuan itu meninggalkan kesan dan kenangan yang indah dan baik.

Karena kepadatan acara pengurus Partai Demokrat itu pada siang harinya, rombongan itu pun baru sampai ke kampus Al-Zaytun menjelang magrib. Walau demikian, hikmah pertemuan tersebut sedikitpun tidak berkurang. Seluruh

civitas akademik Al-Zaytun yang sudah menunggu sejak siang tetap menyambut rombongan Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat itu dengan sukacita. Para santri yang khusus bertugas, tetap semangat menyambut rombongan mulai dari gerbang ketibaan hingga di mashykhoh, yakni gedung atau rumah kediaman Syaykh, tempat dimana pertemuan diadakan.

Di mashykhoh, rombongan disambut oleh Syaykh Al-Zaytun, keluarga, para eksponen Al-Zaytun, serta pengurus dan anggota ormas "Masyarakat Indonesia Membangun" yang memang sengaja diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut.

Diiringi alunan merdu gamelan serta diselingi paduan suara santriawan dan santriwati yang



Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro disambut Syaykh Al-Zaytun dan para ekshonen

melantunkan lagu-lagu nasional, dan himne Mahad Al-Zaytun, himne Universitas Al-Zaytun, serta himne dan mars ormas "Masyarakat Indonesia Membangun", silaturahmi kedua belah pihak tampak penuh kehangatan dan persaudaraan.

Karena kebetulan azan magrib sudah tiba, maka sebelum melanjutkan acara silaturahmi, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk menunaikan sholat magrib berjamaah lebih dulu di masjid terdekat dari mashykh, yakni Masjid al-Hayat yang berada di sisi selatan dari kediaman Syaykh tersebut. Di Masjid, Syaykh, Anas, Edhie Baskoro yang berada di barisan paling depan tampak khusus menunaikan sholat.

Usai menunaikan sholat, rombongan kemudian dijamu makan malam di tempat yang sama. Dalam kesempatan itu, Syaykh Al-Zaytun dan Umi Farida al Widad, putra dan putri Syaykh, Imam Prawoto dan Khoirunnisa, serta Adik Syaykh, MYR Agung Sidayu yang makan semeja dengan Anas Urbaningrum dan istri Athiyah Laila, Edhie Baskoro, serta Herman Poiron memanfaatkan waktu untuk beramah tamah. Dalam kesempatan itu, Syaykh juga secara sekilas menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Al-Zaytun,

yang ditanggapi cukup apresiatif oleh Anas dan Ibas serta yang lainnya, khususnya mengenai kegiatan pertanian di kampus pendidikan terpadu tersebut.

Acara makan malam yang diiringi lantunan lagu-lagu yang dibawakan oleh grub band Al-Zaytun sendiri, menambah keakraban kedua belah pihak. Beberapa orang peserta rombongan Partai Demokrat bahkan sempat menyumbangkan lagu yang disambut meriah oleh seluruh peserta pertemuan.

Usai makan malam, acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan, setelah sebelumnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga didaulat memberi sambutan mempersilakan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mewakili semua rombongan memberikan sambutan. Anas pun menyampaikan sambutannya dalam suasana kekeluargaan dan bahasa cukup diplomatik.

Partai Demokrat Bangun Ikatan Sinergi

Mengawali sambutannya, Anas mengatakan bahwa kehadiran mereka itu adalah untuk silaturahmi, sowan,

karena mereka yakin dan paham Partai Demokrat dan Mahad Al-Zaytun mempunyai jalan pikiran yang sama untuk membangun bangsa dan negara. "Kami garis bawah itu, kami syukuri malam hari ini, kami bisa hadir silaturahmi, *sowan*, rombongan dari Jakarta, dari Bandung, dari Indramayu sendiri, tanda bahwa kami ingin membangun tali persahabatan, tali persaudaraan, ikatan sinergi. Karena kami tahu, kami yakin, kami paham, kita mempunyai jalan pikiran yang sama untuk membangun bangsa dan negara," katanya. "Itu yang paling pokok, selebihnya sudah lengkap. Sudah bertemu, sudah saling bersalaman, sudah berwacara, sudah sholat jamaah, sudah makam malam bersama, sudah bernyanyi bersama. Sudah lengkap, sudah sempurna," lanjut Anas.

Secara diplomatik, Anas juga mengatakan pertemuan itu sangat sempurna karena isyarat sudah disampaikan oleh Syaykh dengan baju yang dikenakannya. Ketika itu, Syaykh memang sengaja memakai baju warna biru, warna Partai Demokrat, untuk menyambut rombongan Anas dan Ibas serta pengurus Partai Demokrat lainnya.

Lebih lanjut Anas mengatakan bahwa kehadirannya kali ini tidak semata-mata



NYANYIKAN INDONESIA RAYA: Sebelum memberikan sambutan dalam acara silaturahmi pengurus Partai Demokrat dengan civitas Al-Zaytun (17/3/2011), hadirin lebih dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tampak Syaykh Al-Zaytun dan Anas Urbaningrum menyanyi dengan khidmat

Kami yakin, kami paham, kita mempunyai jalan pikiran yang sama untuk membangun bangsa dan negara.

sebagai ketua umum partai, tapi juga dalam konteks tadzim junior kepada seniornya. Anas dan Edhie Baskoro yang saat itu mengenakan baju batik mengaku sebelum sampai ke Mahad Al-Zaytun sudah lebih dulu membuka baju partainya. "Baju saya sudah saya lepas di luar tadi. Saya kalau baju biru banyak tapi sudah saya lepas bajunya karena saya hadir dalam konteks tadzim junior kepada seniornya," ujarnya.

Kembali secara diplomatis, Anas mengatakan, "dan di mana pun juga rumusnya, senior itu pasti sayang dan membantu juniornya. Itu sudah sunatullah. Dan sunatullah itu saya yakin berlaku di Mahad Al-Zaytun. Karena itu, sebetulnya sudah selesai semua."

Setelah kembali menyampaikan terimakasih atas sambutan, penerimaan yang sangat hangat, bersahabat, dan penuh sayang seorang senior kepada juniornya, Anas mengatakan keyakinannya bahwa pertemuan kali ini akan menjadi titik yang penting untuk membangun kesepahaman-kesepahaman yang dalam tentang bagaimana mengurus bangsa dan negara ke depan dengan makin baik dan makin bermartabat. Selanjutnya, Anas mengatakan, dirinya mengikuti petuah dari Syaykh saja. "Selebihnya, junior

ikut petuah seniornya," katanya diplomatis.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Anas juga menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan sebagian rombongannya. Dengan sedikit berseloroh, Anas memperkenalkan satu persatu rombongannya mulai dari Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Tentang pria yang akrab dipanggil Ibas ini, Anas mengatakan bahwa kedatangan Edhie Baskoro sebetulnya memiliki misi agak khusus, yakni mencari siapa tahu ada santri yang cocok. Ucapan itu spontan disambut tepuk tangan oleh seluruh hadirin.

Anas selanjutnya memperkenalkan Herman Poiron, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga menangani Departemen Pertanian di DPP Partai Demokrat. Tentang pria ini, masih dengan berguyon, Anas mengatakan ilmu pertaniannya kalah jauh dengan Syaykh. "Tadi (saat di meja makan) ada kuliah khusus tentang beras, tentang kacang, tentang kedelai, yang itu belum ada di Komisi IV. Jadi Syaykh ini juga patut kita sebut sebagai "Begawan Pertanian," katanya.

Kemudian, Anas berturut-turut memperkenalkan Saan Mustofa, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di

DPR RI; kemudian Rifki Arshaad, Ketua Komisi VII DPR RI; Kamal Rozali, Sekretaris Departemen Pertanian Partai Demokrat; Pashya Ismaya Sukarti, anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Departemen Perdagangan DPP Partai Demokrat; Nirwan Hamid, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI; Rosyid Hidayat, anggota Komisi IV DPR RI.

Kemudian Niwan Sulanjana, Ketua Partai Demokrat Jawa Barat; Irfan Suryanegara, Ketua DPRD Jawa Barat; Djafar Nainggolan, anggota DPR RI Komisi IV; Sri Irayati, anggota Komisi IV DPR RI; Budi, Wakil Ketua Partai Demokrat Indramayu. Dan terakhir, istrinya, Athiyyah Laila.

"Inilah yang ingin saya sampaikan Syaykh dan keluarga besar Al-Zaytun. Mengapa saya tidak berkata panjang karena kesimpulannya sudah ada. Kesimpulannya sudah di tangan Syaykh. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih, rasa syukur yang dalam atas pertemuan silaturahmi malam hari ini. Kami yakin sekali lagi, ke depan kita bisa bersinergi untuk memajukan bangsa dan negara yang kita cintai," ucap Anas menutup sambutannya.

Syaykh: Isyarat Baju Biru

Sementara Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang yang dengan maksud agar lebih dekat, dalam sambutannya memanggil Anas Urbaningrum dengan adinda dan Edhie Baskoro dengan Dik Ibas. Syaykh mengatakan, bersyukur pada Allah bahwa malam itu kekuatan politik nasional dan sejumlah anak bangsa yang sedang menekuni pendidikan dipertemukan oleh Allah yang Maha Kuasa dalam satu ruangan di kampus Al-Zaytun.

Syaykh menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan yang sangat hebat, karena dua kekuatan itu, antara politisi dan pendidik, bila bersinergi insya Allah akan merupakan kekuatan bangsa yang tangguh.

Menanggapi sambutan Anas sebelumnya yang mengatakan bahwa kesimpulan telah ada di tangan Syaykh Al-Zaytun, Syaykh mengatakan pembukaan dan prosesnya memang telah dibuat, tinggal penutupannya. Supaya tidak terlalu lama berdialog panjang lebar, Syaykh pun mengatakan bahwa lebih baik tampilkan isyarat. Kibarkan bendera saja. Menganalogikan dengan sebuah pertandingan tinju, Syaykh mengatakan kalau ada orang bertanding tinju, kalau menyerah biasanya melemparkan bendera putih. Tapi kalau menang, lemparkan bendera biru.

Seiring dengan itu, makanya sebelum kedatangan para pengurus Partai Demokrat itu, Syaykh sudah meminta kepada Umi Farida al Widad, istrinya, untuk membikinkannya baju biru. Maksudnya, jika Anas dan Ibas datang, Syaykh tidak terlalu panjang lebar lagi bicara atau tidak terlalu lama lagi menyampaikan hal-hal yang dibicarakan. Jadi, saat Anas, Ibas dan rombongan sampai, isyarat pun sudah sampai, sehingga tinggal jabat tangan.

Menurut Syaykh, ada dua perjalanan di dunia ini. Satu, mukhodimah, yakni perjalanan yang tidak selesai-selesai. Itu yang pernah dipraktikkan oleh Ibnu Khaldun. Dimana sampai sekarang buku Ibnu Khaldun itu namanya hanya Mukhodimah Ibnu Khaldun. Tidak pernah ada simpul. Mukhodimah terus, mukhodimah terus. Perjalanan satu lagi

adalah seperti yang terjadi dalam pertemuan ini. Sebab nggak tahu kapan awal dan prosesnya, ujuk-ujuk sudah ada kesimpulan.

Selanjutnya dikatakan Syaykh, menurut kata orang, diplomasi itu yang penting bukan prosesnya, tapi *ending*-nya. Anas Urbaningrum, menurut Syaykh, adalah ahlinya karena memang ahli diplomasi. Jadi, menurut Syaykh, Partai Demokrat dan Al-Zaytun sudah ketemu, tidak usah diucapkan. Sebab kalau diucapkan, itu kadang-kadang saling menuntut.

Mengenang beberapa waktu yang lalu, ketika ada pemilihan umum ulang di Al-Zaytun, KPU sebagai panitia dan Anas sebagai anggota KPU ketika itu, pernah datang namun tidak mampir. Para pengurus Al-Zaytun pun pernah menanyakan alasan tidak mampirnya Anas itu kepada Syaykh. Menjawab pertanyaan itu, Syaykh ketika itu menjawab, bukan waktunya. Suatu saat akan datang. Ternyata sekarang benar-benar datang. Datangnya bukan waktu pemilihan umum. Itu, menurut Syaykh, suatu yang sehat. Tahun 2014 itu memang masih panjang. Tapi orang yang pandangnya jauh ke depan, selalu berpikir panjang dan memulai cepat. Daripada datang nanti dekat-dekat tahun 2014, pasti macam-macam tanggapan orang. Sekarang, baru tahun 2011, Anas juga memboyong para pengurus partai dari pusat hingga daerah.

Perjalanan para politisi seperti ini, menurut Syaykh tentunya memiliki banyak cita-cita ke depan. Sebagai seorang pendidik, "mesemnya politisi" Syaykh mengaku paham. Jadi tidak usah dijawab lisan. Langkah seseorang itu lebih tegas daripada ucapannya. "Jadi sekarang, apa kurang tegas? Ini (sambil menunjuk songkok) kalau boleh, saya pakai biru. Cuma nggak pantas, sebab cat rambut pun tidak ada yang memakai cat biru. Walaupun dari Demokrat, andai rambutnya putih, tidak bakal dicat biru, pasti cat hitam. Songkoknya pun songkok hitam," kata Syaykh.

Ditambahkan Syaykh, baju yang dikenakannya, apakah mirip atau tidak, menurut Syaykh yang penting itu jahitan istri, sekaligus untuk menampilkan supaya ia nanti tidak banyak ditanya. Sementara simbolnya, nanti setelah Anas memberikan. "Jangan sampai hidung tak mancung pipi yang didorong-dorong. Nanti kalau sudah dikasih, baru disematkan," kata Syaykh.

Kepada seluruh hadirin, Syaykh dengan bahasa diplomasi juga



Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan rombongan disambut Syaykh AS Panji Gumilang saat tiba di Mahad Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat, 17 Maret 2011



Rombongan pengurus DPP, DPD Provinsi dan Kabupaten Partai Demokrat memberi tepuk tangan pada sambutan Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang

Rencananya dalam waktu dekat, Al-Zaytun akan menanam 5 ha. Kemudian tiga bulan ke depan, pada waktu panen raya, ketua umum dan sekjen dan rombongan Partai Demokrat akan diundang untuk memanen. Anas sendiri sudah menyatakan kesiapannya.

mengatakan, inilah kunjungan Partai Demokrat. Dikatakan kunjungan biasa, memang biasa. Kalau sudah partai politik berkunjung, tak lain tak bukan, ya itu. Kedekatan apa pun, tapi kalau sudah kunjungan partai, ya, itu.

Pada kesempatan itu, Syaykh juga memperkenalkan rombongan pengurus organisasi massa yang didirikannya, yang sengaja diundang untuk mengikuti pertemuan itu. "Di sini, mumpung kita bertemu, kami perkenalkan kepada saudara-saudara, kami undang semua kawan dari Jawa Timur. Dari Banyuwangi hingga Banten, kami undang. Karena kami punya ormas yang namanya 'Masyarakat Indonesia Membangun'. Nah, siapa tahu itu bisa disinergikan dalam perjalanan-perjalanan ke depan," ujar Syaykh.

Selanjutnya, Syaykh juga menceritakan sebagian aktivitas pertanian yang dilakukan di kampus Al-Zaytun. Dikatakan, bahwa Al-Zaytun telah mulai mengadakan penelitian-penelitian tentang pangan. Ada kedelai dan beras. Beras yang diteliti adalah beras yang bisa dijual ke luar, yang orang internasional makan. Sementara kedelai, yang diteliti adalah kedelai yang bisa menyetop produk luar. Jadi, beras bisa dijual keluar, kedelai bisa menyetop produk luar. Syaykh mengatakan, jika ditanami dengan seksama, akan menjadi ketahanan pangan. Bisa dibayangkan, kedelai, kalau di Amerika hari ini 7,5 ton per hektare, di China 8 ton per hektare, di Indonesia umumnya 2 ton kurang/ha, kadang-kadang 1,8 ton, kadang-kadang 1,9 ton/ha.

Nah, penelitian Al-Zaytun tahun ini, bisa menemukan kedelai yang awalnya dari kampung, setelah diteliti secara pendidikan seperti mendidik manusia, ada kelas satu, dua, tiga dan enam. Nah



Syaykh dan Anas serius berbincang di tengah acara silaturahmi

sekarang sudah kelas enam, sudah dianggap lulus. Itu 100 butir beratnya 25 gram. Sedangkan kedelai Amerika dan China yang selama ini diimpor Indonesia, paling tinggi 22 gram. Kedelai ini Syaykh namai kedelai Indonesia. Sedangkan Anas, menurut Syaykh, bisa menamainya kedelai Jin Bun, sesuai nama dari Raden Patah di Demak.

Selain kedelai, Syaykh mengatakan bahwa Al-Zaytun juga punya tanaman kacang. Kacang ini sudah tujuh tahun menjalani proses penelitian. 100 biji kacang ini beratnya bisa 84 gram. Jadi bisa dibayangkan jika satu hektare itu bisa berapa. Rencananya dalam waktu dekat, Al-Zaytun akan menanam 5 ha. Kemudian tiga bulan ke depan, pada waktu panen rayanya, ketua umum dan sekjen dan rombongan Partai Demokrat akan diundang untuk memanen. Anas sendiri sudah menyatakan kesiapannya. "Yang memanen, sama-sama kita. Langit biru mengayomi kedelai, langit biru mengayomi kacang tanah, langit biru mengayomi Koshi Hikari," kata Syaykh.

Koshi Hikari di Mahad Al-Zaytun, menurut Syaykh, merupakan beras yang paling bagus di dunia. "Kemarin kami panen, tapi baru sedikit karena memang untuk penelitian, baru 50 kg yang bisa dimakan. Di Jakarta dijual yang super, Rp 100 ribu per kg. Di Indonesia, di Al-Zaytun ini sudah bisa ditanam. Nah, kalau kita sebarakan ke seluruh Indonesia, itu bisa kita ekspor," lanjut Syaykh.

Mengulang ucapan sebelumnya, Syaykh mengatakan supaya Indonesia tidak terlalu banyak mengimpor kedelai, mari kita tanam kedelai Jin Bun. Nanti panen rayanya akan diminta Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat untuk datang. Tapi nanti jika sekali lagi datang, Syaykh meminta agar datangnya jangan malam. Karena kalau malam, tidak ada yang bisa ditengok. Padahal kalau siang, bisa ditunjukkan banyak hal.

Menurut Syaykh, tanaman-tanaman inilah yang bisa mendatangkan kedekatan dengan rakyat. Sebab

pendekatan pada rakyat mesti dengan bahasa rakyat. Sementara bicara mengenai rakyat, kalau rakyat itu sudah bisa memiliki hasil satu bahu tanah bisa 7 ton, menurut Syaykh, itu baru luar biasa. Sebab di kampung-kampung, satu bahu itu sekarang paling 4 ton.

Memastikan kebenaran ucapannya, Syaykh sengaja menanyakan hal tersebut kepada Asmin, salah seorang tokoh masyarakat yang juga tokoh Partai Golkar di Kecamatan Gantar itu. Pernyataan Syaykh itu pun dibenarkan oleh Asmin. Dalam kesempatan itu, Syaykh kemudian memperkenalkan Asmin kepada tamu-tamu dari Partai Demokrat. Menurut Syaykh, Asmin ini merupakan dedengkot Golkar di desa dan kecamatan di mana Al-Zaytun berada. Saking dedengkotnya, sampai bisa mengantarkan Khoirunnisa, putri pertama Syaykh jadi anggota DPRD Indramayu pada Pemilu 2009 lalu. "Itu dia, senyum-senyum saja. Karena sudah aqil baligh, ya disuruh menyimpulkan sendiri saja omongan ayahandanya kemana arahnya," ujar Syaykh memperkenalkan Khoirunnisa. "Iyah, namanya juga obrolan pimpinan partai dengan orang yang menekuni pendidikan, iyah beginilah," kata Syaykh lebih lanjut.

Syaykh berharap, pertemuan ini gayung bersambut. Gayungnya juga mudah-mudahan jangan gayung kosong. Tapi gayung penuh air sehingga saling isi mengisi. Syaykh sendiri mengatakan yakin harapannya terwujud karena Anas dulu pernah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sementara Syaykh sendiri juga pernah jadi anggota HMI. "Nah ini (Syaykh), jelek-jelek juga pernah anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi kalau beliau di Jawa Timur, kemudian juga di pusat, kita cuma di sudut kampung, di Ciputat," kata Syaykh.

Syaykh mengatakan, sekarang juga masuk sudut kampung lagi. Tapi walau di kampung, Syaykh mengaku bangga. "Jadi kami ini tinggal di hutan belantara dan kami bangga dengan hutan belantara ini," ujarnya. Ditambahkan Syaykh, tanaman yang Presiden kampanyekan, trembesi, kini di kampus Al-Zaytun sudah besar-besar. Kemudian *Calophyllum Inophyllum* yang dulu Panglima Jawa Barat kampanyekan, juga sudah banyak dan sebentar lagi akan panen dan akan dibuat biodiesel dan lain sebagainya. Dan yang tiap hari panen di Al-Zaytun adalah oksigen. Di mahad ini oksigennya bagus karena tidak merokok, kemudian kendaraan bermotor juga tidak bebas.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Syaykh mengatakan SGSL atas



Ekspone Al-Zaytun dan pengurus Ormas Masyarakat Indonesia Membangun serius mendengar sambutan dari Anas Urbaningrum

kedatangan rombongan Partai Demokrat. SGSL, Sagu, yakni sudah sanggup menerima kedatangan Partai Demokrat. Gupuh, yakni sudah sabar menunggu, yakni dari sebelumnya janji jam dua tapi akhirnya baru tiba menjelang maghrib. Kemudian Suguh, yakni sudah disuguhi. Dan terakhir, Lungguh, yakni semua bisa duduk dengan baik, dimana Masyikhoh, yang pembangunannya dicitil selama 12 tahun dan baru selesai itu, yang menduduki pertama kalinya adalah Partai Demokrat.

"Jadi SGSL itu, saguh, gupuh, suguh, dan lungguh. Kata orang Indramayu itu. Sagu, siap. Gupuh, dari jam dua nunggu. Suguh, jelek-jelek juga sudah disampaikan. Lungguh, semua bisa duduk dengan baik. Karena apa? Tempat ini sudah 12 tahun dicitil-cicitil dibangun, nah yang mendahului masuk kok Partai Demokrat. Ini disengaja atau bagaimana? Dunia ini tidak ada yang tidak ditakdirkan. Semua adalah takdir Ilahi. Jadi diplomasinya tidak usah ajak-mengajak. Sudah panjenengan datang, sudah ngerti, wong partai kok. Partainya partai baju biru," ujar Syaykh.

Kepada peserta pertemuan dari ormas Masyarakat Indonesia Membangun, yang datang dari Ujungkulon sampai ujungwetan Anyer Panarukan, Syaykh juga mengatakan bahwa cerita pertemuan ini ya begitu saja. "Saudara harus paham. Mengajak nggak, melarang juga nggak. Begini saja. Tapi biasanya Ing ngarso sungtulodo," kata Syaykh.

"Sekian saja sebagai sambutan

silaturahmi. Mudah-mudahan ini awal daripada perjalanan kita yang sangat jauh ke depan. Karena Indonesia ini tidak ada batas umur dan kita berharap seperti itu. Perjalanan panjang sekali, dan ditentukan hari ini. Hari ini kita berbuat sesuatu yang baik ke depan, Indonesia tersenyum bahwa kelakuan kita baik. Kalau tidak seperti itu, umpamanya sebaliknya, Indonesia juga tidak sedih karena masih banyak orang Indonesia yang bisa berbuat baik. Untuk itu, daripada tidak berbuat baik, mari kita semua berbuat baik untuk Indonesia.

Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita bersama, untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, kami berdoa pada Allah untuk pimpinan bangsa ini, Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan beliau selalu diberi kekuatan. Disihatkan oleh Allah memimpin bangsa ini sampai batas tugas yang dipercayakan oleh rakyat pada beliau. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi kekuatan untuk maju ke depan mencapai cita-citanya, merdeka untuk membangun," tutup Syaykh.

Sebelum bertolak pulang malam itu, Anas dan rombongan menyerahkan sambutan dan cenderamata kepada Al-Zaytun, yakni dukungan pendidikan, sebuah Kamus Arab-Indonesia, sajadah, dan Pandel Partai Demokrat. Sementara itu, Al-Zaytun juga memberangkatkan rombongan Partai Demokrat dengan oleh-oleh berupa beras, pisang dan beberapa hasil pertanian dari Mahad Al-Zaytun.

■ BI/marjuka-hotsan

Energi Penggerak Kemajuan Bangsa



WAWANCARA KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT ANAS URBANINGRUM: Al-Zaytun kami nilai sebagai salah satu potensi bangsa. Kalau ini bisa sinergi dengan Partai Demokrat, berarti energi positif ini bisa menjadi tenaga penggerak kemajuan bangsa.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum didampingi Sekjen, Edhie Baskoro Yudhoyono dan beberapa pengurus Partai Demokrat lainnya, Kamis 17 Maret 2011 berkunjung ke Mahad Al-Zaytun di Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Sebagai pengurus teras partai, kunjungan yang dilakukan pada saat masih jauh dari musim kampanye ini menjadi menarik.

Untuk mengetahui latar belakang, kesan dan hasil dari kunjungan tersebut, Ch. Robin Simanullang bersama Marjuka Situmorang dan Bantu Hotsan dari *Majalah Berita Indonesia* mewawancarai Anas Urbaningrum di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu 23 Maret 2011. Berikut petikan wawancara tersebut.

Apa kesan Bung Anas terhadap Al-Zaytun, khususnya setelah berkunjung ke sana?

Saya kenal Al-Zaytun sudah lama tapi belum pernah hadir kunjungan, silaturahmi. Karena itu, yang paling pokok buat saya adalah silaturahmi dengan Syaykh dan seluruh keluarga besar Al-Zaytun. Dan saya ingin tahu, melihat langsung seperti apa Mahad Al-Zaytun yang sudah mashyur, terkenal itu.

Saya membuktikan dengan hadir di sana bahwa memang pesantren Al-Zaytun itu punya nilai yang khas, pesantren modern yang dikelola dengan baik. Dan saya kira, menjadi salah satu aset pendidikan nasional dan aset kemajuan bangsa.

Bagaimana pandangan Bung Anas dengan visi yang Al-Zaytun usung, yakni sebagai pusat pendidikan toleransi dan perdamaian?

Itu kan dua isu yang penting. Toleransi itu mutlak dibutuhkan untuk bangsa yang majemuk. Indonesia ini bangsa yang majemuk, masyarakatnya majemuk. Tanpa toleransi, konflik akan mudah pecah. Pertentangan akan mudah muncul. Karena itu, tradisi toleransi harus dibangun.

Membangun tradisi toleransi, salah

satunya lewat pendidikan. Ditanamkan sejak dini lewat jalur pendidikan bahwa saling toleransi pada masyarakat yang majemuk itu sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Perdamaian tentu sama, isu yang sangat penting. Bukan hanya dalam konteks nasional tapi juga dalam konteks hubungan internasional.

Toleransi itu juga basis untuk membangun perdamaian. Perdamaian itu juga basis untuk terus menerus mengembangkan toleransi. Jadi saya kira dua spirit itu sebetulnya menyatu dan penting untuk dikembangkan. Jadi kalau Al-Zaytun mengusung dua visi itu di dalam pendidikannya, menurut saya akan punya kontribusi yang besar bagi Indonesia masa depan.

Sepanjang pengetahuan Bung Anas, bagaimana implementasinya atau pelaksanaannya selama ini?

Dari pola komunikasi yang terbangun selama ini antara Al-Zaytun dengan masyarakat luas, saya kira dipraktekkan. Yang penting itu kan, nilai-nilai spirit itu bukan dipajang, tetapi dipraktekkan. Al-Zaytun yang terbuka, Al-Zaytun yang membuka diri, bergaul dengan masyarakat luas, itu menjadi tanda bahwa Al-Zaytun berikhtiar mempraktekkan spirit dasar itu.

Mungkin Bung Anas juga mengetahui bahwa masih ada yang kurang bisa memahami kehadiran mahad ini. Bagaimana pendapat Bung Anas mengenai hal itu?

Itu bukan sesuatu yang aneh. Hal seperti itu harus diterima sebagai realitas. Yang penting adalah terus melakukan ikhtiar berkomunikasi, mengomunikasikan apa yang dilakukan oleh Al-Zaytun. Kemudian terbuka untuk didatangi oleh tamu-tamu dengan latar belakang yang beragam. Dan yang paling penting adalah Al-Zaytun membuktikan secara terus menerus, misinya itu betul-betul untuk membangun toleransi dan perdamaian, dan juga menjadi lembaga pendidikan yang konsisten memproduksi SDM-SDM yang berkualitas. Kalau itu konsisten dilakukan, ya itulah jawabannya. Sejarah nanti akan membuktikan.

Tentang isu NII yang dikaitkan dengan mereka, bagaimana Bung Anas melihatnya?

Saya tidak ingin masuk dalam konteks politik ya. Saya hadir di sana, salah satu menu sambutannya adalah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan bersemangat, dengan penghayatan yang tinggi, buat



saya itu punya nilai keindonesiaan yang tinggi.

Buat Partai Demokrat, NKRI itu final. Dan menurut saya, Indonesia juga memandang NKRI itu final.

Dalam tampilan seperti itu, Al-Zaytun dalam pengamatan Bung Anas juga komit terhadap NKRI?

Iya, yang saya temui di sana seperti itu. Yang saya temukan ketika silaturahmi, seperti itu. Dan yang paling penting adalah keluarga besar Al-Zaytun membuktikan dalam pemikiran, sikap dan perilaku sosial, perilaku politik sehari-hari, bahwa NKRI itu final. Jawaban yang paling manjur itu adalah dengan bukti-bukti yang nyata.

Kalau komitmen dengan NKRI dibuktikan, contohnya, saya temukan misalnya di sana usaha merintis varietas baru kacang tanah, kacang kedelai, padi. Itu buat saya, komitmen kepada bidang pertanian, komitmen pada petani, komitmen kepada rakyat kecil, komitmen untuk memajukan bangsa. Jadi menurut saya, tidak perlu fokus pada debat verbal, tapi yang penting bekerja saja membuktikan apakah pekerjaan itu baik untuk Republik atau tidak. Kalau baik untuk Republik berarti berkomitmen untuk Republik, untuk

NKRI.

Jadi kalau saya, hanya sesederhana itu.

Berkunjung ke Al-Zaytun oleh Ketua Umum Partai Demokrat, bagaimana pun bernuansa politik. Apa harapan Partai Demokrat setelah kunjungan itu?

Politik bagi Partai Demokrat itu bukan semata-mata pemilu. Bukan semata-mata perolehan suara, bukan semata-mata perolehan kursi. Itu politik yang sempit. Tentu semua partai berpikir tentang itu, termasuk Partai Demokrat. Tapi konsep politik Partai Demokrat lebih besar dari itu. Politik Partai Demokrat itu adalah bekerja yang terbaik untuk bangsa. Karena prinsipnya itu, maka kami ingin membangun sinergi dengan seluruh kelompok di Indonesia, seluruh eksponen bangsa di Indonesia untuk sama-sama memajukan bangsa. Karena itu, kami hadir silaturahmi ke Al-Zaytun yang kami nilai sebagai salah satu potensi bangsa. Kalau ini bisa sinergi dengan Partai Demokrat, berarti energi positif ini bisa menjadi tenaga penggerak kemajuan bangsa. Begitupun dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Pesantren-pesantren yang lain.

Jadi kalau ada sinergi dan semuanya bekerja untuk kepentingan bangsa, itulah politik yang terbaik. Apalagi kalau kemudian punya manfaat langsung kepada penguatan eksistensi partai. Punya manfaat langsung untuk dukungan terhadap eksistensi Partai Demokrat tentu kami merasa bersyukur kalau itu bisa dilakukan. Tetapi itu hanya bagian kecil dari politik Partai Demokrat.

Kemudian ada pembicaraan bahwa kehadiran Bung Anas itu memang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tetapi Bung Anas bilang datang membuka baju, datang bersilaturahmi antara junior kepada seniornya. Apa maknanya?

Iya, silaturahmi itu kan substansinya dalam. Dan nilai silaturahmi itu mengatasi segala-galanya. Dalam satu ikatan partai, tetapi kalau tidak ada silaturahmi yang kuat, ia kehilangan makna. Belum menjadi satu keluarga besar partai, tetapi kalau silaturahmi terbangun dengan baik, itu maknanya penting sekali. Saya memegang etika dan akhlak Timur, etika dan akhlak Islam, bahwa yang muda itu menghormati yang lebih tua. Karena itu, salah satu spirit saya dan kawan-kawan hadir ke Al-Zaytun adalah karena saya



Anas Urbaningrum (kanan) ketika wawancara dengan Berita Indonesia di kediamannya, 23 Maret 2011

Sinergi yang terbaik itu kan berbasis visi. Kalau visinya sama, maka untuk membangun bangsa, untuk membangun Indonesia, tinggal nanti diterjemahkan di dalam program aksi dan kegiatan.

lebih muda dan beliau lebih senior. Jadi kalau junior *sowan* ke senior dan menyampaikan rasa hormat, itu bagian dari etika. Dan buat saya, itu nilainya jauh lebih penting dari hal-hal yang simbolik, seperti baju, jaket, atau bendera.

Tetapi yang saya agak *surprise*, beliau mempersiapkan diri dengan sangat-sangat maju. Buat saya, baju beliau, baju biru itu, punya makna dan pesan politik yang penting. Itu menurut saya bagian dari kearifan politik dari Syaykh.

Tadi Bung Anas bilang, kalau sinergi ini dipadukan untuk membangun bangsa ini. Itu idealnya, tapi secara praktis harus terus menerus ada penggalangan dalam rangka dukungan tadi. Apa langkah Partai Demokrat berikutnya?

Tentu intesitas silaturahmi akan dijaga dan ditingkatkan. Bahkan sudah ada *follow up* yang dirintis. Misalnya, akan menanam 5 ha kacang dengan varietas yang bagus. Ketika panen nanti, kami akan hadir lagi untuk panen raya. Juga sedang dikembangkan ormas Masyarakat Indonesia Membangun, nah itu juga nanti bisa sinergi di seluruh Indonesia, jaringan itu untuk bekerja memajukan daerah. Yang lain-lain tentu sambil jalan bisa dilakukan. Buat saya yang paling penting adalah, karena setrumnya sudah ketemu, baterainya sudah nyambung. Kalau sudah seperti itu, soal kegiatan lebih pada soal teknis di lapangan. Intinya adalah, setrumnya sudah nyambung.

Dalam rencana Bung Anas, bagaimana ormas Masyarakat Indonesia Membangun yang dibina Syaykh itu akan disinergikan dengan Partai Demokrat?

Sinergi yang terbaik itu kan berbasis visi. Kalau visinya sama, maka untuk membangun bangsa, untuk membangun Indonesia, tinggal nanti diterjemahkan di dalam program aksi dan kegiatan. Kalau nyambung, di dalam kegiatan-kegiatan, menurut saya itu sesuatu yang sudah sangat positif, karena partai itu kan kegiatannya bukan hanya politik. Partai itu kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan nonpolitik kan banyak sekali. Jadi bisa nyambung di sana.

Atau ormas, kegiatannya kan tidak hanya nonpolitik. Ormas itu juga ada kegiatan yang berwajah politik. Itu juga bisa disambungkan. Yang penting adalah sudah ada kesepahaman tentang sinergi. Sekali lagi, bentuk-bentuk kegiatan itu soal teknis operasional dari sinergi itu yang tidak sulit untuk dilakukan.

Bukan mengecilkan arti Bung Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tapi pengaruh Ketua Dewan Pembina di Partai Demokrat itu masih sangat kuat. Bagaimana kemungkinannya silaturahmi, sinergi ini bisa dikomunikasikan dengan Ketua Dewan Pembina?

Ketua Dewan Pembina (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) sudah tahu, mengerti. Tidak ada kegiatan di DPP Partai Demokrat yang beliau tidak ketahui. Dan kami melakukan itu salah satunya karena salah satu prinsip politik yang diajarkan oleh Pak SBY adalah perbanyak komunikasi, perbanyak silaturahmi, kembangkan semangat persahabatan, persaudaraan dengan seluruh elemen bangsa. Karena tidak ada satu elemen bangsa pun yang layak dijauhi, apalagi dijadikan musuh. Tidak ada satu elemen bangsa pun yang kita nilai sebagai kekuatan destruktif. Semuanya adalah kekuatan yang konstruktif untuk kemajuan bangsa. Nah, prinsip-prinsip itu yang kami pegang, apalagi dengan Al-Zaytun yang selama ini sudah menampilkan diri sebagai lembaga pendidikan dan jaringan kemajuan yang berkembang di Indonesia. Karena itu, satu kata yang kemarin menjadi kesepahaman adalah rintisan untuk membangun sinergi.

■ BI

George Toisutta

Maju Terus Pantang Mundur

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta menyatakan tetap siap dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSSI.

Hal itu dipastikan saat bertemu dengan Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN) di Hotel Gran Melia, Kuningan (24/3).

"Saya dan juga Arifin Panigoro siap," katanya dalam jumpa pers se usai pertemuan. Baginya, adanya upaya resistensi dari PSSI melalui pe-

ngalihan pemegang hak suara merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. "Apapun yang dilakukan silakan, teman-teman saya di PSSI sekarang sangat cerdas dan tidak akan membuat sesuatu di luar aturan," katanya.

Kesiapan pria kelahiran Makassar, 1 Juni 1953 ini juga didukung sejumlah mantan pemain tim nasional sepak bola Indonesia. Mereka menilai George Toisutta jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2011-2015 mampu membawa kemajuan pres-



tasi sepak bola Indonesia yang kini tengah terpuruk. ■



Susno Duadji

Vonis Buat Peniup Pluit

Majelis hakim PN Jakarta Selatan memvonis mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji dengan hukuman 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Jenderal bintang tiga itu juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 4 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.

Suami dari Herawati itu disebut terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Hapusan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kapolda Jabar dengan memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilu-kada Jawa Barat pada 2008 untuk penggunaan yang tidak semestinya. Majelis menilai, perbuatannya tersebut merugikan negara Rp 8,1 miliar. Atas putusan itu Susno, Sang Peniup Pluit mafia hukum dan mafia pajak itu langsung mengajukan banding. ■ **mulit**

Edhie Baskoro Yudhoyono

Calon Menantu Hatta Rajasa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dikabarkan bakal besanan. Jika tak ada aral melintang, April ini, putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas akan melamar Siti Ruby Aliya Rajasa, putri sulung Hatta Rajasa.

Kabar bahagia itu juga diamini salah seorang petinggi PAN, Ahmad Faisal. Dari informasi yang berhasil dihimpun, jalinan asmara antara Ibas dengan Aliya sudah berlangsung cukup lama. Namun baru tahun

ini, Ibas memberanikan diri untuk melamar Aliya yang usianya 6 tahun lebih muda itu.

Sebelumnya, tahun 2009 kabar pernikahan dua sejoli itu sempat ramai dibicarakan, apalagi secara politik, SBY dan Hatta dikenal sangat dekat. Setidaknya hal itu dapat terlihat dengan selalu dilibatkannya Hatta sebagai menteri dalam kabinet SBY.

Mengenai rencana lamaran dan pernikahan Ibas-Aliya, seorang sumber yang dekat dengan keluarga itu menyatakan bahwa dua tanggal spesial telah dipilih untuk perhelatan pen-



ting itu, yakni tanggal ulang tahun keduanya. Untuk lamaran dipilih tanggal 26 April 2011 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Aliya yang ke-25, sedangkan pernikahan tanggal 24 November 2011 bertepatan dengan ulang tahun ke-31 Ibas yang lahir pada 24 November 1980. ■

Ulil Absar Abdalla

Teror Bom Buku

Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Absar Abdalla mendapat paket berisi bom buku pada Selasa (15/3). Namun sebelum sampai di tangan Ulil, bom itu meledak saat dicoba dijinakkan oleh polisi tanpa prosedur lazim. Sejumlah orang termasuk Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur Kopol Dodi

Rahmawan terluka.

Menurut Ulil, bom itu tidak terkait dengan JIL, tapi dengan kiprahnya sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Ulil menyebut bahwa selama sepuluh tahun menjadi ketua JIL, ia tidak pernah mendapat ancaman dari siapa pun. "Pesanan yang dikirim bom ini jelas mengarah pada aktivis HAM

yang selama ini memperjuangkan pluralisme," kata Ulil saat ditemui di lokasi ledakan, di Kantor JIL, Utan Kayu, Jakarta, Timur, Rabu (16/3).

Menurut Ulil, aktor di balik bom buku yang baru pertama kali terjadi di Indonesia ini sangat pintar dan cerdas. Termasuk motif memasukkan gelar 'Lc' pada nama pengirim yang



merupakan gelar akademik agar mengarah kepada kelompok tertentu. "Menurut saya sangat cerdas dengan menggunakan gelar khas kelompok tertentu, ini permainan profesional, untuk beri teguran, bukan mence-derai," katanya. ■

Kasus Suap yang Janggal

Puluhan anggota dan mantan anggota DPR sudah menjadi tersangka bahkan sebagian sudah divonis. Namun siapa pemberi suap dan apa motivasinya masih gelap. KPK dianggap “tebang pilih” dan menjadi macan ompong dalam menangani kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior BI, Miranda Swaray Goeltom.

Kasus suap yang janggal. Demikian kesimpulan kita bila memperhatikan jalannya penuntasan kasus dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS - BI), Miranda Swaray Goeltom tahun 2004 lalu. Siapa pun tahu, disebut telah terjadi tindak pidana suap jika sudah ada dua pihak, yakni pemberi dan penerima. Sebaliknya, tidak mungkin ada penerima jika tidak ada yang memberi. Namun dalam kasus yang sering dinamai kasus suap *traveler's cheque* (cek perjalanan) ini, pihak pemberi tak kunjung jelas.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis bersalah empat mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penerima suap cek perjalanan, yaitu Dudhie Makmun Murod (F-PDIP), Endin AJ Soefihara (F-PPP), Hamka Yandhu (F-Golkar), dan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri). KPK juga menetapkan 26 anggota dan mantan anggota DPR lainnya yang diduga ikut menerima cek perjalanan itu sebagai tersangka. Namun, Miranda S Goeltom dan Nunun Nurbaeti sebagai orang yang disebut-sebut paling tersangkut dalam kasus ini, statusnya masih mengambang.

Seperti diketahui, kasus ini pertama kali terungkap setelah mantan anggota DPR 1999-2004 dari Fraksi PDI-P, Agus Candro “bernyanyi” ke KPK, melaporkan bahwa ia telah menerima duit dalam bentuk *traveller's cheque* senilai Rp 500 juta terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior tahun 2004.

Skandal suap ini semakin terkuak setelah digelarnya sidang perdana dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod, Senin (8/3/2010). Dalam dakwaan dinyatakan bahwa anggota DPR dari PDI-P itu diperintahkan Sekretaris Fraksi PDI-P periode 1999-2004, Panda Nababan untuk mengambil dan membagikan *traveler's cheque* senilai Rp 9,8 miliar. Dari persidangan itu, terungkap pula bahwa kasus ini bermula pada awal Mei 2004. Dimana saat itu Komisi IX DPR melaksanakan uji kepa-

tutan dan kelayakan atau *fit and proper test* dalam rangka pemilihan DGS-BI. Pemilihan DGS sendiri ketika itu diikuti oleh Budi Rochadi (Kepala perwakilan BI di Tokyo), Hartadi Sarwono (Deputi BI), dan Miranda S Goeltom (Deputi BI).

Kemudian, pada Juni 2004, Dhudie bersama dengan anggota Komisi IX melakukan rapat internal di ruang rapat fraksi PDI-P lantai 1 gedung Nusantara I DPR. Dalam rapat itu, hadir juga anggota DPR dari fraksi PDI-P lainnya, di antaranya, Tjahjo Kumolo selaku Ketua Fraksi dan Panda Nababan selaku Sekretaris Fraksi PDI-P. Dalam rapat ini, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa untuk pemilihan DGS-BI aksi PDI-P akan mencalonkan dan mendukung Miranda Goeltom. Tjahjo Kumolo meminta anggota Fraksi PDI-P pada Komisi IX untuk mengamankan dan berkonsentrasi penuh dalam pemilihan tersebut.

Berkas dakwaan terdakwa Dudhie Makmun Murod itu juga memaparkan adanya pertemuan berikutnya yang dipimpin Tjahjo Kumolo, di ruang rapat fraksi lantai VI gedung DPR. Dalam pertemuan ini, Tjahjo kembali memberikan arahan dan mengatakan bahwa anggota fraksi PDI-P harus menjaga soliditas suara karena telah bersepakat untuk memilih Miranda sebagai DGS-BI. Saat itu, Panda Nababan ditunjuk sebagai Koordinator Pemenangan Miranda.

Selanjutnya, Dhudie juga menghadiri pertemuan pada hari Sabtu, 29 Mei 2004 di klub Bimasena ruang Dwarawati Hotel Dharmawangsa Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Miranda Goeltom, Tjahjo Kumolo, Panda Nababan, Izedrik Emir Moes, Max Moein, dan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P lainnya. Pertemuan ini disebutkan, untuk mendengar visi dan misi Miranda.

Pada 8 Juni 2004, melalui mekanisme voting, Miranda pun akhirnya memenangkan pemilihan untuk masa jabatan 2004-2009 tanpa penolakan yang berarti.

Sesaat setelah acara pemilihan, Dhudie



Mantan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia

kemudian dihubungi Panda Nababan melalui telepon untuk menemui seseorang bernama Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo di restoran Bebek Bali, komplek Taman Ria Senayan. Di sana, dia menerima titipan dari Nunun Nurbaeti berupa *traveler's cheque* Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp 9,8 miliar. Setelah menerima *traveler's cheque*, Dudhie kemudian menerima saran dari Panda untuk membagikan cek perjalanan itu kepada anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P. Dudhie sendiri disebut mendapat bagian 10 lembar *traveler's cheque* BII senilai Rp 500 juta.

Setelah Dhudie dan tiga temannya divonis, banyak proses hukum yang sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ini, seperti pemeriksaan saksi dua calon DGS yang menjadi kompetitor Miranda, serta pemeriksaan tersangka-terdakwa dari fraksi lain. Awal tahun 2011 ini, KPK menahan 19 mantan anggota DPR periode 1999-2004 terkait kasus ini. Mereka ditahan sejak 28 Januari 2011. Kini para tersangka ditahan di empat rumah tahanan (rutan) yang berbeda, masing-masing di Rutan Salemba, Rutan Cipinang, Rutan Pondok Bambu, dan di Rutan Polda Metro Jaya. Dari 19 tersangka itu, sebagian besar sudah diproses dan tetap di dalam bui. Tapi anehnya, meski banyak anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa, terdakwa maupun tersangka, soal siapa pemberi suap dan apa moti-



ia, Miranda Gultom (kiri) dan Nunun Surbakti (kanan)

vasinya hingga saat ini belum terungkap sedikit pun.

Kondisi ini tak urung membuat banyak pihak merasa heran dan keberatan. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso misalnya, mengaku heran dengan tindakan KPK yang lebih mendahulukan menahan politisi karena diduga menerima suap dibanding pemberi suap. Menurut Priyo, KPK seharusnya menangkap pemberi suap terlebih dahulu sebelum menangkap para politisi tersebut. Politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris juga mendesak KPK agar menghukum mantan DGS BI, Miranda S Gultom. Jika tidak, Partai Golkar dan PDI Perjuangan menurutnya dikhawatirkan akan mengambil langkah politis.

Politisi Partai Golkar Paskah Suzetta, yang juga tersangkut dengan kasus ini, berpendapat sama. Menurutnya, seharusnya ditetapkan dulu siapa pemberi, baru penerima suap. "Negeri ini dibangun oleh hukum. Maka, konstruksi hukumnya harus betul," katanya di Gedung KPK, saat menjalani pemeriksaan, Jumat (28/1/2011). Paskah mengatakan, jika KPK ingin menjunjung tinggi keadilan, semua pihak yang terkait dugaan suap pemilihan DGS-BI harus didudukkan dalam posisi sama. Artinya, tidak boleh ada perbedaan. "Ini soal perlakuan yang tidak *equal*. Dalam kasus Miranda Gultom ini, judulnya kasus Miranda, tetapi kenapa dia enggak diapa-apa-in," ujar Paskah.

Panda Nababan, politisi PDI-P yang

sudah ditahan dalam kasus ini, juga mempertanyakan mengapa KPK tak kunjung memeriksa dan menetapkan status yang sama kepada penyuaunya. Agus Tjondro juga mengungkapkan hal yang sama. Agus mengatakan, lebih cepat kasus ini diproses akan lebih baik. Agar tahu siapa penyuaunya.

Enam politisi PDI-P yang menjadi tersangka dalam kasus ini, yakni; Poltak Sitorus, Max Moein, Jeffrey Tongas Lumban Batu, Soetanto Pranoto, Muhammad Iqbal, dan Ni Luh Mariani Tirtasari juga sebelumnya pernah menggugat balik KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka minta KPK menghentikan kasus ini dan membayar ganti rugi Rp 25 miliar. Alasan mereka, pemberian cek itu tidak terkait pemilihan DGS BI tahun 2004 yang dimenangi Miranda S Goeltom. Tapi sebagai sumbangan sah dari dua perusahaan milik Nunun Nurbaety kepada PDI-P untuk kampanye pemenangan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dalam Pilpres/Wapres 2004. Kuasa hukum mereka, Petrus Selestinus juga mengatakan, hingga kini KPK terbukti belum mampu mengusut pemberi cek perjalanan. Padahal, ini harus diungkap.

Sebenarnya, Miranda S Goeltom setidaknya sudah dua kali diperiksa KPK, yakni pada Rabu 28/10/2009 dan Selasa 2/11/2010. Namanya juga sudah dimasukkan Ditjen Imigrasi dalam daftar orang yang dicekal. Namun, belum juga dite-

apkan sebagai tersangka.

Nunun Nurbaeti yang dianggap merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan suap Rp 24 miliar ini bahkan belum bisa dihadirkan walau hanya sekadar memberi kesaksian. Sudah berkali-kali istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun ini dipanggil KPK tapi tidak pernah berhasil karena wanita ini disebut sedang mengalami sakit lupa. Kini, malah beredar kabar bahwa Nunun sebenarnya sudah tidak berada di Indonesia. KPK hanya mengaku masih terus berupaya.

Selama ini, sidang Pengadilan Tipikor baru bisa mengungkap keberadaan Arie Malangjudo sebagai pihak perantara antara Nunun dengan anggota Fraksi Partai Golkar, PPP, PDI-P, dan TNI/Polri. Akan tetapi keberadaan sponsor besar di balik pemberian cek perjalanan tersebut hingga kini masih gelap.

Arie Malangjudo adalah mantan Dirut PT Wahana Esa Sejati, perusahaan milik Nunun. Dalam beberapa kali sidang, Arie menyebutkan bahwa dia hanya perantara yang mendapat tugas dari Nunun untuk mengantarkan cek perjalanan kepada beberapa tersangka.

Secara terpisah, Koordinator Indonesia Budget Center Arif Nur Alam mengatakan, KPK harus bisa mengungkap siapa yang memiliki dana dalam kasus cek perjalanan tersebut. Untuk itu, KPK seharusnya menyelidiki perusahaan-perusahaan yang selama ini diduga terlibat. "Agar tidak diskriminatif karena yang selama ini dijerat dalam kasus itu adalah si penerima. KPK harus membuka siapa yang memiliki uang untuk aliran cek perjalanan itu," katanya. Arif menuturkan, selain perusahaan yang diduga memberikan dana, pihak ketiga sebagai distributor cek perjalanan itu juga harus diungkap KPK.

Dalam persidangan terungkap, nama-nama perusahaan yang disebut adalah PT First Mujur Plantation (Artha Graha Group), PT Bank Artha Graha Tbk (Artha Graha Group), PT Wahana Esa Sejati dan PT Wahana Esa Sembada (keduanya milik Nunun Nurbaeti Daradjatun).

Setelah sekian lama penyelidikan kasus ini, publik mulai pesimis kalau pelaku penyuaupan bisa terbongkar. Rasa pesimis itu salah satunya disampaikan anggota Komis III DPR Bambang Susatyo. "Saya berani menyimpulkan ada tangan-tangan kuat yang tidak terlihat bermain di tubuh institusi-institusi penegak hukum kita," katanya (26/3/2011).

Bambang menduga, beberapa nama yang disebut-sebut terlibat sebagai penyuaup, kemungkinan besar akan lolos. Alasannya, karena anggota dewan yang sudah divonis terdahulu dijerat dengan dakwaan gratifikasi sedangkan dalam kasus gratifikasi, pemberi hadiah tidak dapat dihukum. ■ MS

Meneg KUKM Syarif Hasan Koperasi Sudah Menjadi Sokoguru

Koperasi sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian nasional diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil. Bahkan kini koperasi telah hadir sebagai “Sokoguru” pelaku ekonomi. Salah satu indikator kuat, dari 52,7 juta pengusaha, 99,9 persen merupakan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang semuanya bergerak di sektor usaha mikro dimana 177.483 unit koperasi termasuk di dalamnya.

Hal itu dikemukakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan kepada wartawan *Berita Indonesia* Samsuri dan Bantu Hotsan dalam wawancara di kantornya di Rasuna Said, Jakarta (22/3/2011). Dijelaskan, salah satu upaya yang tengah dilakukan dalam program Kementerian Koperasi dan UKM dalam memperkuat peranan koperasi adalah menciptakan koperasi-koperasi berskala besar dengan harapan dapat menjadi pemain.

Caranya dengan menempatkan tiga koperasi di setiap provinsi sebagai ikon koperasi Indonesia. Nantinya dari 99 koperasi berskala besar tersebut diharapkan akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Berikut petikan wawancara soal perkoperasian tersebut.

Kami melihat perkembangan yang cukup signifikan pada perkembangan UKM seperti banyaknya bank dari luar negeri yang memberikan bantuan terhadap UKM?

Bukan bantuan, tapi pinjaman. Kalau bantuan itu dikasih aja, kredit begitu.

Itu artinya bahwa pasar, *demand* (permintaan) kita itu sangat menjanjikan dan *demand* itu sangat besar. Bayangkan saja ada 237 juta rakyat Indonesia, inikan merupakan *demand* yang besar. Kemudian ada sekitar 52,7 juta pengusaha UKM dan 99,9 persen itu 'kan dari sektor mikro. Jadi dapat dibayangkan *demand* yang ada kemudian disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, sehingga sangat menarik bagi investor.

Hal ini sangat memungkinkan karena sumber daya alamnya sangat banyak,

sumber daya manusianya banyak. Selain itu, pemerintah juga selalu memberikan kemudahan. Jadi dengan *demand* yang ada, kemudian dengan *opportunity* yang bagus mengakibatkan kebutuhan. Dan sektor UKM ini menjadi incaran bank-bank yang besar. Jadi kalau ada bank-bank luar negeri yang ikut bermain di mikro, yaitu karena ia melihat semua itu.

Sejauh ini realisasinya sudah ada?

Kalau data-data yang ada bagus. Kreditur saja sudah hampir 38 triliun rupiah. Tahun kemarin saja kita ada 17,22 triliun rupiah. Padahal kita kerja itu hanya sekitar 3 kuartal, tidak satu tahun. Banyaknya program-program dari pemerintah juga. Jumlah pengusaha, para debitur juga meningkat. Dalam rentang waktu tiga tahun meningkat hampir 4,5 juta. Jadi sangat prospektif sekali.

Dari peembangan yang ada, sejauh mana peran UKM dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik?

Sangat tinggi. Kemarin saja tingkat kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional 56,5 persen. Kalau dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 5,9 persen, tahun 2010 itu pasti lebih tinggi lagi. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi 2010 lebih besar dari tingkat pertumbuhan ekonomi 2009. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi 2011 ini, pasti akan semakin tinggi. Pada tahun 2009 saja 56,5 persen, apalagi nanti.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi semakin bagus?

Ya, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, jumlah pengusaha UKM dan koperasi serta pengusaha mikro juga semakin meningkat. Itu pasti, output atau hasilnya juga pasti meningkat.

Sekarang kalau bicara tentang UKM ini tidak lepas dari berbagai pihak agar lebih berkualitas dan perlu dibuktikan.

Sejauh mana UKM atau Koperasi lebih berkualitas, baik produksinya, inovasi dan hal-hal lain yang masih





Syarief Hasan: Kendala yang sering dihadapi UKM adalah akses untuk kredit dan pemasaran

banyak menentukan?

Jadi yang penting, di samping kuantitas yang kita kejar, kualitasnya juga perlu. Dua-duanya perlu, kenapa? Dari segi kuantitas rakyat kita 'kan banyak. Kemiskinan masih tinggi 13,3 persen. Kemudian pengangguran juga masih tinggi 7,1 persen. Ini harus ditekan semua.

Kalau ini ditekan semua tentunya kita harus memperluas *scope*-nya. Sembari memperluas *scope*-nya kita harus memperdalam, harus ada peningkatan kualitas dan kapasitas. Karena persaingan yang semakin tinggi, baik persaingan dalam negeri maupun dari pasar global. Apalagi dunia sekarang, pasarnya sudah terbuka. Jadi kualitas perlu, tetapi kuantitas juga perlu.

Jadi kalau bisa harus berbarengan ya?

Harus berbarengan.

Sejauh ini untuk UKM, yang menjadi kendala yang cukup signifikan apa sebenarnya?

Kendalanya yang paling signifikan yaitu akses untuk kredit, akses ke bank. Kedua adalah pemasaran. Sedangkan akses untuk kredit kita sudah mulai ada kredit usaha rakyat. Bantuan-bantuan dari kementerian sudah mulai dibenahi, diatasi satu-satu. Sehingga kredit usaha rakyat sudah mulai bagus. Kemudian pemasaran juga sudah mulai bagus.

Smesco UKM yang kita berikan, semua pelaku UKM kita suruh untuk melakukan ekshibisi di sana. Ke luar negeri juga membawa mereka (pelaku usaha-red). Jadi *constraint*, hambatan yang terjadi itu, satu-satu dibenahi, khususnya akses kepada pembiayaan sama pemasaran.

Kekuatan dari koperasi maupun UKM ini tidak terlepas dari jaringan

yang ada. Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memperkuat ekspansi dalam negeri maupun ke luar negeri yang sudah dibangun kementerian?

Agak beda mungkin ya... persepsinya. Kalau jaringan itu 'kan diartikan masih bagian dari kita. Sementara ke luar negeri, bukan. Jaringan kita harus membuka network kerjasama dengan institusi yang menyangkut pemasaran. Membuka akses dengan pasar duluan, harus melakukan kerjasama dalam melakukan ekshibisi dan sebagainya. Terus menerus, tidak bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi pemasaran. Hal yang sama juga dilakukan dalam negeri. Semua produsen harus rajin-rajin melakukan sosialisasi. Pemerintah juga mendukung dengan memberikan akses jaringan maksudnya. Kemudian konsumen juga harus membantu. Kalau khusus untuk produk dalam negeri harus mencintai produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar. Itu juga membantu.

Terus untuk persaingan tingkat global?

Kalau untuk persaingan tingkat global pertama, harus ada kesiapan kualitas. Kalau untuk koperasi dan UKM saya mengharapkan tidak harus muluk-muluk. Lebih bagus harus menguasai pasar dalam negeri saja dulu. Pasar yang ada dalam negeri oleh pelaku usaha koperasi dan UKM betul-betul bisa dikuasai, sebagai *market leader* dalam negeri. Kalau koperasi dan UKM itu memiliki akses kapasitas untuk bermain di pasar global, kita dorong.

Tapi di antara itu, ada yang sudah bermain?

Sudah ada, kita bawa ke luar negeri untuk pameran. Sudah mulai banyak, tapi tentunya kita selektif sekali. Jangan sampai ke luar negeri malah bangkrut.

Ada indikator bahwa pertumbuhan secara makro itu sangat bagus. Tapi pertumbuhan secara mikro, khususnya di sektor riil itu, kurang mendukung secara maksimal. Bagaimana peran koperasi agar mampu mendukungnya secara maksimal?

Kalau mau lihat pertumbuhan ekonomi harus dilihat secara komprehensif. Dilihatlah pertama, pertumbuhan telekomunikasi, infrastruktur, perkebunan, pertanian, jasa keuangan berapa persen. Pertanian ini 'kan kebanyakan usaha mikro di situ. Begitu juga dengan perdagangan. Kalau kita lihat sektor kredit, sekarang kita lihat usaha mikro. Kredit yang disalurkan kepada usaha mikro itu, banyak mikro atau banyak yang gede? Jadi harus ada parameter yang terukur.

Kemudian jasa keuangan berapa persen. Jasa keuangan itu yang paling tinggi ada dimana? Di bursa, nah...bursa ini yang bukan mikro. Jadi dari parameter semua itu, dimana mikronya, dimana yang bukan mikro. Jadi membaca pertumbuhan ekonomi harus secara komprehensif. Keliru kalau ada yang mengatakan kalau tingkat pertumbuhan mikro itu tidak disertai dengan kualitas. Cukup bagus. Karena apa? Sebanyak 99,9 persen itu kebanyakan dikuasai oleh koperasi dan UKM. Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus.

Ada harapan bahwa koperasi, suatu saat menjadi sokoguru perekonomian nasional?

Sekarang sudah jadi sokoguru. Sekarang karena 99,9 persen itu adalah kebanyakan UKM yang termasuk di dalamnya koperasi. Koperasi ada 177.483 unit. Bisa dibayangkan baik dari segi kuantitas, UKM sama koperasi. Jadi sudah menjadi sokoguru, mereka pelaku ekonomi. Karena mereka pelaku, maka bisa dikatakan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.

Sekarang ada pemikiran-pemikiran berkembang seperti ekonomi liberal yang mempengaruhi terhadap ekonomi kerakyatan. Sementara di sisi lain, koperasi lebih banyak karena mengarah kepada ekonomi kerakyatan. Bagaimana dampak ekonomi liberal ini, apa tidak ada kekhawatiran karena pondasi perekonomian nasional akan hilang?

Kenapa mesti takut ekonomi liberal. Yang salah itu kalau kita mengadopsi semua

ekonomi liberal, itu yang salah. Kalau sepanjang itu bagus untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak? Koperasi itu memangnya hanya ada di Indonesia saja. Koperasi juga lahir di Eropa. Koperasi di Amerika juga maju, negara liberal. Tetapi koperasi yang ada di sini kita adopsi sesuai dengan kultur kita.

Ekonomi liberal itu ada bagusnya. Kata siapa ekonomi liberal itu jelek semua, ada bagusnya. Ada ekonomi yang selalu diproteksi. Siapa bilang ekonomi yang menyangkut proteksi itu, jelek semuanya. Ada juga pentingnya, karena ekonomi yang memerlukan intervensi, itu juga demi kepentingan rakyat.

Jadi ekonomi yang kita bangun di Indonesia ini adalah ekonomi yang menganut paham kedua-duanya, ekonomi tengah. Apa yang bagus untuk rakyat di ekonomi liberal kita ambil. Apa yang bagus di ekonomi yang memerlukan intervensi dari pemerintah juga kita ambil. Dikenal dengan ekonomi komunis, ekonomi terpimpin yang dikontrol oleh pemerintah. Kalau ekonomi liberal di pasar dibebasin. Kalau ini dikontrol, semuanya kita ambil, kita serap.

Mungkin ada yang menjadi cita-cita Bapak terhadap koperasi ini agar menjadi kekuatan yang paling unggul?

Saya menginginkan koperasi Indonesia itu betul-betul, bukan sebagai pemain yang skala kecil atau menengah. Ke depan koperasi itu, bisa juga bermain di kelas atas. Sehingga kami memiliki program di sini menciptakan koperasi-koperasi yang berskala besar. Kami di sini menciptakan minimal di setiap provinsi itu ada tiga

koperasi yang benar-benar sebagai ikon koperasinya Indonesia. Nantinya ada 99 koperasi di Indonesia, betul-betul bisa bersama-sama bersaing dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan internasional di Indonesia. Kita harapkan bisa begitu.

Kapan implementasinya?

Kita sudah jalan.

Mungkin ada daerah tertentu yang sudah mulai menonjol?

Oh... banyak. Contoh saja, koperasi yang ada di Pekalongan, asetnya sudah hampir Rp 2 triliun. Salah satu koperasi Kalimantan Barat, sudah Rp 500 miliar. Kemudian di Jakarta ada koperasi karyawan PGRI, di Jawa Tengah, Nasari hampir 800 miliar. Kemudian di pondok pesantren Jawa Timur, Koperasi Sidogiri Rp300 miliar. Jadi banyak. Suatu saat nanti kita akan menciptakan koperasi-koperasi yang begitu besar, kita dorong.

Harapan untuk kondisi perekonomian Indonesia?

Saya berharap membangun bangsa ini ada kebersamaan ke depan. Siapapun dia, dimanapun, apapun statusnya, mari sama-sama kita bangun ekonomi dan bangsa kita ke depan. Karena sekarang ini kita sudah mulai bagus. Dunia luar mengakui bahwa apa yang kita lakukan, pembangunan ekonomi, politik, sosial, itu sudah bagus. Ini harus dipelihara dan dijaga. Harus ada kebersamaan untuk membangun bangsa. Kalau dilakukan maka tidak mustahil tahun depan itu, lima atau sepuluh tahun lagi, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terbesar di dunia. ■



WAWANCARA: Wartawan Berita Indonesia, Samsuri (kiri) saat mewawancarai Meneg KUKM Syarif Hasan di kantornya (22/3/2011).

Minta KPK Usut Kasus Bansos Batam

Bukti dan saksi dugaan korupsi Bansos di Pemkab Batam sudah ada. Dua tersangka bahkan sudah ditetapkan, tapi tersangka utama atau intelektualnya belum terjangkau kejaksaan. Mungkinkah ada 'permainan' dalam kasus ini?

Kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) periode 2006-2009, yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, hingga saat ini tak kunjung tuntas. Bansos yang seharusnya untuk kaum duafa dan organisasi sosial itu diduga dikorupsi secara berjemaah.

Pertengahan Januari 2011 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menetapkan dua tersangka kasus Bansos fiktif, yakni Kabag Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Keuangan Raja Haris. Keduanya juga telah dicebloskan ke Rutan Baloi. Tanggal 18 Januari 2011 kejaksaan juga memeriksa kasir keuangan Pemko Batam Halidah alias Pipin selama sepuluh jam.

Penahanan dua pejabat ini sedikit membuat masyarakat Batam merasa senang, tapi masih jauh dari rasa puas, karena aktor yang diduga otak kasus ini, yaitu Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Agusshiman belum juga tersentuh hukum. Erwinta dan Raja Haris pun diduga hanya tumbal.

Sekadar kilas balik, kasus Bansos yang merugikan negara sekitar Rp 23 Miliar ini mulai mencuat ketika dokumen pertanggungjawaban keuangan dana Bansos Pemko Batam tahun 2009 terungkap. Dalam dokumen itu tertulis bahwa sejumlah yayasan yatim piatu, pengelola Masjid, Mushola serta organisasi sosial tercatat sebagai penerima dana Bansos lengkap dengan proposal, kwitansi tanda terima, dan cap/stempel organisasi. Ternyata ketika dicek, sejumlah pimpinan lembaga yang disebut penerima itu membantah pernah menerima dana Bansos sebagaimana tertera dalam LPJAPBD (Laporan pertanggungjawaban Jawaban APBD). Tidak terima namanya dicatut, mereka pun kemudian mengadukan penyimpangan itu ke Kejari Batam.

Tidak lama setelah mempelajari pengaduan tersebut, Kejari Batam yang ketika itu dipimpin Tatang Sutarna menyebut menemukan sejumlah kegagalan. Sebelum Tatang dimutasi ke Jakarta, pria yang cukup terbuka pada wartawan itu sempat mengumumkan pajabat Pemkot Batam yang diduga terlibat dalam kasus ini, yaitu Walikota Batam Ahmad Dahlan; Sekdako, Agusshiman; Kabag Keuangan, Erwinta Marius; Asisten III, Maaz Ismail; Bendahara Keuangan, Raja



Walikota Batam Ahmad Dahlan.

Haris; dan kasir, Halidah alias Pipin.

Hasil penyidikan Tatang itu tak urung membuat pejabat Pemkot Batam babakar jenggot. Mereka pun mengadakan perlawanan dengan mengherankan demo ke kantor Kejari Batam. Di Jakarta, Kejaksaan Agung juga dikabarkan mendapat surat kaleng yang meminta kasus Bansos ini tidak dilanjutkan, dan meminta Tatang Sutarna dicopot dan dimutasi dari Batam. Tatang Sutarna sendiri mengaku pernah kedatangan tamu yang mencoba menyuapnya agar tidak mengungkap kasus itu. Oknum itu diutus dari Jakarta dengan inisial "D". Namun suap itu ditolak Tatang.

Tapi Tatang tidak bisa menuntaskan kasus ini karena ia kemudian dimutasi jadi Kasubdit Pidana Umum di Kejaksaan Agung. Di Kejari Batam, ia digantikan oleh Ade Edi Adiyaksa.

Berbeda dengan Tatang, keseriusan Ade E. Adiyaksa menuntaskan kasus ini belum tampak sejak menjabat pada Mei 2010. Meski dari segi yuridis kasus Bansos sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, namun Kejari masih kesulitan mengungkapkannya. Di sinilah akhirnya timbul pertanyaan masyarakat, apakah mungkin ada permainan di balik penuntasan kasus ini?

Melihat penanganan yang berlarut-larut, bahkan terkesan ada upaya melindungi pelaku utama, masyarakat pun belakangan mengharapkan KPK mau

mengambil alih penanganan kasus ini.

Firdaus, tokoh masyarakat sekaligus pemilik salah satu yayasan yang namanya dicatut sebagai penerima Bansos, merupakan salah seorang yang paling getol menginginkan campur tangan KPK itu. Keinginannya itu cukup beralasan, sebab dari pengalamannya, kejaksaan tampak kurang terbuka membongkar kasus tersebut. Pada Rabu 2 Maret 2011 lalu misalnya, Firdaus sengaja datang ke kantor Kejari Batam di Batam Centre untuk menemui Ade E. Adiyaksa, guna menanyakan perkembangan kasus ini, tapi tidak berhasil bertemu karena Kepala Kejari itu katanya tidak punya waktu. Firdaus pun akhirnya hanya menemui Kasi Pidsus, Abdul Faried saja.

Kepada Abdul Faried, Firdaus menanyakan sudah sampai dimana penanganan kasus Bansos dan mengapa kejaksaan tidak mampu mengungkap aktor intelektualnya. Dengan mengajukan bukti dua tersangka yang sudah ditahan, Faried mengatakan pihaknya sudah bekerja secara profesional. "Jangan bapak bilang Kejaksaan tidak sanggup menangkap tersangka, ini butuh proses pak," kata Faried.

Firdaus tidak puas dengan jawaban itu. Ia menginginkan aktor intelektualnya, yakni Ahmad Dahlan dan Agusshiman segera diperiksa dan ditangkap. Untuk itu, Firdaus mengaku siap jadi saksi di persidangan. Mendapat dukungan demikian, Faried menjanjikan masalah Bansos akan tetap dilanjutkan. Saat ini menurutnya pihaknya terbentur surat persetujuan dari gubernur. Sementara mengenai kesediaan Firdaus jadi saksi, Faried mempersilahkan Firdaus memasukkan data identitas dirinya ke Kejaksaan.

Mencoba menguak adanya percobaan suap dalam kasus ini, Firdaus kepada wartawan menceritakan bahwa pada tanggal 2 April 2010, ia pernah bertemu dengan Ahmad Dahlan di lobby Hotel Sarifan Pasific Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, walikota ditemani istrinya, dan beberapa orang lainnya. Sedangkan Firdaus ditemani Jamaludin Sagala. Pada kesempatan itu, Firdaus mengaku orang-orang walikota sempat menawarinya uang puluhan juta rupiah dan memintanya tidak mempublikasikan berkas-berkas bukti kasus Bansos.

Kini, dengan modal kesaksian itu, Firdaus menantang kejaksaan dan KPK untuk membongkar kasus ini. Jika Kejaksaan membongkar kasus ini, ia mengaku siap menjadi saksi. Kepada KPK, dengan lantang ia mengatakan, "Saya tantang KPK, berani nggak usut kasus Bansos ini." ■ RID

Hukum

Pakai Aturan atau Pribadi

Hakim mengesampingkan ketentuan hukum dengan menyatakan berwenang mengadili perkara walau di luar wilayah hukumnya. Setelah kalah, penggugat melapor ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Runyam

Muhtadi Asnun, SH. MH yang kini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta, ternyata masih meninggalkan setumpuk persoalan di tempat tugasnya yang lama di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Kalimantan Timur. Mantan Ketua PN Tarakan itu bersama majelis hakim yang dipimpinnya diadukan ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia atas tuduhan penerapan hukum yang salah dalam gugatan perkara perdata.

Selain data yang sudah disampaikan pelapor, Kepala Biro Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial RI, Eddy Hary Susanto juga sudah meminta bukti-bukti lainnya atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim terlapor. Jika tuduhan itu benar, berarti borok yang mencoreng wajah peradilan di negara tercinta ini bertambah satu lagi.

Kasus ini menjadi pembicaraan hangat di Tarakan, terlebih setelah mantan Ketua PN Tarakan itu ditahan dan dinyatakan terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan. Seperti disampaikan Moh Arief Petta Nganro dalam pengaduannya ke KY: mantan Ketua PN Tarakan, Muhtadi Asnun, SH. MH bersama majelis hakim yang dipimpinnya telah mengadili gugatan perkara perdata yang tidak berada di wilayah hukumnya, yakni obyek sengketa yaitu lahan tanah maupun tergugatnya tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan.

Diceritakan Moh Arief Petta Nganro, enam tahun lalu ia membeli lahan seluas 18 hektare (Ha) di Sungai Lagub, Desa Tagul, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dari seorang bernama Kumis, warga Desa Payang Kec Lumbis, Nunukan. "Saya berencana menanam jati super dan mahoni di lahan itu," paparnya kepada *Berita Indonesia*. Namun, sekitar pertengahan tahun 2006, PT Mandiri Inti Perkasa mendirikan bangunan berupa *basecamp* dan perumahan di lahan tersebut, tanpa persetujuannya.

Mengaku tak mengerti soal hukum, kecuali karena merasa haknya dirampas orang, Moh Arief Petta Nganro, melalui



Moh Arief Petta Nganro: *Mohon keadilan dan penerapan hukum yang benar.*

kuasa hukumnya Tumbuh Ompu Sunggu, SH. M.Hum menggugat perusahaan yang berkantor pusat di Komp Sentra Latumenten, Jl Prof DR Latumenten No. 50 Jakarta Barat ini ke PN Tarakan. Arief Petta sendiri ketika itu tidak tahu jika PN Tarakan sebenarnya tidak berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan Undang-undang. Namun nyatanya, pengaduannya diterima PN Tarakan.

Ketika itu, hakim menjatuhkan putusan sela yang menyatakan PN Tarakan berwenang mengadili perkara perdata tersebut walaupun kasus yang diperkarakan di luar daerah hukumnya. "Saya tidak tahu motivasi di balik keinginan hakim PN Tarakan memeriksa perkara ini," kata Arief. Menurut tokoh masyarakat Bugis ini, majelis hakim tampaknya tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan ke objek sengketa itu.

Tentang gugatan Arief terhadap PT Mandiri Inti Perkasa, PN Tarakan ke-

mudian pada tanggal 8 Agustus 2007 memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp309.000. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Juni 2008 juga kembali menguatkan putusan PN tersebut dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000.

Belakangan setelah menyadari duduk permasalahannya, Moh Arief pun mengajukan majelis hakim itu ke KY di Jakarta dengan tuduhan bahwa majelis hakim PN Tarakan yang memeriksa perkaranya waktu itu telah mengesampingkan ketentuan hukum sesuai pasal 118 ayat (3) HIR pasal 142 ayat (5) RBG dan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.2 Tahun 1986.

Sementara itu, PN Nunukan sesuai surat Nomor W18-9/774/PDT.01.5/XI/2010 tanggal 9 November 2010 yang ditandatangani Ketua PN Nunukan, Puji Hendro Suroso, SH, juga menerangkan bahwa objek sengketa itu berada di dalam wilayah hukum PN Nunukan.

"Wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dan karenanya, apabila suatu wilayah desa, kecamatan, berada dalam wilayah Kabupaten Nunukan, itu berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Pasal 2 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Nunukan," demikian antara lain isi surat tersebut.

Sementara itu, menurut sumber di PN Tarakan, ketiga hakim yang mengadili perkara itu dulu, kini sudah pindah. Mantan Ketua PN Tarakan, Muhtadi Asnun, SH. MH kini menjadi penghuni LP Cipinang, Jakarta terkait suap yang diterimanya saat menangani kasus Gayus H Tambunan di PN Tangerang. Sementara Dariyono, SH kini disebutkan menjadi ketua PN di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, sementara Salman Alfaris, SH kini menjadi hakim di PN Ungaran, Jawa Tengah.

Namun ketika ditanya lebih jauh, sumber tersebut menolak memberi banyak komentar. "Mahkamah Agunglah nanti yang memastikan di mana letak perkara itu di antara pribadi atau aturan yang berlaku, karena kasusnya sudah di MA," katanya. Sebab, Komisi Yudisial RI Bidang Pengawasan Kehormatan, Keleluhan Martabat dan Perilaku Hakim belum menangani kasus ini.

■ SLP

Purwakarta Menata Pola Birokrasi

Sistem administratif birokrasi terdahulu akan dipertajam melalui pola kepemimpinan yang terukur dan tepat guna.

Tiga tahun memimpin Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH sukses membangun infrastruktur hingga ke desa. Kini jalan hotmik, air bersih, serta listrik tidak lagi hanya dinikmati masyarakat di kota Purwakarta tetapi juga masyarakat desa. Atas keberhasilan itu, sang Bupati ini kini mendapat acungan jempol dari warganya, khususnya warga desa. Pada tahun 2011 ini, bupati kreatif ini kembali meluncurkan program baru, yakni melakukan perbaikan dan penataan pelayanan publik dan menggali kembali budaya 'Rereongan'.

Usai melantik beberapa pejabat baru di lingkungan Pemkab Purwakarta beberapa waktu lalu, Dedi menjelaskan, bahwa pada tahun 2011 ini ia akan mengadakan perubahan mendasar siklus manajemen pelayanan publik, yaitu dari sistem administratif ke sistem administratif adaktif dan faktual. Jadi jika dalam sistem administratif kebirokrasian terdahulu pelayanan pemerintahan hanya didasarkan pada ketepatan, disiplin orientasi kerja dan kerapian menyusun administrasi tanpa melihat output dan outcome dari program itu sendiri, sehingga seringkali pelayanan masyarakat tertunda karena perangkat sistem administrasi kebirokrasiannya belum seluruh selesai, maka tahun ini akan dipertajam melalui pola kepemimpinan yang terukur dan tepat guna.

"Untuk itu, peran pimpinan daerah termasuk Bupati serta jajaran di bawahnya harus berani mengambil risiko, untuk hal-hal yang dianggap di luar kebiasaan dan berbeda dengan kebijakan seperti biasanya. Karena garis birokrasi kita itu, sebenarnya tergantung dari pimpinan birokrasinya, yaitu pimpinan daerah. Artinya, kalau pimpinan daerahnya tidak bisa melakukan hal-hal di luar kebiasaan tadi, maka bisa jadi staf di bawahnya pun tidak bisa melakukan hal-hal yang baru," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, setiap kebijakan yang diambil pimpinan daerah, yakni hal baru yang dianggap melenceng dari kebiasaan, namun masih sesuai kebijakan yang sama, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu menurut Dedi, sudah saatnya kebijakan yang diambil pemerintah adalah buah akibat dari respon-respon positif keinginan dan kebutuhan masyarakat yang diayominya.

Di Dinas Kesehatan misalnya, hal itu menurut Bupati bisa dicapai manakala Dinas Kesehatan dengan cepat merespon



Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

kebutuhan masyarakat dari sisi kesehatannya. Ia mengakui saat ini banyak masyarakat mengalami tingkat penyakit yang tergolong parah dan memerlukan tindakan medis yang serius. Untuk itu ke depan, Dinas Kesehatan harus mampu menjawabnya.

Sedangkan dalam hal peluncuran program 'Beas Perelek' dan 'Rereongan', Dedi menjelaskan bahwa respon pemerintah terhadap persoalan kemasyarakatan harus segera direvitalisasi secara kelembagaan. Selama ini respon pemerintah mengatasi permasalahan sosial, seperti masalah gizi buruk, penangan orang sakit dan yang lainnya menurutnya sering dilakukan atas inisiatif Bupati sendiri. Secara kelembagaan, hal itu diakuinya tidak diperbolehkan karena Bupati sudah melangkahi tugas OPD yang bersangkutan. Tetapi jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan berakibat buruk terhadap rakyat yang seharusnya secepat mungkin mendapat bantuan.

Untuk itu, Dedi mengatakan perlu adanya langkah kongkret dari pemerintah yang bersifat penanganan cepat dan menyeluruh tanpa keluar dari garis birokrasi. Namun, penanganan dan langkah-langkah itu juga tidak boleh merusak tatanan budaya dan tradisi di tengah

masyarakat. Malah seharusnya pemerintah mengarahkan rakyatnya untuk menumbuhkan dan menghidupkan kembali tradisi yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Mengambil contoh dari kepemimpinan Presiden Soeharto, ketika itu pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya dengan budaya gotong royong. Menurut Dedi, tradisi Sunda pun sebenarnya telah mengajarkan itu dengan tradisi 'Beas Perelek', yakni tradisi mengumpulkan beras sekepalan tangan (*sacangeum leungeun*) setiap rumah dalam sehari, yang kemudian dikumpulkan dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk keperluan masyarakat banyak. Hal mana dirasa cukup efektif mengatasi masalah sosial di tengah masyarakat saat itu.

Menurut Dedi, sebenarnya saat ini pun, jika 'Beas Perelek' terus dilakukan, khususnya oleh masyarakat Purwakarta, tradisi itu akan memberikan pengaruh signifikan mengatasi permasalahan sosial. Contohnya, *Rereongan Sabatang Rokok* dari setiap pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta jika dikumpulkan ternyata telah berhasil membangun beberapa rumah warga dalam bentuk kegiatan bedah rumah.

Untuk ini, Dedi telah memerintahkan ASSDA 1 Bidang Pemerintahan dan Kabag Kesra dan dibantu para camat, mulai tanggal 10 Maret 2011 segera mensosialisasikan hal ini dengan mengumpulkan para Kepala Desa se Purwakarta guna menindaklanjutinya. Menurutnya, Kepala Desa harus segera merealisasikan program ini kepada warganya. Jika dalam saatnya tidak ada kejelasan realisasi program ini, Dedi berjanji akan mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada Desa itu, baik berupa pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) atau pemotongan dan pemberhentian honorarium Desa bersangkutan.

Sementara itu, adapun pejabat yang dilantik di lingkungan Pemkab Purwakarta Tanggal 08 Maret 2011 lalu menurut adalah: Drs. H. Padil Karsoma, M.Si, dari sebelumnya sebagai Sek. Dinkes, menjadi Kabag Kesra menggantikan Drs. Andrie Chaerul yang menjadi ASSDA II. Sedangkan Carma Rukhiat, S.Sos, dari jabatan awal sebagai Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menjadi Sek. Dinkes. Kemudian Agus Sulistriyanto, S.Sos, M.Si dari sebelumnya sebagai Kasi Angkutan Persampahan Bidang Pengelolaan Sampah DKP menjadi Kabid Pengelolaan Sampah DKP.

■ BERNARD

Pemkab Humbahas Respon Positif PWH

Bupati dan PWH berkomitmen menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial dengan baik.

Kehadiran Persatuan Wartawan Humbahas (PWH) mendapat respon yang baik dari jajaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas). Keberadaan PWH diyakini akan dapat bekerja sama dengan Pemkab Humbahas sesuai dengan fungsinya sebagai kontrol sosial. Respon baik Pemkab Humbahas itu terbukti dengan diterimanya pengurus dan anggota PWH ke ruangan Bupati Humbahas dalam rangka sambung rasa dan ramah tamah antara PWH dengan Bupati Humbahas.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWH Porman Tobing didampingi pengurus lainnya menyampaikan pernyataan sikap PWH secara tertulis kepada Bupati. Pernyataan sikap itu pada intinya mendukung sepenuhnya Visi Misi Pemkab Humbahas dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri, serta siap mengawal kebijakan pemerintah kabupaten selama dipandang membela kepentingan rakyat. Dan sebagai social control,

PWH juga siap mengkritisi kebijakan maupun kinerja aparat di jajaran Pemkab Humbahas apabila dipandang menyimpang dari semestinya.

Tidak lupa, pada kesempatan itu PWH juga meminta agar Bupati menempatkan Kabag Humas definitif yang benar-benar mengerti dan mengetahui tugas dari wartawan.

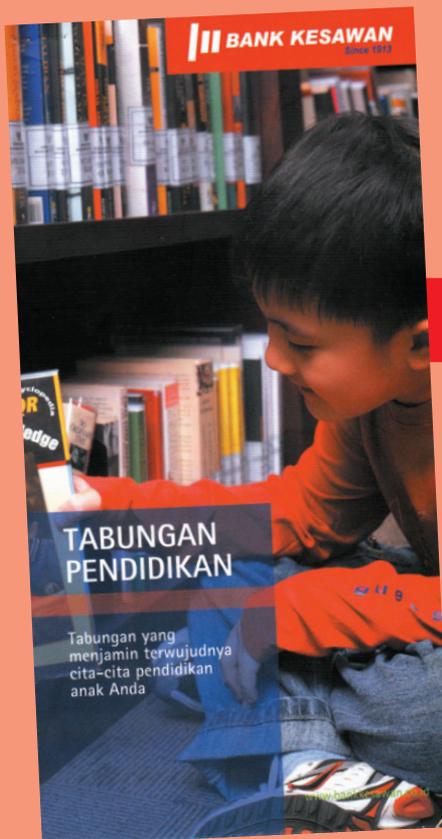
Sebaliknya, Bupati Humbahas Drs. Maddin Sihombing, Msi juga menyampaikan harapan agar kemitraan dan kerjasama Pemkab dengan pers dapat berjalan harmonis sesuai dengan fungsi pers sebagai social control dan menjadi sarana publikasi serta memberikan masukan atau kritik membangun kepada Pemkab Humbahas demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menuju visi Pemkab menjadikan Humbang Hasundutan Sejahtera dan Mandiri (HUTAMAS).

Menurut Porman Tobing, pernyataan sikap PWH itu merupakan hasil kesepakatan semua anggota PWH dalam

Rapat Anggota Perdana yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011 di kantor PWH Jl. Singamangaraja No 75 Doloksanggul. Sementara itu, PWH menurut Porman, didirikan bukan untuk menyaingi organisasi pers lain, tapi murni didasari kemauan para wartawan yang peduli dengan daerah Humbang Hasundutan. "Dengan menyatukan persepsi, tanpa membatasi hak-hak jurnalis, maka kinerja dari jajaran Pemkab Humbahas akan dapat terkawal dengan baik," ujar Porman.

Sementara itu, kepada seluruh jajaran SKPD Humbahas, Porman menghimbau apabila ada wartawan yang mengatasnamakan PWH untuk kepentingan sendiri agar tidak dilayani dan diminta segera melaporkannya ke sekretariat PWH.

Menanggapi kehadiran PWH ini, Poskota memberikan nilai Plus karena dalam usianya yang relatif muda PWH sudah mampu menyediakan kantor di tempat yang strategis serta memenuhi peralatan kantor sebagaimana perlunya. Untuk tugas mengetik surat-surat dan dalam melayani administrasi kantor, PWH juga telah menempatkan tenaga yang profesional. ■ **PM**



Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S.Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat **merencanakan biaya pendidikan** anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari **1 tahun sampai 20 tahun** dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya **mulai dari Rp. 100.000,-** atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan **Rp5 juta**. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan **asuransi jiwa**. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan **santunan duka sebesar 250%** dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta **bebas biaya transaksi ATM** untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari **12.000 mesin ATM** yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.

Perkuat Modal Asuransi

Permodalan perusahaan asuransi di Indonesia makin kuat. Asuransi kerugian/umum yang tahun 2011 hanya diharuskan memiliki modal awal Rp 40 miliar, 2012 meningkat jadi Rp 70 miliar, dan 2014 menjadi Rp 100 miliar. Sesuai peraturan pemerintah, bila tidak mampu memenuhi itu, perusahaan diharuskan merger atau tutup.

Sementara itu, prospek asuransi tahun 2011 cukup menggiurkan. Indikatornya, pembangunan infrastruktur seperti di Kementerian Pekerjaan Umum misalnya, meningkat dan terbesar dalam sejarah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kondisi ini jelas merupakan kabar baik bagi perkembangan asuransi nasional. PT Jasa Raharja Putera (JP), salah satu perusahaan asuransi dalam negeri menyambut baik indikasi tersebut, apalagi melihat perkembangan JP belakangan ini.

Menurut Dirut PT Jasa Raharja Putera, Zayad Ghani, dengan 26 cabang dan 106 kantor pemasaran JP yang tersebar di Indonesia, Zayad semakin optimis melihat prospek perasuransian nasional. Sebab



Zayad Ghani

dari sisi permodalan, JP memiliki permodalan Rp 380 miliar, jauh melampaui ketentuan yang mengharuskan peru-

sahaan asuransi memiliki modal minimum Rp 100 miliar pada tahun 2014, maupun peraturan lain tentang *aquity* Rp 250 miliar.

Dari segi pemeringkatan, dimana predikat *tri angle* "AAA" merupakan kategori terbaik, JP juga telah menyandang predikat "A", posisi yang bagus saat ini bagi JP. Walau demikian, Zayad mengaku belum berpuas diri. "Tapi kami belum berpuas diri dan berusaha secara maksimal menuju predikat AAA," ujarnya.

Berbagai indikator, berupa pendapatan premi, JP kini di posisi 14 dari 84 asuransi di Indonesia. Sementara di asuransi, JP bertenggar di 10 besar dan dari segi keuntungan setelah pajak, JP di posisi ke 9. Di mana JP saat ini agak tertinggal dari segi pendapatan premi, maka sektor ini menjadi perhatian khusus JP pada tahun 2011 ini agar masuk 10 besar seperti dua sektor lainnya. "Target 2011, tumbuh 24 persen dibanding tahun lalu. Berbagai kalkulasi yang realistik dan melihat prospek asuransi semakin menjanjikan, dimana tahun 2008 JP mendapat ISO 9001, kami optimis target tercapai," tuturnya. ■ RI

Menuju Pelayanan Berkualitas

Membuat pelayanan berkualitas kadang sulit dipraktekkan, apalagi menyangkut pelayanan publik yang memiliki variasi beragam dan person yang dilayani memiliki latar belakang yang satu sama lain berbeda. Tapi meningkatkan kualitas pelayanan yang menjadi obsesi Jasa Raharja (JR) patut mendapat apresiasi.

Optimisme bahwa pelayanan yang berkualitas itu dapat diterapkan, diungkapkan Hj. Rusmilawaty, Kepala Cabang Jasa Raharja (JR) Jawa Barat. Menurutnya, kualitas pelayanan itu sendiri memiliki tolok ukur, acuan, dan terukur. Di internal, dalam bidang proses sampai ke tahap pembayaran santunan, acuannya adalah UU No.33/34 tahun 1964 dan kebijakan perusahaan yang diimplementasikan secara tepat.

Di Jawa Barat, JR, kepolisian, dan rumah sakit menurutnya merupakan mitra strategis yang diperkuat hubungan yang baik dengan pemda, khususnya Gubernur dan para Bupati/walikota se Jawa Barat. Seperti saat peresmian outlet JR di antara pelayanan jemput bola, diresmikan oleh Gubernur Jabar dan dihadiri Walikota-Bupati. "Penting bagaimana memperkuat tingkat koordinasi. Ini kuncinya," kata satu-



Perjalanan Moda Transportasi: Mendapat perlindungan JR

satunya perempuan yang menjabat kepala cabang JR di Indonesia itu.

Sosialisasi bahwa Jasa Raharja sebagai asuransi masyarakat Indonesia, kata Hj Rusmilawaty, makin disambut masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat umum dilakukan JR sebulan dua kali sedangkan ke masyarakat setingkat SMA dan perguruan tinggi sebulan sekali. Dari data, sekitar 66 persen masyarakat Jabar pun sudah mengenal Jasa Raharja, sebuah respon positif.

Masyarakat pun semakin merasakan manfaat keberadaan JR. Buktinya, ketika ada masyarakat yang terkena musibah kecelakaan, ahli waris korban

sudah tahu proses pengurusan santunan. Padahal sebelumnya, merasa tidak pernah membayar premi asuransi, saat ada di antara masyarakat yang terkena musibah kecelakaan, ahli waris korban tidak mau menerima santunan. Setelah diberi penjelasan, mereka akhirnya menerima dan bekal-kali ucapkan terima kasih, "Inilah perhatian pemerintah melalui JR," ujar Rusmilawaty.

"Ini tolok ukur. Mewujudkan pelayanan berkualitas. Saya berharap masyarakat mengenal JR bukan pada saat mereka kena musibah, tapi masyarakat mengenal JR secara utuh. Artinya, bahwa masyarakat selama bepergian merasa aman. Dimanapun mereka bepergian merasa ada yang melindungi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

"Memang diakui, percepatan proses santunan terkait instansi lain, seperti laporan terjadinya kecelakaan dari kepolisian dan rumah sakit, namun kita optimis kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik dan semangat kita sama, semua saling mendukung. Untuk kepentingan masyarakat yang kena musibah dan bagaimana meringankan beban masyarakat yang kena musibah," lanjutnya. ■ RI

Menangkan Kompetisi Melalui

Berbisnis jangan yang biasa-biasa saja tapi perlu inovatif, kreatif dan berbagai terobosan. Bila perlu ada lompatan-lompatan, baik kinerja maupun strategis bisnis.

Sebagai salah satu BUMN di bidang industri strategis dan manufaktur, PT LEN semakin mempertegas komitmen dengan mengembangkan keunggulan produksi (*comparative advantage*) yang inovatif dan memanfaatkan peluang pasar yang semakin bervariasi dan menjanjikan.

Bisnis yang dikembangkan melalui jaringan sinergi dan memiliki *market share* yang tepat, termasuk kebutuhan khusus. Dari prospektif kualitas, kemampuan rekayasa dan kreasi yang berorientasi terhadap pengembangan *core competencies* telah menjadi menu utama perusahaan yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung ini.

Menurut Deputy Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Irnanda Laksanawan, PT LEN telah mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Dalam mendukung industri pertahanan, transportasi (*signaling*), tenaga surya dan penguasaan teknologi terbaru. Ke depan, sebagai salah satu industri unggulan yang turut mendukung group pertahanan, group energi terbaru, group telekomunikasi, group transportasi, maupun berbagai inovasi lain, produk LEN dipercaya banyak instansi pemerintah dan swasta di Indonesia maupun mitra luar negeri.

Sebagai salah satu industri di bidang strategis, menurut Irnanda, di antara produk PT LEN industri sudah go internasional. Peran LEN diharapkan semakin besar dalam memberikan penguatan dan sinergi antar BUMN, terutama dalam menghadapi persaingan global yang tanpa batas dan dimensinya. "Saya mengharapkan, perusahaan di bidang industri strategis agar siap bersaing di tingkat lokal, regional maupun global," tutur Irnanda.

Lebih lanjut Irnanda mengharapkan, BUMN di Indonesia, khususnya bidang usaha industri strategis dan manufaktur, secara bersama dan maksimal mendukung percepatan pembangunan nasional. Sebagaimana arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perlu adanya kemandirian bangsa melalui penciptaan nilai tambah, peningkatan kemampuan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Irnanda mengatakan, penguasaan teknologi tinggi, berdaya saing tinggi sesuai *market share* yang menguntungkan perlu dikembangkan. Sementara belum mampu



Irnanda Laksanawan

membuat dan terpaksa impor. "Kita butuh perlakuan adil. Seperti barang impor industri pertahanan dan berbagai proyek besar, bebas pajak, saat kita beli komponen impor sekaligus terkena pajak. Kami berharap perlakuan yang sama dan mendapat insentif pajak/fiskal. Itu sudah diusulkan," katanya.

Irnanda optimis, 2011 ini industri strategis tumbuh semakin pesat. Dan sesuai harapan, atau dimungkinkan melampaui target. Melihat peluang bisnis dan kondisi perekonomian yang tumbuh signifikan, ia yakin akan lebih survive dibanding tahun sebelumnya.

"Seperti dikatakan Presiden SBY, jangan bisnis seperti *do not be mediocre* atau jangan biasa-biasa saja, tapi perlu inovatif, kreatif, dan berbagai terobosan baru. Bila perlu membuat berbagai lompatan-lompatan dari kinerja maupun cara berbisnis, sehingga tercipta nilai tambah, sisi bisnis maupun performance perusahaan," kata Irnanda kepada *Berita Indonesia*.

Bisnis to bisnis

Secara terpisah, Direktur Marketing PT LEN, Abraham Mose menyatakan, performance PT LEN semakin maju. Hal itu menurutnya, tidak lepas dari adanya perhatian pemerintah dan berbagai produk LEN yang memang sesuai harapan customer. Seperti 2011, inovasi dan rekayasa rancang bangun dan teknologi yang dikembangkan LEN, baik teknologi tinggi maupun teknologi terbaru yang tepat guna, diharapkan memberi nilai tambah bagi perusahaan dan menjadi bagian dari

dinamika pembangunan nasional.

Di bidang bisnis to bisnis, ungkapnya, seperti transportasi kereta api (*signaling*), produk sistem sinyal buatan PT LEN yang terpasang lebih dari 21 stasiun dan tersebar di Jawa dan Sumatera, energi surya, navigasi, telekomunikasi dan melaksanakan Road Map TITO (*Treat In Treat Off*), modernisasi fiber optic, baik primer maupun sekunder. Tahun 2011 ini, LEN menjadi bagian konsorsium proyek single identifikasi (KTP nasional).

Sementara di navigasi udara, LEN yang telah memiliki pengalaman di konsul pesawat terbang, mendapat kepercayaan dari Kementerian Perhubungan sebagai *engineering* untuk konsul pesawat terbang. Kepercayaan juga diberikan di sektor laut dan persinyalan otomatis perkeretaapian Indonesia. "Dibidang renewable energi terbaru, tahun ini, PT LEN melakukan langkah terobosan, dan rencana ekspansi terhadap kapasitas solar modul, dari 6 Mwp per tahun melalui program 5 tahun, menjadi 50-100 Mwp per tahun," kata Abraham.

Di bidang transportasi kereta api, Abraham menyebut antar stasiun berkembang konsep koridor, dari *engineering* sampai implementasi. Sementara proyek MRT-Jakarta, seperti *signaling*, CBTC (Computer Base Train Control),



PRODUK LEN: Persinyalan otomatis, lintas Tegay – Pe

ui Inovasi Bisnis

listrik aliran atas, tiketing electric dan passenger information sistim. PT LEN punya kemampuan dan pengalaman. Guna merealisasikan kesiapan itu, LEN bekerjasama dengan pihak Jepang, dan sudah dilakukan presentasi. Terkait proyek MRT, seperti diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, diperkirakan mulai 2012.

Proyek lain, ungkap Abraham, airport link di Surabaya, Medan dan Jakarta sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan presentasi. Kesiapan lainnya, LEN juga mengantisipasi penggunaan ATP (Automatic Train Protection) di loko KA. Sistem yang dipakai di banyak negara maju, kapan digunakan di Indonesia, LEN sudah siap.

“Sebagai salah satu BUMN, group di bidang strategi dan sebagai industri yang menjadi *counter park* dari pemerintah, PT LEN selalu mendukung kebijakan pemerintah. Tapi yang penting, seberapa besar produk LEN turut mendukung pembangunan nasional sesuai harapan stake holder,” jelas dia.

Menurut Abraham, bagi proyek yang menggunakan APBN, selama sistem dan produk berasal dari luar negeri, itu namanya bukan strategis. Idealnya, dianggap strategis bila penggunaan produk dalam negeri di atas 50 persen. LEN

sendiri, 80 persen menargetkan penggunaan produk lokal, baik komponen maupun sistem. Dengan demikian, akan memberi nilai tambah terhadap industri lokal agar makin tumbuh dan berkembang.

Berbagai peluang bisnis secara maksimal terus dilakukan, di samping melalui anggaran APBN, LEN industri, kata Abraham, melakukan inovasi pendanaan dari berbagai sumber, yakni bagaimana LEN turut ambil bagian mengurangi mengalirnya devisa ke luar negeri akibat impor. Dan turut menumbuhkan industri dalam negeri, membuka lapangan kerja baru dan menjadi bagian mengurangi tingkat kemiskinan. PT LEN dan BUMN yang lain secara bersama turut memajukan kesejahteraan rakyat.

Computer Base Interlocking

Sementara itu, Adi Yusuf, General Manager Transportation System Buseness Unit PT LEN mengatakan, PT LEN siap mendukung penuh pembangunan perkeretaapian nasional, khususnya dalam bidang persinyalan, melalui; Pertama, *resignalling*, yakni penggantian sistem persinyalan mekanik yang sudah tua dan sulit dikembangkan menjadi sistem persinyalan elektrik. Dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan dan efisiensi operasional kereta.

Kedua, modifikasi *single track* menjadi *double track* dan *double-double track*, dalam rangka meningkatkan kapasitas lintas dan meningkatkan keselamatan. Dan ketiga, pembangunan sistem persinyalan untuk jalur-jalur KA baru, seperti jalur KA batubara di Sumatera dan Kalimantan, serta KA perkotaan di daerah-daerah.

Terkait peranan LEN di bidang transportasi, khususnya bidang persinyalan, Adi menjelaskan, diwujudkan dengan berbagai produk LEN yang dibagi menjadi 3 kelompok: yakni, Pertama, generasi SIL (Sistem Interlocking LEN) diganti CBA (Computer Base Interlocking) yang dirilis tahun 2009. Tahun 2012 akan diterapkan di berbagai stasiun di Jawa dan Sumatera. Ini merupakan produk kelompok dan hasil pengembangan PT LEN.

Kedua, produk penunjang persinyalan, LEN TBI (*Token Block Instrumen*) sudah diterapkan di 40 stasiun di Sumatera Utara dan dikembangkan di lintas lainnya. Mobis (*Mikanical To Optical Block Intervisite sistem*) sebagai penunjang persinyalan, khususnya dalam komunikasi antar block. Ketiga, sistem integrasi melalui jaringan fiber optik dan komunikasi melalui modifikasi. Alat ini sebagai

penunjang *double track* dengan peralatan sistem *enterlocking existing* dan beberapa fender internasional.

Modifikasi, ungkap Adi, single track, double track dan double-double track, dengan kemampuan rancang bangun yang dilakukan PT LEN sebagai produk dalam negeri. Turut mendukung pengembangan perkeretaapian Indonesia, melalui persinyalan otomatis produk LEN yang tersebar di jalur KA, baik di Jawa maupun



Abraham Mose

di Sumatera. “Sesuai UU 23/2007, bila swasta dan Pemda akan melakukan pembangunan perkeretaapian, diharapkan sistem persinyalan disesuaikan dengan persinyalan Indonesia. Khususnya produk PT LEN yang diakui secara internasional,” kata Adi.

Di tempat terpisah, Toni Surakusumah, manajemen proyek unit bisnis sistem transportasi PT LEN mengungkapkan, bila bicara bisnis transportasi, berarti menyangkut hajat orang banyak dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Ke depan, Toni berharap PT LEN menjadi perusahaan persinyalan internasional. Arah ke sana sebenarnya sudah terlihat. “Adanya penawaran berbagai negara, dimana PT LEN telah tercatat sebagai *engineering company* dalam bidang persinyalan. Kepercayaan perusahaan besar mancanegara yang bersedia jika produknya dimanufaktur di Indonesia dengan menggunakan tenaga Indonesia,” katanya.

Toni menambahkan, LEN sedang meningkatkan sistem keamanan dan siap mewujudkan Automatic Train Protection (ATP). Dengan ATP ini, walau tidak diharapkan, bila masinis tertidur dan KA yang dikemudikan melanggar sinyal, secara otomatis kereta akan berhenti dengan sendirinya. ■ RI



Pekalongan.



Demonstran anti Khadafi membawa poster-poster tidak percaya pada pemerintah Libya

Sipil dari kalangan oposisi maupun pro Khadafi ikut ber

Libya Bergolak

Revolusi 15 Februari lalu menjadi puncak ketidakpuasan rakyat Libya terhadap pemimpinnya, Moamar Khadafi, yang telah berkuasa selama 41 tahun lebih. Sebagian kalangan melihat, krisis Libya harus diselesaikan dengan resolusi politik bukan dengan aksi militer.

Revolusi yang memicu perang antara kelompok pro Khadafi dan kelompok oposisi tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda usai. Bahkan sejak awal Maret lalu pecah perang saudara yang telah menewaskan 6.000 orang lebih.

Kelompok oposisi yang berhasil merebut Libya bagian timur kini sudah mengibarkan bendera baru Libya yang berwarna paduan merah, hitam, dan hijau dengan gambar bulan bintang di tengah-tengahnya.

Bendera baru Libya itu seakan ingin memberikan pesan kepada siapa pun yang kini mengunjungi Libya tentang adanya sebuah realitas, yaitu Libya era baru. Libya yang terbebas dari rezim otoriter Moamar Khadafi yang berkuasa di negeri itu sejak 1969 melalui sebuah aksi kudeta militer terhadap Raja Idris, penguasa Libya saat itu.

Kepala Dewan Nasional Libya (kelompok anti Khadafi) Mustafa Abdel Jalil menegaskan bahwa para pejuang yang dipimpinnya terus merengsek menembus Tripoli dan merebut kendali ibu kota dari tangan Khadafi. Kelompok ini memiliki basis pemerintahan di kota Benghazi.

Rezim Khadafi selama ini terkenal kejam terhadap kaum oposisi Libya. Bagi kaum oposisi Libya hanya ada tiga pilihan, yaitu pertama, dibunuh. Kedua, hilang tanpa berita. Ketiga, hidup di pengasingan.

Kubu pendukung Moamar Khadafi pun tak tinggal diam. Mereka mengerahkan semua kekuatan untuk menyerang kota-kota di Libya Timur yang dikuasai kubu oposisi. Dua kubu saling serang memakai rudal, tank, senjata otomatis, dan jet tempur.

Misalnya, pertempuran sengit terjadi antara kelompok pendukung dan antirezim Khadafi di dua kota strategis di Libya barat, yakni Zawiyah dan Misrata. Kota Zawiyah berada 50 km di barat Tripoli, adalah kota yang dipenuhi depot-depot minyak dan merupakan salah satu basis kilang minyak. Sedangkan Misrata berada 200 km di timur Tripoli.

Para saksi mata mengatakan, pemuda Zawiyah yang dipersenjatai menempati atap bangunan bertingkat untuk memantau gerakan loyalis Khadafi. Mereka melepaskan tembakan peringatan jika pasukan Khadafi mendekat. Di beberapa titik, mereka menembaki pasukan pro-Khadafi. Sedangkan di Misrata, terjadi perang di

jalanan dan juga perang dengan saling memburu dari rumah ke rumah antara kaum oposisi bersenjata dan loyalis Khadafi. Pertempuran sengit terjadi di sisi timur dan barat kota Misrata.

Pasukan loyalis Khadafi yang diperkuat dengan tank dan artileri belum mampu menguasai secara penuh kota Misrata. Kaum oposisi bersenjata menggunakan taktik perang gerilya yang cukup efektif melawan loyalis Khadafi. Kota Misrata, yang merupakan kota ketiga terbesar di Libya, adalah basis terkuat kaum revolusioner di Libya barat.

Khadafi mengancam akan ada banjir darah di Libya jika Barat terus ikut campur dalam urusan dalam negerinya (2/3). Dalam wawancara eksklusif dengan ABC, Khadafi menyatakan tidak akan turun dari kekuasaan. "Kepada 'teman-teman' di Eropa, jangan pernah pikir bisa mengguncang pemerintahan di Libya. Mustahil, mustahil," ujarnya.

Perlawanan keras juga ditunjukkan kelompok oposisi. Para tokoh oposisi mengatakan, mereka berusaha mengerahkan kekuatan yang didukung unit-unit militer prakyat, milisi, dan relawan yang memiliki pelatihan militer dasar. Mereka berjuang menggempur Khadafi dari berbagai arah untuk merebut Tripoli. "Kami tidak akan berhenti berjuang sampai seluruh negeri ini bebas dari rezim Khadafi. Libya menuju merdeka. Khadafi harus turun dan pergi," pekik Abdul Jalil saat menyampaikan pidatonya di lapangan kota Al Bayda, timur Libya (4/3).



Perang sehingga memperburuk situasi

Sementara itu, Amerika Serikat mengerahkan sejumlah kapal perang dan pesawat tempur ke Libya terkait dengan ketegangan antara kubu oposisi dan pro-Khadafi. Ini dilihat sebagai unjuk kekuatan simbolis oleh AS dan sekutunya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). NATO turun melakukan intervensi militer di negeri kaya minyak itu. NATO melakukan serangan udara dengan sasaran kekuatan Khadafy.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat telah mendesak agar Khadafi mundur. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Senin (28/2) di Geneva, Swiss, menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan beberapa negara Uni Eropa dalam rangka pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pertemuan dengan Menlu Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia, Hillary membicarakan sanksi bagi Khadafy. Sanksi yang bakal dikenakan AS kepada Khadafi juga akan dikordinasikan dengan Australia dan Rusia. Tujuannya agar dunia bersatu menghukum rezim Khadafi.

Semakin banyak negara yang menekan dan mengisolasi posisi pemimpin Libya Moammar Khadafi agar ia segera turun. Setelah memberlakukan larangan perjalanan dan mencabut kekebalan diplomatik, para pemimpin dunia membekukan kekayaan atau aset pribadi, keluarga, dan kroni Khadafi, terutama di Eropa (1/3).

Mahkamah Internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda, menyatakan akan memeriksa Khadafi atas kemungkinan terjadinya kejahatan kemanusiaan. Luis Moreno-Campo, salah satu jaksa, menjelaskan penyelidikan segera dilakukan dan didukung penuh oleh Dewan Keamanan PBB. Ini merupakan peringatan bagi rezim Khadafi supaya segera menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil.

Tak hanya itu, sanksi larangan terbang (No-Fly Zone) sudah diberlakukan. Menurut Menlu Inggris William Hague, pemberlakuan larangan terbang adalah langkah darurat untuk mencegah bertambahnya jumlah korban di Libya. Selama konflik berlangsung, jet-jet militer Angkatan Udara Libya kerap mengebom penduduk dan kota-kota dengan rudal anti-pesawat.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara, dalam pertemuannya di Jeddah, Arab Saudi, juga mendesak Dewan Keamanan PBB segera menerapkan sanksi tersebut (8/3). Dengan larangan terbang, Libya tidak diperkenankan melakukan aktivitas udara, terutama bagi militer. Sanksi yang sama pernah dialami oleh Iran dan Bosnia Herzegovina, akibat konflik yang terjadi di negara tersebut.

Sementara itu akibat konflik yang terus berlangsung, jumlah pengungsi di perbatasan Libya-Tunisia terus bertambah. Mereka terancam kelaparan dan terjangkit berbagai penyakit karena bantuan yang tidak memadai.

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyatakan sekitar 70 ribu pengungsi masuk ke Tunisia sejak konflik terjadi. Kini kemampuan Tunisia untuk memberi makan, tempat tinggal dan sanitasi bagi pengungsi semakin lemah. "Kondisi pengungsi sangat memprihatinkan," kata Ayman Grahaibeh, pemimpin tim UNHCR. Ribuan pengungsi pulang ke Mesir menggunakan pesawat dan kapal laut bantuan dari Prancis dan Inggris. Amerika Serikat juga mengirimkan kapal serang amfibi USS Kearsarge dan USS Ponce untuk persiapan bantuan kemanusiaan. UNHCR juga mendirikan rumah sakit darurat berbentuk tenda-tenda.

Menurut sumber Aljazirah, Khadafy telah membuat proposal dialog dengan Dewan Nasional Libya, yang menguasai daerah timur (8/3). Dalam proposal dia-

log, Khadafi menyatakan ingin menyerahkan kekuasaan kepada ketua parlemen dan ingin meninggalkan Libya dengan jaminan keamanan bagi diri dan keluarganya. Khadafi juga meminta agar dirinya tidak dibawa ke ranah pengadilan. Namun, berita dialog ini dibantah pihak Khadafi. Dalam siaran televisi maupun di publik, Khadafi terus menyatakan akan mempertahankan setiap jengkal wilayah Libya. Oposisi juga menolak diajak berunding dengan pihak rezim, yang menurut mereka "telah menumpahkan darah bangsa sendiri...."

Sementara itu, aksi militer yang dikerahkan negara-negara anggota NATO dipertanyakan. Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle mengatakan, krisis Libya tidak bisa diselesaikan melalui aksi militer. "Semua pihak harus mulai melakukan resolusi politik," kata Westerwelle.

Jerman dan China sejak awal mendukung penegakan zona larangan terbang di atas Libya. Meski demikian, sama seperti Rusia, mereka tidak setuju intervensi militer terhadap Libya, melainkan hanya melalui pendekatan diplomatik. Menlu China Yang Jiechi juga menyatakan, China mendukung solusi diplomatik. "Masalah ini harus ditangani dengan tepat dengan cara diplomatik dan politik. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, China akan terus memainkan peran yang bertanggung jawab dalam hal ini," kata Yang.

China dan Jerman, anggota tidak tetap DK PBB, abstain dalam pemungutan suara DK PBB terkait zona larangan terbang. Mereka mendesak Khadafy menarik pasukannya dari pusat-pusat penduduk. Jerman meminta Khadafy turun. China mengkritik NATO telah melampaui misi Resolusi PBB 1973. Kanselir Jerman Angela Merkel sejak awal tak yakin serangan koalisi dapat meredakan krisis Libya. Menurut Merkel, serangan ini malah menggelorakan semangat Libya untuk berperang. ■ CID



Seorang ibu menunjukkan foto anaknya yang menjadi korban pasukan pendukung Khadafi

BlackBerry Latah demi Gengsi

Diakui atau tidak, sebagian masyarakat di Indonesia terkenal latah dalam hal gaya hidup termasuk dalam hal teknologi. Baik tua muda, pelajar atau karyawan, semuanya berlomba-lomba ingin memiliki perangkat teknologi, salah satunya BlackBerry, yang sudah dianggap sebagai ikon gaya hidup.

Tahun 2011 menjadi tahun ketujuh BlackBerry (BB) menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Hingga akhir 2010, dari sekitar 41 juta pengguna BlackBerry Messenger di dunia sebanyak 2 juta diantaranya berasal dari Indonesia. Indonesia termasuk pengguna BlackBerry terbesar di Asia Pasifik yang pertumbuhannya sangat pesat.

Beberapa tahun setelah diperkenalkan pada pertengahan Desember 2004, pengguna BlackBerry mayoritas berasal dari golongan menengah ke atas yang berprofesi sebagai profesional atau pebisnis. Mereka memosisikan BlackBerry sebagai "kantor" berjalan. Agenda kerja, catatan harian, dan rencana hidup disusun dengan rapi melalui *gadget* kecil itu. Mereka bisa menikmati layanan push e-mail, sebuah layanan yang memudahkan seseorang menerima e-mail layaknya SMS, sehingga orang tidak harus melakukan kegiatan ritual memeriksa e-mail, karena peranti ini akan "berteriak" memberikan notifikasi jika ada e-mail yang masuk.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan pembuat BlackBerry, Research In Motion (RIM), peranti BlackBerry tidak hanya memberikan fasilitas *push e-mail* saja. BlackBerry sudah berubah menjadi sebuah *smartphone* (telepon pintar) yang memiliki berbagai macam fungsi dan fitur. Selain berfungsi sebagai telepon, SMS dan MMS, BlackBerry juga dapat digunakan sebagai kamera/video digital, pemutar musik dan video, penunjuk jalan lewat *global positioning system* (GPS), internet mobile, e-book reader, modem dan juga dapat mengakses internet via Wi-Fi (*wireless fidelity*).

BlackBerry juga semakin menarik untuk dimiliki karena RIM memberikan layanan keamanan kepada penggunanya. Pencuri ponsel yang berpengalaman akan berpikir dua kali mencuri BlackBerry karena setiap

perangkat BlackBerry yang terkoneksi ke server RIM harus memiliki pengenal yang unik yang disebut PIN. Jika perangkat BlackBerry hilang, pengguna bisa melapor ke RIM sehingga PIN perangkat yang hilang tersebut diblokir dan otomatis perangkat BlackBerry curian tadi tidak akan bisa mengakses jaringan RIM dan hanya bisa melakukan telepon, SMS dan MMS - layaknya ponsel biasa - yang hanya mengandalkan jaringan provider.

RIM juga memiliki jaringan eksklusif yang menghubungkan seluruh BlackBerry di seluruh dunia. Dengan adanya jaringan eksklusif ini, para pengguna BlackBerry di seluruh dunia dapat berkomunikasi baik mengirimkan e-mail maupun BlackBerry Messenger dengan hanya mengandalkan PIN. Hal ini hanya dapat dilakukan pada perangkat BlackBerry.

BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia lewat operator Indosat. Namun sekarang, Excelcom, Telkomsel, Axis, dan Three Indonesia, juga ikut meramaikan pasar BlackBerry di Indonesia sehingga persaingan semakin kompetitif. Pada awalnya, kebanyakan pengguna BlackBerry dikhususkan bagi karyawan di sebuah perusahaan tertentu saja sehingga peranti ini identik dengan sebutan *corporate device*. Paket *software* yang digunakan diberi nama BlackBerry Enterprise Server (BES).

Namun sejak tahun 2005, para operator seluler mulai menyediakan layanan BlackBerry yang lebih luas, menasar ke segmen umum, yakni BIS (BlackBerry Internet Service) dan menyusul BlackBerry Connect. Layanan BIS terbagi lagi menjadi dua jenis, pertama adalah layanan BIS yang murni bagi pelanggan umum atau perorangan, yang kedua adalah layanan BIS yang terintegrasi dengan BES bernama BES+. Layanan BES+ memungkinkan pelanggan korporat menikmati akses e-mail umum dan e-mail BES. Sedangkan BlackBerry Connect merupa-



LATAH: Pengguna BlackBerry tidak hanya dari kalangan ibu-ibu rumah tangga pun sudah terjangkit demam Black

kan aplikasi yang dapat di-*install* ke berbagai ponsel selain BlackBerry. *Software* ini sangat berguna bagi pelanggan yang ingin menikmati layanan e-mail BlackBerry tanpa harus beli ponsel BlackBerry.

Para operator yang tadinya hanya menyediakan layanan BlackBerry bagi pelanggan kartu pascabayar kemudian menggebrak pasar dengan memberikan layanan kepada pelanggan kartu prabayar. Dipelopori oleh Telkomsel pada Mei 2008 kemudian disusul oleh Indosat dengan meluncurkan layanan BlackBerry On Demand untuk pelanggan prabayarnya pada Juli 2008. Saat itu, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang operator selulernya memperkenalkan layanan prabayar semurah Rp5.000 per minggu atau sekitar Rp 0,55 per hari untuk paket unlimited BIS. Pilihan yang lebih murah lainnya termasuk paket "lite", dimana pelanggan dapat memilih untuk *chatting* dengan layanan push email atau *chatting* dengan layanan untuk browsing serendah USD 0,30 per hari.

Sementara bagi mereka yang ingin membayar bulanan, tersedia beberapa paket dengan harga antara Rp 60.000 sd Rp 150.000. Cukup membayar sekitar Rp 100 ribu, pengguna sudah bisa menikmati



an karyawan atau pengusaha. Bahkan pelajar dan BlackBerry

layanan koneksi internet tiada henti (Facebook, twitter, browsing, chatting, dsb), di mana saja dan kapan saja. Harga perangkat BlackBerry yang terus turun juga turut membuat banyak orang menjadi demam BlackBerry. Cukup dengan dana sekitar Rp 2,4 juta, orang sudah bisa memiliki perangkat BlackBerry.

Itulah sebabnya, sekarang pengguna BlackBerry tidak hanya dari kalangan berduit saja. Mereka yang penghasilannya pas-pasan pun bisa memamerkan BlackBerry-nya dan tidak perlu lagi merasa minder dalam pergaulan.

Biasa Latah

Diakui atau tidak, sebagian masyarakat di Indonesia memang latah dalam hal gaya hidup demikian juga dalam hal teknologi. Dalam ilmu perilaku (*behavior science*), realita ini disebut sebagai "social proof" atau sebuah perilaku individu yang dipicu semata-mata karena orang lain juga melakukan hal yang sama. "Kalau orang lain atau teman-teman saya pakai BlackBerry, saya juga harus pakai dong" atau "Hari gini kok belum pakai BlackBerry?" begitu kira-kira pernyataan sejumlah orang yang ikut-ikutan menggunakan BlackBerry.

Bila melihat ke belakang, kebiasaan la-

tah masyarakat seputar ponsel cerdas sudah terlihat saat Nokia 6600 banyak dipakai oleh artis. Masyarakat kemudian berlomba-lomba mengikutinya hingga ponsel ini dijuluki ponsel sejuta umat. Ketika Nokia 9500 dirilis, banyak orang rela mengantri dan membayar 13 juta untuk mendapatkan ponsel ini. Sekarang, ketika para artis banyak menggunakan BlackBerry, orang-orang juga ikut latah dengan membeli ponsel yang dikhususkan untuk maniak e-mail dan situs jaringan sosial ini.

Harga yang selangit bukan halangan bagi mereka yang berduit untuk memilikinya. Bahkan untuk memuaskan nafsu mereka yang ngebet ingin memiliki namun belum ada uang, provider dan penyedia layanan kartu kredit menyediakan cicilan untuk membeli ponsel BlackBerry. Boleh dibilang, popularitas BlackBerry saat ini sudah menyaingi popularitas Nokia Communicator yang telah menjadi identitas untuk menunjukkan kesuksesan orang dalam dunia bisnis.

Pengguna BlackBerry pun sekarang tidak hanya dari kalangan karyawan atau pengusaha. BlackBerry juga populer di kalangan pelajar karena akses 'tanpa biaya' saat melakukan BlackBerry Messenger (bisa chat dan sms gratis). Apalagi beberapa operator membuat paket-paket khusus dengan biaya per bulan murah, salah satunya paket BlackBerry yang hanya gratis BlackBerry messenger-an.

Tanpa bermaksud menyindir, banyak pula orang yang memakai BlackBerry dengan alasan yang membuat miris, "Ngapain gua pakai handphone Cina... kaya tukang sayur sama tukang ojek aja." Padahal saat ditanya apakah ia bisa menggunakan salah satu item maskot BlackBerry yaitu BlackBerry Messenger, dia menjawab tidak tahu. Keinginan bergaya namun tidak diiringi dengan pengetahuan tentang perangkat itu, membuat dia terlihat seperti orang gaptek yang latah. Padahal untuk sekadar sms, telepon dan online Facebook-an, ponsel biasa yang memiliki akses GPRS pun, sudah bisa melakukannya.

Agar tidak terjebak dalam latah dan nantinya malah kecewa, ada baiknya kita berpikir baik-baik, apa kebutuhan yang kita perlukan dari sebuah ponsel. Apakah benar kita butuh untuk *browsing* internet setiap hari? Apakah kita butuh untuk kirim e-mail setiap hari? Atau hanya sekadar sms dan telpon saja? Karena dengan bisa memilih apa yang terbaik buat kebutuhan kita, kita bisa menyesuaikan kebutuhan dengan pengetahuan kita.

Berikut ini ada empat tips dasar untuk memutuskan apakah seseorang itu pantas memiliki BlackBerry (ponsel cerdas) atau tidak. Pertama, bila Anda memiliki ba-

nyak teman atau keluarga yang memakai BlackBerry dan sering ditanyai PIN BlackBerry, Anda bisa berpikir untuk memiliki BlackBerry. Karena dengan BlackBerry, Anda, keluarga dan teman bisa menghemat biaya telepon dan SMS karena komunikasi kalian bisa dilaksanakan seluruhnya di BlackBerry Messenger. Selain itu, BlackBerry Messenger juga sangat nyaman bila digunakan untuk berkiriman foto dan suara.

Kedua, bila Anda seorang pekerja lapangan yang sering mengirim/menerima e-mail bisnis (e-mail penting) hingga puluhan setiap harinya, BlackBerry bisa bermanfaat. Dengan adanya BlackBerry, Anda bisa berkorespondensi e-mail, kapan saja dan di mana saja. Dengan teknologi push-e-mail, seseorang bisa menerima e-mail layaknya SMS. Ditambah lagi dengan dukungan keyboard qwerty/qwertz, mengetik pesan bisa lebih cepat dan mudah.

Ketiga, bila Anda keranjingan situs-situs sosial seperti Facebook atau Twitter serta memiliki uang lebih, BlackBerry bisa memudahkan. Lewat BlackBerry, Anda bisa terhubung dengan teman/bernarsis ria dari mana saja, entah dari mobil, sofa, bioskop, lift, ruang makan, atau puncak gunung sekalipun. Notifikasinya pun *realtime* alias Anda akan diberitahu kalau ada yang baru di Facebook atau Twitter.

Keempat, Anda siap 'diganggu' setiap saat sehingga bisa mengganggu produktivitas kerja. Sebab dengan BlackBerry, Anda akan selalu terhubung ke internet dan mendapat notifikasi berbagai macam seperti pemberitahuan ada chat BlackBerry Messenger, YM masuk, atau ada e-mail masuk. Anda juga tidak bisa lagi membuat alasan untuk tidak menerima atau mengabaikan e-mail atau instruksi penting dari Bos karena e-mail bak SMS akan dikirim dan diterima secara *realtime* lewat BlackBerry. Anda juga tidak bisa punya alasan untuk mengabaikan dan tidak membalas SMS teman dengan alasan kehabisan pulsa misalnya, sebab pada pengguna BlackBerry, alasan ini sudah tidak berlaku lagi.

Di luar keempat tips dasar ini, BlackBerry bisa menjadi perangkat yang mu-bazir bila Anda lebih banyak bekerja di depan komputer yang senantiasa terhubung internet, jarang membuka e-mail dan website (termasuk FB), hanya memiliki sedikit teman yang menggunakan BlackBerry, dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, memiliki penghasilan pas-pasan.

Oleh sebab itu, bila Anda menggunakan ponsel hanya untuk sms, telpon dan sesekali cek e-mail atau internet, lebih baik membeli ponsel dengan fitur standar yang sudah dilengkapi GPRS. ■ CID

Beri Insulin Sejak Awal

Menurut paradigma baru pengobatan diabetes, pemberian insulin idealnya diberikan lebih awal sebelum terjadi penurunan fungsi pankreas tahap lanjut.

"Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Banyak pantangannya. Padahal waktu muda, saya bisa makan semua jenis makanan. Sekarang setelah terkena diabetes, rasanya merana sekali. Mau makan saja dipilih-pilih. Kalaupun boleh dimakan, porsi hanya sedikit."

Begitulah keluhan Ibu Sella (55) saat bicara soal penyakit diabetes yang dideritanya lima tahun terakhir ini. Nenek satu cucu ini terlihat lemas dengan wajah lebih tua dari usia sebenarnya. Diabetes yang dideritanya sangat mempengaruhi kesehatan dan kebugarannya. Dulu saat masih bekerja sebagai guru SD, ia terkenal aktif dan gesit. Berbeda sekali dengan kondisinya saat ini.

Setiap tahunnya, penderita diabetes (diabetisi) di dunia seperti Ibu Sella terus bertambah. WHO memperkirakan, jumlah diabetisi akan mencapai 366 juta orang pada 2030, meningkat jauh jika dibandingkan dengan tahun 2000 sebanyak 171 juta orang. Di antara jumlah itu, sebagian besar berada di wilayah Asia.

Mengenai angka prevalensi di Asia yang lebih tinggi daripada di Barat, Dr. Dante Saksono Harbuwono SpPD, PhD, menjelaskan, "Terdapat perbedaan pola genetik orang Asia dan Barat. Secara genetik, orang Asia cenderung mengalami resistensi insulin dibandingkan dengan kulit putih."

Masih menurut data WHO, di Indonesia, jumlah diabetisi pada tahun 2000 sebanyak 8,4 juta orang dan diperkirakan meningkat menjadi 21,3 juta orang di tahun 2030. Angka tersebut menjadikan Indonesia berada di peringkat empat dalam urutan negara dengan populasi diabetisi terbanyak.

Diabetes yang dalam kedokteran disebut Diabetes Mellitus (DM) merupakan kelainan metabolisme akibat kekurangan/ketiadaan hormon insulin (DM tipe I) atau karena efek kerja insulin yang tidak sempurna (DM tipe II). Dalam keadaan normal, insulin dihasilkan oleh pankreas dan berfungsi memasukkan gula dalam

darah ke dalam sel-sel tubuh untuk dipakai dalam proses metabolisme.

Diagnosis diabetes ditegakkan berdasarkan gejalanya yaitu 3P (polidipsi/banyak minum, polifagi/banyak makan, poliuri/banyak kencing) dan hasil pemeriksaan darah yang menunjukkan kadar gula darah yang tinggi (tidak normal). Seseorang dikatakan menderita DM bila hasil pemeriksaan kadar gula darah puasanya >126mg/dl. Normalnya kadar gula darah puasa seseorang <100mg/dl. Bila nilainya antara 100mg/dl sampai 125mg/dl sudah masuk kategori pra-diabetes. Orang dalam kategori ini rentan menjadi penderita DM. Jika pemeriksaan dilakukan dalam kondisi tidak puasa, kadar gula darah >200mg/dl baru dikategorikan penderita DM.

Menurut konsultan endokrin metabolik dan diabetes Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RS Cipto Mangunkusumo, EM Yunir, pada diabetisi tipe I, pankreas tidak mampu menghasilkan insulin, untuk itu perlu suntikan insulin dari luar tubuh. Dengan penyuntikan insulin, gula dalam darah dapat dimasukkan ke sel-sel tubuh, sehingga kadar gula dalam darah tidak meningkat terus. Sedangkan, pada diabetisi tipe II terjadi ketidakpekaan tubuh terhadap insulin (resistensi). Jadi insulin tersedia tapi tidak mampu bekerja memasukkan gula dalam darah ke sel-sel tubuh.

Sejauh ini, penyakit Diabetes Mellitus belum dapat disembuhkan. Yang dapat diusahakan adalah menjaga kadar gula darah agar tetap dalam batasan normal. Dokter spesialis gizi klinik Erwin Christianto menjelaskan, untuk mencegah DM tipe I, jangan beri makanan berbahan gandum sebelum usia 1 tahun, hindari makanan yang dibakar atau dipanggang. Sedangkan untuk mencegah DM tipe II, pola makan sehat, perbanyak olahraga dan hindari obesitas. Diketahui kurangnya aktivitas tubuh dan timbunan lemak menyebabkan resistensi sel terhadap insulin.

Diabetes Mellitus dikenal dengan sebu-



TERUS MENINGKAT: Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencapai 366 juta orang pada tahun 2030

tan The Silent Killer karena penyakit ini merusak semua pembuluh darah dalam tubuh secara bertahap dan terus-menerus. Komplikasi yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan mematikan. Dr. Dante Saksono Harbuwono Spesialis Penyakit Dalam dari Divisi Metabolik dan Endokrin FKUI/RSCM menjelaskan, komplikasi terbanyak penderita diabetes tak terkontrol adalah gangguan pada pembuluh darah jantung. Kadar gula darah yang tidak terkontrol cenderung menyebabkan kadar lemak dalam darah meningkat sehingga mempercepat terjadinya aterosklerosis (penimbunan plak lemak di dalam pembuluh darah). Aterosklerosis ini 2-6 kali lebih sering terjadi pada penderita diabetes.

Sirkulasi darah pun menjadi buruk dan dapat terjadi di pembuluh darah besar (makroangiopati) seperti otak dan jantung, juga pembuluh darah kecil (mikroangiopati) seperti pada mata, ginjal, kaki, saraf dan kulit. Gangguan pada jantung dan otak sering terjadi dan mematikan yaitu serangan jantung dan stroke.

Kerusakan pada pembuluh darah mata bisa menyebabkan gangguan penglihatan akibat kerusakan pada retina mata (retinopati diabetikum). Kelainan fungsi ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal sehingga penderita harus menjalani cuci darah (dialisa). Kerusakan pada saraf yang menuju ke tangan dan kaki (polineuropati diabetikum), menyebabkan lengan dan tungkai bisa dirasakan kesemutan atau nyeri seperti terbakar. Tak hanya itu, diabetes tak terkontrol menyebabkan dis-



HO) memperkirakan jumlah penderita diabetes akan

fungsi seksual.

Untuk menekan komplikasi yang lebih lanjut, pemberian obat anti diabetes (OAD) diperlukan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Jenis OAD yang diresepkan antara lain OAD yang berfungsi merangsang pankreas untuk produksi insulin lebih banyak, memperbaiki hambatan kerja insulin, dan memperlambat pencernaan makanan menjadi gula.

Dr Olly Renaldi, konsultan endokrin metabolik dan diabetes RS Mitra Kemayoran, menjelaskan bahwa diabetisi dapat mengkonsumsi satu atau beberapa obat sesuai kebutuhan. Bahkan, sesuai paradigma baru pengobatan diabetes, pemberian insulin idealnya diberikan lebih awal sebelum terjadi penurunan fungsi pankreas tahap lanjut.

Namun demikian, kendala yang dialami para diabetisi bila menjalani terapi insulin adalah rasa sakit saat disuntik dan harganya yang cukup mahal dibandingkan OAD lain. Akibatnya, para diabetisi enggan menggunakan insulin. Seperti pengalaman Ny. Sella. "Lebih baik makan obat bermacam-macam daripada disuntik. OAD mudah didapat dan harganya terjangkau, apalagi saya kan selalu menggunakan ASKES saat membeli obat," katanya.

Oleh sebab itu, paradigma baru pengobatan diabetes perlu terus disosialisasikan. Sehingga para diabetisi tidak ragu lagi ketika dokter meresepkan insulin. Terlebih, kini insulin tersedia dalam kemasan alat suntik yang praktis dan nyaman digunakan. ■ DGR

Kenali DM Tipe I pada Anak

Jangan cepat-cepat memarahi anak bila ia sering mengompol. Sebaiknya cari tahu dulu penyebabnya. Siapa tahu ia mengidap Diabetes Melitus Tipe I. Beberapa gejala yang sering ditemukan pada anak dengan DM tipe I yaitu, sering buang air kecil, banyak minum, banyak makan, berat badan menurun, dan mudah lelah. Penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas menghasilkan insulin ini merupakan penyakit bawaan yang tidak dapat dicegah maupun disembuhkan. Meski demikian, para penderita DM dapat hidup normal seperti anak kebanyakan jika kadar gula darahnya terkontrol. Penyakit ini juga tidak memengaruhi kecerdasan anak jika kadar gula darahnya normal.

Anak dengan DM tipe I perlu mendapat perhatian khusus. Dia harus mendapat suntikan insulin secara teratur. Hal ini tentu membuat anak merasa berat pada awalnya. Di sinilah peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi si anak memulai kebiasaan menyuntik insulin.

Anda juga tak perlu terlalu cemas menghadapi anak penderita DM tipe I. Yang perlu Anda lakukan adalah mengatur pola makan anak, mengajak anak berolahraga, berkonsultasi dengan dokter mengenai dosis insulin dan menyuntikkannya secara teratur, serta terus memonitor kadar gula darah si anak.

Diet Sehat ala Diabetisi

Umumnya orang Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Padahal nasi termasuk karbohidrat sederhana yang dicerna menjadi gula dalam darah. Oleh sebab itu, pengaturan makan merupakan pilar utama pengelolaan diabetes mellitus (DM). Sebenarnya anjuran makan pada diabetisi sama dengan anjuran

makan sehat umumnya, yaitu makanan menu seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing.

"Pengaturan pola makan dilakukan dengan memperhatikan prinsip 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makan," jelas Dr. Erwin Christianto, SpGK. Jumlah konsumsi makanan disesuaikan dengan kebutuhan kalori sehari-hari yaitu 30 kkal/kg BB (untuk laki-laki) dan 25 kkal/kg BB (untuk perempuan). Jumlah tersebut masih harus ditambah 10% sampai 30% tergantung berat ringan aktivitas harian seseorang.

Jenis makanan yang dianjurkan adalah makanan berkarbohidrat kompleks dan tinggi serat. Misalnya padi-padian, sereal, buah dan sayuran karena mengandung serat tinggi. Karbohidrat kompleks lebih lambat dicerna sehingga kadar gula darah lebih stabil. Komposisi makanan idealnya, karbohidrat 45-65%, protein 10%-20%, dan lemak 20%-25%. Makanan yang

perlu dibatasi adalah gula, madu, sirup, kue kukis, dodol dan kue-kue manis lainnya. Karbohidrat sederhana seperti gula hanya mengandung karbohidrat saja sehingga kurang bermanfaat.

S u m b e r protein banyak terdapat dalam ikan, ayam, daging,

tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Bagi diabetisi, makanan jangan terlalu banyak digoreng, sebaiknya lebih banyak dimasak menggunakan sedikit minyak seperti dipanggang, dikukus, dibuat sup, direbus atau dibakar. Batasi konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti otak, jeroan, dan kuning telur.

Mengenai jadwal makan, diabetisi dianjurkan makan setiap 3 jam sekali, terdiri dari tiga kali makan utama (pagi, siang, malam) dan tiga kali makan selingan di antara jadwal makan utama. Pilihlah buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai selingan.

■ DGR



Menghidupkan Lagi Opera Batak

Opera Batak yang sempat merajai dunia hiburan di Sumatera Utara akhirnya mati suri setelah dekade 1980-an. Sejumlah upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali kesenian yang lahir sekitar tahun 1920-an ini. Di antaranya dengan mendirikan Pusat Latihan Opera Batak (PLOT).

Jika di Jawa Timur ada ludruk, di Jawa Tengah ada seni ketoprak, maka di Sumatera Utara ada Opera Batak. Bagi suku Batak, opera dikenal sebagai hiburan kesenian tradisional yang di masanya sangat populer dan banyak diminati masyarakat. Layaknya opera di Eropa yang memadukan seni tari, seni musik, seni peran dan seni suara, Opera Batak ciptaan Tilhang Oberlin Gultom yang lahir sekitar tahun 1925 ini juga tidak lepas dari unsur-unsur seni tersebut dalam setiap pementasannya.

Pada masa kejayaannya, pementasan Opera Batak sempat merajai dunia hiburan di Sumatera Utara. Pementasan dilakukan dengan berkeliling di sejumlah daerah dan dilakukan di tempat terbuka. Biasanya dilakukan pada malam hari. Lama tur pementasan di suatu desa juga bervariasi tergantung kondisi, bisa berminggu-minggu namun tidak sampai satu bulan.

Pementasan dilakukan semenarik mungkin di atas panggung menyerupai rumah adat Batak dengan hiasan gorga, ukiran khas batak. Sedangkan untuk menghubungkan adegan ketika akan berganti dari selingan lagu, tari maupun lawak, pentas dilengkapi dengan tirai penutup. Pementasan Opera Batak yang dilakukan pada malam hari masih menggunakan lampu petromak atau lampu gas yang kadang diturunkan untuk menambah suplai angin agar pencahayaan tetap terjaga. Berbeda dengan sekarang dimana panggung teater disorot dengan warna-warni cahaya lampu.

Seperti lazimnya pertunjukan profesional, penonton harus membeli tiket. Karena besarnya antusias masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan opera, tidak sedikit di antara mereka yang rela menukarkan beras atau hasil ladangnya demi menyaksikan pementasan. Tiket baru didapatkan setelah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak.

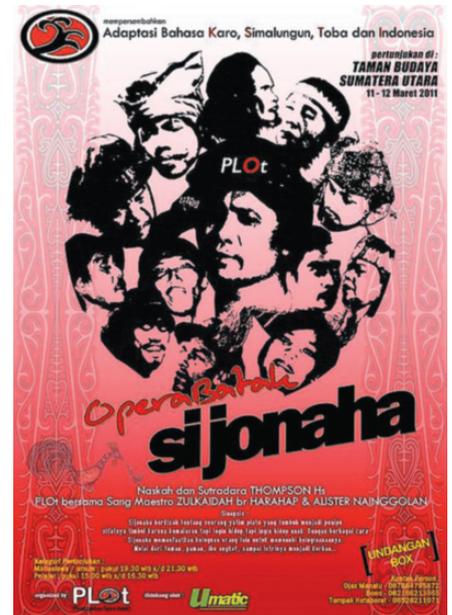
Tidak seperti pementasan saat ini, layaknya gedung teater Taman Ismail Marzuki yang nyaman, penonton Opera



Batak sering bubar karena cuaca yang tidak bersahabat. Di sisi lain, tidak jarang pertunjukan baru selesai menjelang dini hari jika lakon yang dipertunjukkan sangat menarik. Tema yang diangkat sebagai ceritapun beragam mulai dari kisah legenda, mitos, atau cerita kepahlawanan. Cerita-cerita Opera Batak juga sering mengangkat masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang sedang hangat dibicarakan. Isinya pun tidak hanya menghibur namun juga menekankan penyampaian pesan moral yang mendidik kepada para penonton.

Namun dalam perkembangannya, Opera Batak mulai tenggelam setelah sang maestro Tilhang Oberlin Gultom meninggal pada 1970. Seiring dengan munculnya berbagai acara televisi pada tahun 1980-an, arah perjalanan Opera Batak semakin tidak menentu. Hiburan kesenian rakyat yang pernah masuk Istana pada masa Presiden Soekarno ini semakin tersisihkan dari perhatian masyarakat.

Puluhan kelompok opera, di antaranya Serindo, Serada, Rompemas, Seribudi, Roos, Ropeda, Serbungas, Roserda, Sermino yang dibentuk oleh murid-murid Tilhang, perlahan-lahan berguguran. Sementara para pemainnya yang kebanyakan diambil dari pedesaan, tidak bisa lagi bertahan sebagai seniman opera yang sepenuhnya menyandarkan hidup dari hasil manggung. Sebagian dari mereka kemudian memilih kembali ke habitatnya semula. Sebagian lagi merantau ke kota dan mencari pekerjaan.



Sebut saja Sang Ratu Opera Batak Zulkaidah Harahap, didikan langsung Tilhang Oberlin Gultom yang dikenal lihai memainkan suling dan bersuara merdu. Zulkaidah termasuk orang yang masih sempat merasakan kejayaan sebagai seniman opera di era 1970-an. Dari hasil pertunjukan, ia bisa membeli sebidang tanah dan memiliki sejumlah perhiasan.

Peralihan minat masyarakat dari hiburan tradisional ke televisi membuat keberadaan Opera Batak kian tidak menentu. Zulkaidah yang mengaku mendapatkan wasiat dari Tilhang sebelum meninggal agar ia melanjutkan opera yang dibentuknya, terpaksa tidak bisa melakukannya. Zulkaidah banting setir berjualan kacang di atas kapal ferry di Danau Toba dan berjualan tuak, minuman keras khas Batak. Meski demikian, jiwa senimannya belum luntur, sambil berjualan ia juga masih meniup seruling dan bernyanyi.

Begitu juga dengan Abdul Wahab Kasim Samosir yang juga murid Tilhang Oberlin Gultom. Ia mengungkapkan kegelisahan-nya atas perkembangan kesenian Batak dewasa ini yang semakin tergerus. Menurutnya, semua orang Batak sudah menyelenggarakan dari budayanya. Iringan musik



MERAKYAT: Opera Batak sempat mencapai masa keemasannya antara tahun 1960-1973

band sudah lebih dominan ketimbang gondang saat upacara adat pernikahan terutama ketika menyempirkan ulos kepada pengantin dan kerabatnya. "Pikiran sudah buntu mengembangkan kesenian Batak sebab semua orang Batak sudah menyeleweng dari budayanya," katanya dalam suatu kesempatan wawancara dengan Wartawan Kompas, Salomo Simanungkalit.

Ia mencontohkan, orang Batak bersedia membayar band di atas Rp 2 juta, tapi untuk gondang rela kalau di bawah Rp 1 juta," ujar Kasim yang lahir 17 Agustus 1928 ini. Hatinya pun makin tersayat saat orang yang menawar jauh dari apa yang diharapkan berkata, "Sudah cukup Rp 700.000 untuk gondang". Padahal pemain gondang yang berjumlah delapan orang itu bekerja seharian hingga ker-

ngatan.

Selain itu, menurut Ketua Koordinator Pusat Latihan Opera Batak, Thomson Hutasoit, semakin dilupakan dan terpinggirkannya Opera Batak juga dilihat sebagai ketidakberdayaan kesenian rakyat ini bersaing dengan media-media yang lebih modern. Oleh sebab itu, sejak tahun 2002, program revitalisasi Opera Batak dicanangkan untuk menghidupkan kembali Opera Batak dan memperkenalkannya hingga mancanegara. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah dengan membangun gedung kebudayaan.

Sebuah kelompok Opera Batak bernama Grup Opera Silindung (GOS) pun dibentuk. Pemuda-pemudi yang bergabung dalam grup yang bermarkas di Tarutung ini diajari tentang musik khas Opera Batak dan seni peran. Kegiatan belajar

langsung dipandu oleh Thomson Hutasoit dan para pakar di bidangnya. GOS sudah beberapa kali tampil di beberapa daerah seperti Tarutung, Sipaholon, Laguboti, Pematang Siantar, dan Jakarta.

Upaya untuk menyelamatkan Opera Batak terus dilanjutkan. Pada tahun 2005, sastrawan Sitor Situmorang yang bermukim di Belanda mengajak Thomson mendirikan Pusat Latihan Opera Batak (PLOT). Selain melatih GOS, para pemain lama yang telah menyebar diajak kembali. Alhasil, kembalinya para pemain lama ini membuat PLOT makin hidup dan kebanjiran order. Bahkan Opera Batak dijadikan sarana untuk menarik massa oleh calon kepala daerah dalam pilkada. Hingga tahun 2008, usaha Thomson terus berlanjut dengan mengadakan pelatihan di 10 kabupaten di Sumatera Utara.

Pusat Latihan Opera Batak (PLOT) juga mulai mengemas Opera Batak ke dalam empat bahasa pada satu panggung yakni bahasa Karo, Simalungun, Toba dan Indonesia. Biasanya Opera Batak identik dengan bahasa Batak Toba. Dengan empat bahasa, diharapkan para pemain datang dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga semangat kebersamaan semakin erat.

Indahnya kebersamaan itu diwujudkan dalam Opera Batak yang dipentaskan pada 11-12 Maret 2011 di Taman Budaya Sumatera Utara, Medan. Opera Batak yang mementaskan naskah adaptasi cerita rakyat berjudul Si Jonaha (Si Jenaka) ini juga menampilkan keragaman tari-tarian dari 5 etnis Batak. Selain maestro opera Batak Alister Nainggolan dan Zulkaidah boru Harahap, para pemain opera adalah peserta program pelatihan revitalisasi opera Batak bantuan Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2008.

■ HS

Tilhang Oberlin Gultom Pendiri Opera Batak

Tilhang Oberlin Gultom, seniman dan pendiri Opera Batak yang dinamai Opera Tilhang (1920-1973). Selama karirnya, pria kelahiran Desa Sitamiang, Pulau Samosir ini telah mencipta 360 lagu, 12 tumba dan 24 judul drama. Setelah sang pendiri meninggal (1973), Opera Tilhang kemudian dilanjutkan para penerusnya dengan Opera Serindo (Seni Ragam Indonesia) sampai 1985. Setelah itu, opera Batak tidak pernah muncul lagi.

Bagaimana proses kehadiran opera tradisi Batak yang lebih mirip teater keliling ini, tidak ada catatan pasti. Namun, nama Tilhang Oberlin Gultom selalu dikaitkan sebagai tokoh seniman

yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920-an. Kala itu, ia menggelar opera ini di pedalaman Tapanuli Utara. Sebutan Opera Batak dipopulerkan oleh Diego van Biggelaar, misionaris Belanda yang datang ke Pulau Samosir pada 1930-an.

Opera Tilhang mencapai masa keemasannya dari tahun 1960-1973. Setelah sang pendiri sekaligus pemimpin meninggal pada tahun 1973, para penerusnya, di antaranya Abdul Wahab Kasim Samosir (Pimpinan Opera Serindo) dan Zulkaidah boru Harahap, ratu opera Tilhang kala itu, bersama suaminya Pontas Gultom, melanjutkan usaha pertunjukan opera Batak bernama Seni

Ragam Indonesia alias Serindo tersebut atas persetujuan seluruh keluarga Tilhang Gultom.

Kala itu masih ada sekitar 70 anggota. Opera Serindo yang merupakan penjelmaan Opera Tilhang menggelar pertunjukan keliling dari desa ke desa. Namun hanya mampu bertahan sampai tahun 1985 karena para penontonnya sudah mempunyai banyak pilihan hiburan, mulai dari pertunjukan musik dan artis populer, juga terutama dengan kehadiran televisi sampai pelosok desa. Akhirnya, tahun 1985, grup opera Batak Serindo yang kala itu masih punya 45 anggota, bubar.

■ tokohindonesia.com

Akhir Drama Kemelut PSSI

Menteri Pemuda olahraga akhirnya membekukan kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Dilarang menggunakan fasilitas negara serta bantuan APBN dan tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan, hingga terbentuknya pengurus yang baru.

Keputusan ini diambil Menpora Andi Mallarangeng untuk mencegah terulangnya kegagalan kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Riau (26/3). Andi menilai pengurus PSSI tidak bertanggungjawab dan tidak transparan menjalankan kongres sesuai dengan amanat FIFA. "Pengurus PSSI tidak kompeten dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, serta agenda kongres," kata Andi dengan tegas.

Dengan keluarnya pernyataan Menpora ini, Nurdin Halid (NH) dan kawan-kawan tidak bisa lagi menggunakan fasilitas negara. Begitu juga dengan kurcun dana APBN yang selama ini digunakan PSSI dihentikan. Namun demikian, pertandingan ISL serta Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan. KONI/KOI yang ditunjuk Menpora akan bekerjasama dengan penprov PSSI dan klub setempat agar kompetisi liga tetap berjalan, hingga kepengurusan PSSI yang baru terbentuk.

Seperti dilaporkan, kekisruhan dalam kongres PSSI di Riau, Sabtu (26/3) berawal ketika peserta mengeluhkan tidak adanya transparansi PSSI dalam persiapan menggelar kongres. Emosi peserta PSSI kian tersulut karena tidak puas atas akal-akal NH dan kawan-kawan, di mana sekitar 18 anggota yang sudah ditetapkan menjadi anggota kongres di Bali ditolak saat registrasi. Bahkan menurut Usman Fakaubun, pengurus PSSI Papua, kekisruhan yang terjadi merupakan skenario NH dan kawan-kawan karena pendukungnya semakin sedikit. Dari 33 pengurus provinsi, diantaranya 24 sudah bergabung ke kubu perubahan. PSSI akhirnya membuat siasat dengan mempersulit pengambilan ID Card, yang menginginkan kongres batal.

Meski kongres telah dibatalkan sebagian peserta pemilik sah suara tetap melanjutkan kongres. Hingga kemudian membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding melalui voting. Mereka sepakat menyuarakan perubahan di tubuh PSSI



Nurdin Halid

dan menyatakan diri mengambil alih kongres dengan alasan telah mencapai lebih dari 2/3 suara PSSI. Sekretaris Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) Tuty Dau mengatakan, sedikitnya 78 pemilik suara PSSI yang telah berada di lokasi kongres sudah memenuhi kuota untuk menggelar sendiri kongres yang ditinggalkan kubu Nurdin Halid. "Jumlah terakhir 78 suara. Sehingga secara statuta cukup untuk menggelar sendiri kongres," ujar Tuty Dau, Sabtu (26/3/2011).

Setelah pemilik suara memilih anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan, hasilnya langsung dilaporkan kepada FIFA dan AFC melalui surat elektronik dan juga diserahkan kepada pemerintah, Menpora dan KONI/KOI.

Dalam sidang Komite Asosiasi FIFA, seperti dilansir Liputan6.com (2/3/2011), Indonesia dinyatakan lolos dari sanksi. Keputusan resminya masih menunggu permasalahan ini dibahas lebih lanjut dalam rapat Komite Eksekutif (EXCO) FIFA di Zurich.

Sementara menunggu hasil tersebut, Menpora Andi Mallarangeng mengatakan, pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas FIFA.



SOROT: Masyarakat mendesak agar pengurus PSSI ya

Selain itu, pemerintah juga siap berdialog dengan pihak-pihak terkait termasuk PSSI demi mendapatkan jalan keluar terbaik bagi dunia sepakbola Tanah Air.

Drama PSSI

Dua kali menjabat sebagai ketua, namun Nurdin masih bersikeras mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum 2011-2015, kendati sebagian kalangan masyarakat sudah tidak menghendakinya. Nurdin sering berlandung di balik statuta FIFA yang sering dipelintir sendiri. Contohnya, sesuai dengan aturan FIFA, pengurus organisasi sepakbola tidak pernah tersangkut pidana, namun Nurdin yang sudah pernah mendekam dalam tahanan ini tetap ingin mempertahankan kekuasaannya.

Sebagai incumbent, Nurdin Halid sejak dini merapatkan barisan para pengurus PSSI untuk menyokongnya maju terus sebagai ketua. Ia tidak enggan menysisihkan yang tidak sejalan dengan pihaknya. NH sering mempertamangkan statuta federasi sepakbola dunia (FIFA) terhadap campur tangan pemerintah yakni, terancam sanksi dari FIFA. Namun demikian masyarakat yang sudah gerah tidak lagi menghiraukan hal tersebut. Masyarakat yang telah lama menginginkan adanya perubahan di tubuh PSSI, merelakan, lebih baik dibekukan FIFA daripada dipimpin Nurdin Halid.

Apalagi sejak Kongres Sepakbola Nasio-



yang baru bersih dari korupsi serta kepentingan politik.

nal (KSN) di Malang yang digagas Presiden SBY sendiri telah mengamanatkan agar dilakukan restrukturisasi organisasi dalam tubuh PSSI. Namun lagi-lagi PSSI menganggapnya hanya gurauan dan menghiraukan hasil kongres itu. Nurdin malah menuduh pemerintah sudah campur tangan. Padahal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), pemerintah berperan sebagai pembina, pengawas dan fasilitator kegiatan dan pembinaan olah raga di Tanah Air. Namun pemerintah sebagaimana dikemukakan Menpora Andi Mallarangeng, tidak berniat memaksakan kehendak atau melakukan intervensi, dengan harapan PSSI bisa membenahi diri dengan baik.

Namun pasca tidak lolosnya dua kandidat ketua, George Toitutsa dan Arifin Panigoro membuat pemerintah harus mengingatkan. Kala itu Komite Eksekutif PSSI yang bertindak melakukan klarifikasi, dari empat calon yang maju sebagai calon hanya meloloskan Nurdin Halid dan Nirwan Bakri. Pemerintah meminta agar pengurus PSSI mematuhi standar FIFA. Menpora Andi Mallarangeng secara berulang menegaskan agar PSSI menerapkan aturan main yang jelas sesuai pasal Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Sistem Keolahragaan Nasional, Statuta FIFA, dan AFC Disciplinary Code yang sama-sama

memiliki semangat, bahwa anggota pengurus sepakbola tidak tersangkut perkara pidana. Sehingga menurut Menpora peraturan yang dibuat oleh FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Dengan gagalnya George Toitutsa dan Arifin Panigoro dari kandidat calon ketua juga sangat memukul harapan publik akan ada figur baru memimpin PSSI untuk penyegeran organisasi. Sejak awal sudah tercium memang aroma dan gelagat pengurus PSSI untuk melanggengkan kekuasaan Nurdin cs dengan mencegah calon lainnya. Seruan suporter pun kian lantang dan meminta pemerintah untuk bertindak tegas. Ribuan suporter sepakbola beramai-ramai berdemonstrasi di Kantor PSSI di Senayan, Jakarta. Karena tidak percaya akan pengurusan PSSI, dalam aksinya para demonstran (23/2/2010) menyegel pintu masuk Kantor PSSI di Kompleks Gelora Bung Karno.

Namun demikian, Nurdin masih bersikeras untuk maju mencalonkan diri menjadi ketua umum PSSI 2011-2015. Meski 83 anggota PSSI pemilik suara mencabut mandat yang sebelumnya sempat diberikan. Mosi tidak percaya ditujukan kepada Ketum, Waketum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Februari lalu. Ditambah dengan pascakeputusan FIFA yang melarang Nurdin Halid mencalonkan diri menjadi Ketua PSSI.

Seperti dilaporkan berbagai media, FIFA juga menolak Nurdin dicalonkan kembali setelah perwakilan Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo bertemu dengan Presiden FIFA Sepp Blatter. Dari pembicaraan tersebut terkuak, Nurdin Halid telah melakukan kebohongan ke publik. Perihal keputusan FIFA pada Juni 2007 yang sudah melarang Nurdin menjadi Ketua Umum PSSI karena sudah pernah diputuskan bersalah oleh pengadilan dan dihukum. Dan FIFA meminta PSSI melakukan pemilihan ulang Ketua Umum PSSI, kala itu.

Namun surat tersebut tidak diungkapkan, sehingga Nurdin terus melanjutkan kekuasaannya sebagai ketua. Seperti dilansir Tempo (3/3), Djoko mengatakan, seharusnya pengurus PSSI ini sudah ilegal karena telah dianulir FIFA pada bulan Juni 2007. Menurut Djoko, Nurdin dan Nugraha Besoes bisa digugat. Menurutnyanya selama ini FIFA tidak tahu-menahu kekisruhan mengenai sepabola tanah air, karena mendapatkan informasi sepihak. FIFA tidak pernah mendengar informasi dari pihak lain. Kecurigaan Djoko pun semakin kuat, tatkala orang-orang PSSI setiap kali bertandang ke Markas FIFA di Swiss) tidak berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Swiss.

Namun seperti biasa, PSSI tetap berkelit mengenai surat FIFA yang melarang

Nurdin Halid untuk kembali memimpin PSSI. Bahkan pertemuan Joko Susilo dan Rita Subowo dengan Blatter pada Selasa (8/3/2011), menurut Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes hal itu hanyalah sebagai kabar burung. Sebab menurut Nugraha Besoes, bahwa dalam mengeluarkan keputusan, FIFA tidak pernah melakukan sesuatu dengan persepsi pribadi Presiden Joseph "Sepp" Blatter tanpa diputuskan Komite Eksekutif FIFA. Dia tidak mengakui adanya fakta yang terungkap dalam pertemuan duta besar, KONI dengan FIFA.

Pengamat sepak bola, Ari Junaedi melihat PSSI memang suka memelintir fakta. Pernyataan Nugraha menurut Ari, merupakan upaya dari PSSI memelintir fakta-fakta yang menjadi kebiasaan sebagian pengurus PSSI. Ari mencontohkan bagaimana PSSI menutup-nutupi surat FIFA pada Juni 2007 yang meminta agar NH tidak maju sebagai ketua umum PSSI. "Jadi tidak ada untungnya jika Dubes Djoko berbohong. Ia melihat ada oknum di PSSI yang punya hobi memelintir fakta," tandas Ari kepada Kompas.com (9/3/2011).

Sementara itu, melihat desakan masyarakat yang semakin meluas Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN) sejak awal ingin mengambil inisiatif untuk segera menyelenggarakan kongres, membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding PSSI. KPPN mengklaim mendapat dukungan 87 suara pengurus PSSI. Namun setelah melalui pembicaraan, sesuai arahan FIFA, akhirnya PSSI tetap dipercaya KONI untuk menyelenggarakan kongres.

PSSI akhirnya kembali menyelenggarakan kongres PSSI di Riau (26/3/2011) untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding guna persiapan sebelum pemilihan ketua PSSI untuk periode 2011-2015 pada tanggal 29 April. Namun menyusul kekacauan menjelang kongres, di mana para peserta merengsek dan mendobrak pintu ruang sidang di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, kongres akhirnya dibatalkan. Menurut Sekjen PSSI Nugraha Besoes, kongres dibatalkan setelah Nurdin Halid mengadakan pertemuan dengan pihak AFC dan FIFA karena terkait masalah keselamatan setelah melihat suasana di tempat kongres. "Mereka mengatakan ini tidak bisa dilanjutkan lagi," tandas Besoes di Hotel Aryaduta, Sabtu (26/3/2011).

Terkait dengan klaim sekjen tersebut, perwakilan FIFA dan AFC yang hadir dalam kongres menyebutkan bahwa Sekjen Nugraha Besoes dan kawan-kawan telah melakukan kebohongan publik. FIFA membantah memutuskan penundaan kongres tersebut dengan alasan keamanan. ■ HS

Bakat Bukan Penentu

Buku ini akan mengubah persepsi anda tentang bakat sekaligus mematahkan mitos yang menyatakan bahwa kapasitas dan batasan seseorang sudah ada sejak lahir.

Rusia dikenal sebagai negara yang banyak menghasilkan petenis wanita berbakat yang menduduki peringkat dua puluh teratas bahkan melampaui negara adidaya, Amerika Serikat. Siapa pula yang menyangka ada tiga penulis kaliber dunia asal Inggris yang lahir dari sebuah keluarga miskin, hampir tidak berpendidikan dan tinggal di desa terpencil. Pusat bakat-bakat luar biasa tersebut merupakan tempat yang misterius, demikian penuturan Daniel Coyle seperti yang terangkum dalam bukunya *Rahasia Bakat* (*The Talent Code*).

Selanjutnya dipaparkan Coyle, liputan media cenderung memperlakukan setiap tempat munculnya bakat tersebut sebagai suatu fenomena tunggal. Padahal, sebenarnya semua tempat tersebut merupakan bagian dari sebuah susunan yang lebih besar dan lebih tua.

Daniel Coyle adalah seorang penulis yang bekerja sebagai redaktur majalah *Outside*. *Rahasia Bakat* merupakan karya nonfiksi ketiganya. Sebelumnya Coyle telah menulis buku berjudul *Lance Armstrong's War* dan *Hardball: A Season in the Projects*, serta sebuah novel dengan judul *Waking Samuel*.

Dalam buku setebal 268 halaman ini, penulis berusaha mengungkap apa yang dimaksudnya dengan rahasia bakat. Coyle juga menyampaikan bahwa kehebatan seseorang atau yang biasa diistilahkan bakat, sesungguhnya tidak dilahirkan melainkan ditumbuhkan. Bagaimana caranya? Semuanya dikupas secara mendalam dalam buku terbitan Esensi ini.

Buku yang diterjemahkan Dedes Ekarini ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni Latihan Mendalam, Pengapian, dan Pelatihan oleh Ahli. Ketiganya berhubungan dengan tiga unsur dasar rahasia bakat yakni tekun berlatih, memelihara minat, dan menguasai pelatihan.

Bagian pertama, Latihan Mendalam, terdiri dari empat bab yang intinya mendorong para pembacanya agar terus berlatih guna mengembangkan potensi. Disebutkan pula, ada tiga hal yang perlu

diperhatikan dalam proses penggalian potensi tersebut, yakni memecah-mecah, mengulanginya, dan belajar untuk merasakannya.

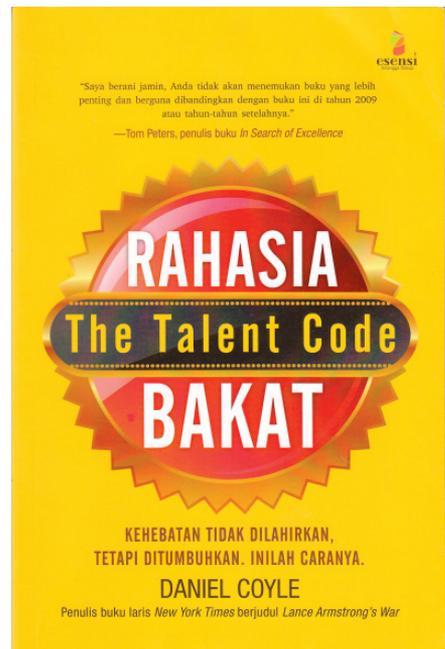
Selanjutnya di bagian kedua, Pengapian, yang terbagi menjadi tiga bab membahas tentang bagaimana caranya mengenali potensi diri. Bagian terakhir buku ini, Pelatihan oleh Ahli, Coyle menyuguhkan berbagai kisah dari sejumlah pengembang bakat, salah satunya Tom Martinez seorang pelatih sepakbola dengan ceritanya seputar uang taruhan sebesar 60 juta dollar.

Buku ini didasarkan pada penemuan-penemuan ilmiah revolusioner yang menyertakan sebuah syaraf insulator yang disebut myelin, yang pada zaman sekarang ini disebut sebagai cawan suci keterampilan belajar oleh beberapa ahli syaraf. Kabar baiknya, myelin tidak ditentukan dari awal kelahiran, sebaliknya syaraf tersebut berkembang seiring berjalannya usia, sebagaimana segala sesuatu yang sifatnya hidup, myelin juga dapat dipelihara dan diperkuat.

Untuk mendukung penulisan bukunya, selama dua tahun penulis menyambangi sejumlah tokoh dari berbagai bidang keahlian mulai dari olahraga, seni, bisnis dan musik yang tersebar di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana mereka menghasilkan kehebatan yang luar biasa. Dari penelitiannya, Coyle menemukan bahwa mereka banyak berlatih dan berkat semua latihan tersebut pertumbuhan myelin pun ikut meningkat.

Dari fakta itu, pria yang pernah dua kali masuk dalam nominasi *National Magazine Award* ini meramu hasil observasi dari riset tentang otak, perilaku, dan pelatihan nyata menjadi sebuah karya yang amat menginspirasi. Selain itu, si penulis juga mencantumkan banyak aplikasi praktis bagi kehidupan sehari-hari.

Dalam buku ini, ia menjelaskan kepada para pembacanya bagaimana kita bisa menerapkan beberapa prinsip dasar kepemimpinan untuk memaksimalkan potensi. Rahasiannya terletak pada otak. Dicontohkan dalam bab pendahuluan buku ini, bagaimana seorang gadis cilik berna-



ma samaran Clarissa yang awalnya dianggap tidak berbakat dalam bidang musik oleh guru, orangtua, bahkan dirinya sendiri.

Pendengarannya tidak terlalu baik, kepekaannya terhadap irama pun terbilang biasa-biasa saja, motivasinya pun di bawah standar. Namun dalam waktu kurang dari enam menit, ia mempercepat kecepatan belajarnya sepuluh kali lebih cepat. Ia mampu memainkan nada demi nada menjadi melodi yang indah. Hal yang lebih mengagumkan adalah Clarissa sendiri bahkan tidak menyadarinya. Semua tak lain berkat ketekunan dan kerja kerasnya dalam mengoptimalkan fungsi otak.

Dari kasus Clarissa, Coyle kemudian mencoba memberikan pemahaman kepada para orangtua, pelatih, dan pengusaha, atau siapa pun, mengenai bagaimana mereka dapat memaksimalkan potensi dalam diri seseorang. Bahwa bakat tidak datang dengan sendirinya melainkan harus dikembangkan terlebih dahulu, caranya adalah dengan menemukan cara baru berdasarkan bagaimana otak kita bekerja. Rahasiannya datang dari aspek pembelajaran psikologi, atau apa yang sesungguhnya terjadi pada susunan otak selama kita menggali potensi diri dengan banyak latihan.

Di lembar ke 247 yang diberi judul *Epilog: Dunia Myelin*, penulis menunjukkan secara singkat bagaimana rahasia bakat digunakan di wilayah kehidupan lainnya, khususnya dalam cara mendidik anak, bekerja, tumbuh dewasa, dan menjadi orang tua, bahkan dalam menguasai keterampilan-keterampilan sosial. Dengan demikian, buku ini juga menguatkan gagasan bahwa semua manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk bekerja dan berkarya asalkan tekun berlatih. ■ MULI

Make up Session

STUDIO-LIMA.COM



Studi 5
Photography and video shooting



Studi 5

Photography and video shooting



Al-Zaytun



PARAMADINA

BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid



ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

Disunting oleh:

BUDHY MUNAWAR RACHMAN



**Untuk Pemesanan
Hubungi:**

**Mahad Al-Zaytun
(0234) 742815**

**Majalah Berita Indonesia
(021) 8292735**

